

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya “**Laporan Tahunan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan TA. 2024**” dapat kami selesaikan.

Laporan Tahunan ini disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini merupakan gambaran hasil kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan tahun 2024.

Kami berharap, Laporan Tahunan ini menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan semua pihak yang terkait, sehingga semua dapat berjalan secara wajar dan lancar dengan hasil sesuai yang diharapkan. Semoga di masa datang motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang lebih baik, dapat terus ditingkatkan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam meningkatkan pencapaian kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Demikian kami sampaikan, semoga laporan ini dapat memberikan informasi kepada pihak terkait.

Belawan, 5 Februari 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



M. Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

19830730 200801 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
DAFTAR TABEL -----	v
DAFTAR GAMBAR-----	vii
DAFTAR LAMPIRAN -----	ix
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Maksud dan Tujuan -----	2
1.3. Lingkup Pelaporan -----	3
BAB II UPT DAN SATUAN PENGAWASAN SDKP BELAWAN -----	4
2.1. Struktur Organisasi -----	4
2.2. Rencana Strategis -----	6
2.3. Tugas dan Fungsi-----	7
2.4. Tujuan-----	8
2.5. Wilayah Kerja -----	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN -----	10
3.1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -----	10
3.1.1. Tata Usaha -----	10
A. Persuratan dan Kearsipan -----	10
B. Barang Milik Negara (BMN) -----	11
B.1 Barang Persediaan -----	11
B.2. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 -----	15
3.1.2. Program dan Anggaran-----	18
3.1.3. Kepegawaian-----	22

3.1.4. Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya---	33
3.2. Peningkatan Operasional Pemantauan dan Operasi Armada	34
3.2.1 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan-----	34
3.2.2. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas dan speedboat -----	47
3.3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan -----	57
3.3.1. Pengawasan Kapal Perikanan -----	57
3.3.2. Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan-----	60
3.3.3. Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan-----	63
3.3.4. Verifikasi Unit Pengolahan Ikan -----	64
3.4. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan-----	65
3.5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan -----	71
BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN -----	74
4.1. Permasalahan-----	74
A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan -----	74
B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan -----	75
C. Penanganan Pelanggaran -----	76
D. Operasional Kapal Pengawas-----	76
E. Pembangunan Kantor -----	77
D. Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengawasan SDKP-----	77
4.2. Strategi Pemecahan -----	78
A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan -----	78
B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan -----	78
C. Penanganan Pelanggaran -----	79
D. Operasional Kapal Pengawas-----	79
E. Pembangunan Kantor -----	80
F. Dukungan Manajemen-----	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN -----	81
5.1. Kesimpulan -----	81
5.2. Saran -----	82
BAB VI PENUTUP -----	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Wilker Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	6
2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2024-----	10
3. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Belawan KKP Semester II Tahun 2024, Per 31 Desember 2024 -----	12
4. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024 -----	13
5. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024 -----	15
6. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2017-2024 (5 tahun terakhir) -----	16
7. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN pada Stasiun PSDKP Belawan Per 30 September 2024 -----	16
8. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024 -----	17
9. Rekap Revisi DIPA TA 2024 Stasiun PSDKP Belawan -----	18
10. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA.2024-----	20
11. Perkembangan Realisasi Anggaran Selama Tahun 2024 -----	21
12. Komposisi Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Status Pegawai -----	22
13. Komposisi Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Satuan Pengawasan Tahun 2024-----	23
14. Komposisi PNS Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2024 -----	24
15. Komposisi Pegawai PNS dan Tenaga Kontak/PPNPN Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	25
16. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Februari 2024	26
17. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode April 2024-----	26
18. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Oktober 2024	26
19. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Desember 2024	27
20. Ketua Tim Kerja -----	27
21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 -----	27

22. Pegawai yang inpassing/perpindahan ke JFT -----	28
23. Data Tenaga Kontak/PPNPN Tahun 2024 -----	30
24. Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek Pegawai TA.2024 -----	31
25. Kapal Pengawas di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan-----	48
26. Kapal Perikanan yang telah Diperiksa oleh Kapal Pengawas Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024-----	56
27. Rekapitulasi HPK lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan-----	58
28. Kapal Perikanan Laik Operasi Lingkup Stasiun PSDKP Belawan -----	59
29. Unit usaha budidaya yang diawasi Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024-----	61
30. Penyidikan yang dilakukan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 -----	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Diagram Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan(eselon IV) -----	4
2. Sebaran Satwas Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan -----	6
3. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan -----	9
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan RI -----	9
5. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA. 2024 -----	20
6. Realisasi Anggaran Per Bulan TA.2024 -----	22
7. Komposisi Pegawai yang Tersebar di Satwas lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan-----	23
8. Denah Lantai 1 -----	35
9. Progress Minggu ke 6 -----	36
10. Progress Minggu ke 8 -----	36
11. Progress akhir pekerjaan renovasi konstruksi pos pengawasan -----	37
12. Kegiatan MS-0 -----	38
13. Material tanah timbun dan batu kali dan perataan material tanah Timbun -----	39
14. Pengujian kepadatan tanah timbunan -----	40
15. Kegiatan survey lokasi penyedia paving blok dan mobilisasi material	40
16. Kondisi renovasi pos jaga sebelum dan sesudah -----	41
17. Pagar kantor sebelum renovasi, saat progress renovasi dan sesudah renovasi pagar -----	42
18. Progress renovasi garasi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan -----	42
19. Kunjungan Staf Ahli MKP -----	43
20. Kunjungan Dirjen PSDKP beserta Jajarab Staf Ditjen PSDKP -----	44
21. Pemeriksaan bersama dilapangan terkait progress pekerjaan -----	45
22. Kegiatan pemeriksaan bersama perwakilan dari Dit POA -----	46
23. Progress pekerjaan pembangunan lapangan bulu tangkis -----	47
24. Pekerjaan general overhaul KP Hiu 01 -----	49
25. Galeri pekerjaan general overhaul auxiliary engine KP Hiu 08 -----	50

26. Galeri pekerjaan docking KP Hiu 01 dan Hiu 08-----	50
27. Pemeriksaan progress pekerjaan dan pendampingan oleh Itjen KKP --	51
28. Service alat keselamatan pada masing-masing KP -----	52
29. Kegiatan docking speedboat pengawas Dolphin 014 -----	54
30. Hasil Pengecatan, perbaikan plafon dan perbaikan kursi -----	55
31. Progress pekerjaan perbaikan reling speedboat Napoleon 028 -----	55
32. Dokumentasi Pemeriksaan Kapal di Laut (Patroli Speed Boat) -----	57
33. Rekapitulasi HPK dan SLO Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 -----	58
34. Dokumentasi Pengawasan Kapal Perikanan Oleh Pengawas Perikanan -----	60
35. Dokumentasi Pengawasan Unit Usaha Budidaya Oleh Pengawas Perikanan -----	61
36. Dokumentasi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Oleh Pengawas Perikanan -----	63
37. Dokumentasi Pengawasan Unit Pengolahan Ikan Oleh Pengawas Perikanan -----	64
38. Dokumentasi Pengawasan Pengelolaan SDK -----	71
39. Dokumentasi Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan -----	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024
2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
3. Komposisi Pegawai T.A. 2024
4. Daftar Nama Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
5. Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2024
6. Daftar Nama PPNS Lingkup Stasiun PSDKP Belawan
7. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024
8. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024
9. Rekapitulasi Kapal yang diperiksa KP Hiu 01, 08, 16, Dolphin 014 dan Napoleon 028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya mendukung kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Landasan konstitusional yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan semakin kuat, hal tersebut didasari atas lahirnya beberapa regulasi yang menjadi acuan (*guidance*) dalam melaksanakan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, landasan konstitusional tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta amanat dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis salah satunya yaitu Stasiun Pengawasan SDKP Belawan serta beberapa Satuan Pengawasan dan Wilker yang ada di bawahnya melaksanakan kegiatan untuk menjalankan amanah Undang-Undang tersebut. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan lembaga pemerintah setingkat eselon IV dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.69/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melihat kinerja yang telah dilakukan, maka Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menyusun laporan tahunan yang berisikan paparan tingkat capaian dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat menggambarkan kondisi terkini apakah Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melaksanakan prinsip-prinsip untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP pada tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan tahunan tahun 2024 yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan melakukan evaluasi atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai atau belum dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu sebagai proses atau cara untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merencanakan kegiatan/program tahun berikutnya, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan secara periodik.

1.3 Lingkup Pelaporan

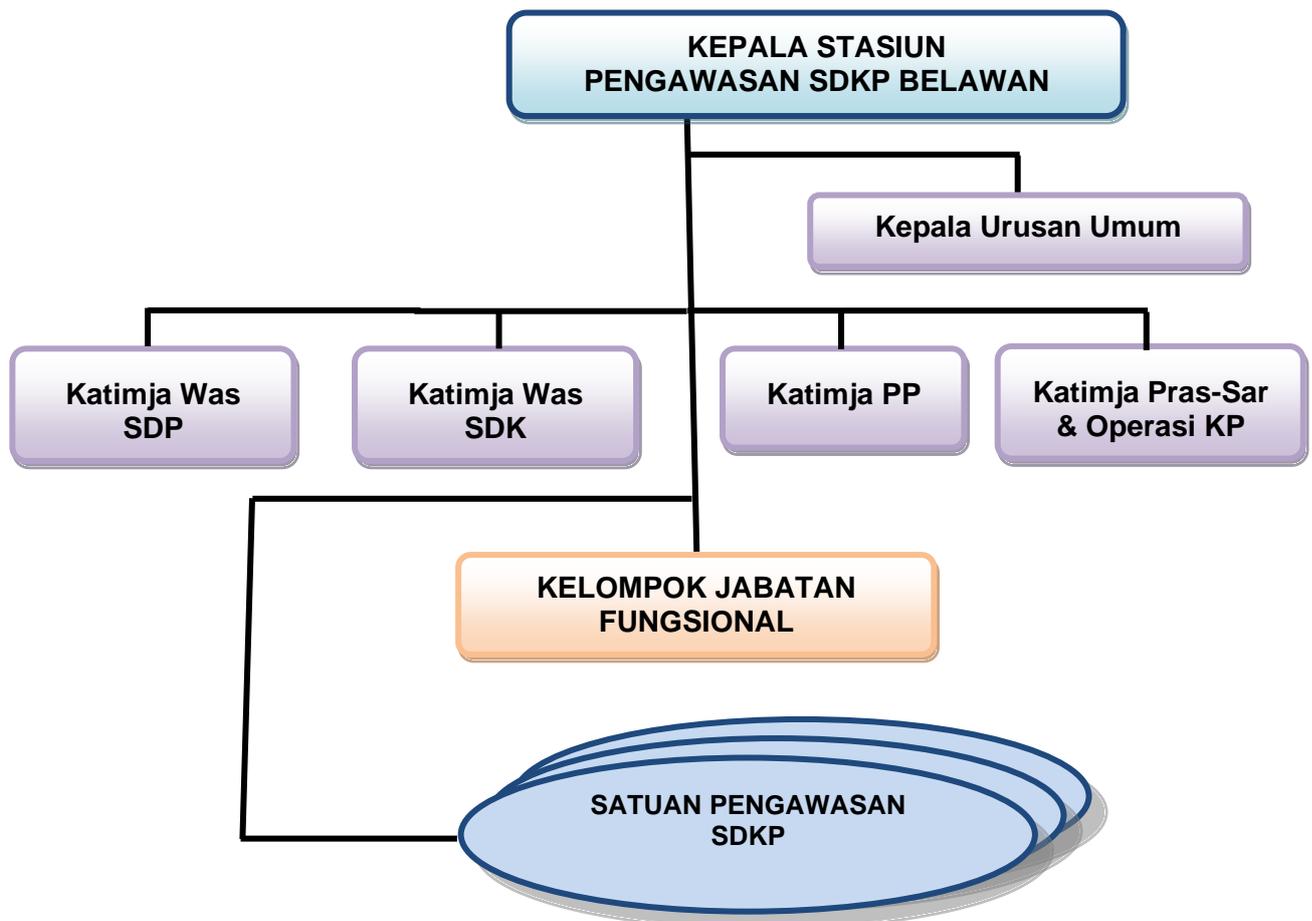
Lingkup pelaporan dibuat dari laporan evaluasi dan kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan beserta 3 (tiga) Satuan Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024, meliputi :

1. Laporan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Peningkatan Operasional Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
4. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
5. Penyelesaian Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan;

BAB II UPT & SATUAN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

2.1 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.69/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan terdiri dari Kepala Stasiun yang Menjabat Eselon IV dan langsung membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Pelaksana Koordinasi Sarana dan Prasarana, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Koordinator Satuan Pengawasan.



Gambar 1. Diagram Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan (eselon IV)

Mulai tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor B.2340/PSDKPSta.2/KP.440/X/2023, Pelaksana Koordinator dihapus dan diganti Ketua Tim Kerja. Terdapat 5 tim kerja yang membantu Kepala Stasiun PSDKP Belawan, yaitu :

1. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dengan Ketua Tim Kerja : Josia Suarta Sembiring, SH.
2. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dengan Ketua Tim Kerja : Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc.
3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran, dengan Ketua Tim Kerja : Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi.
4. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas, dengan Ketua Tim Kerja : Adhi Kurniadi, S.St.Pi
5. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial merangkap Kaur Umum, dengan Ketua Tim Kerja : Edy Sutanto, S.Pi.

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 (tiga) Satuan Pengawasan dan 9 (sembilan) Wilker Pengawasan yang sudah aktif melaksanakan kegiatan pengawasan. Satuan Pengawasan terdiri dari :

1. Satuan Pengawasan SDKP Langsa (Aceh)
2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan (Sumatera Utara)
3. Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir (Riau)

Wilayah Kerja Pengawasan SDKP yang aktif Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu terdiri dari :

Tabel 1. Wilker Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang aktif

No	Nama Wilker
1	Wilker PSDKP Idi
2	Wilker PSDKP Lhokseumawe
3	Wilker PSDKP Biureun
4	Wilker PSDKP Sigli
5	Wilker PSDKP Batubara
6	Wilker PSDKP Panipahan
7	Wilker PSDKP Kepulauan Meranti
8	Wilker PSDKP Dumai
9	Wilker PSDKP Indragiri Hilir



Gambar 2. Sebaran Satwas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2024-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2024-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2024-2029.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2024-2029 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

2.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.48/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang Pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;

5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.4 Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

2.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan di bidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari perairan ZEEI Selat Malaka serta perairan teritorial yang tersebar di Satuan Pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, ditampilkan peta sebaran satuan

pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mulai dari Utara Pulau Sumatera. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu WPP 571 mencakup Perairan Selat Malaka.

PETA WILAYAH KERJA UPT PSDKP BELAWAN



Gambar 3. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan



Gambar 4. Wilayah Pengelolaan Perikanan RI

BAB III

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3.1.1 Tata Usaha/Umum

A. Persuratan dan Kearsipan

Urusan tata usaha/umum merupakan salah satu yang mempunyai peran yang penting dalam mendukung tertib dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan. Urusan tata usaha/umum memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan administrasi, yang berkaitan dengan persuratan selama tahun 2024 di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	UPT/Satwas SDKP	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Tugas	Surat Keputusan	Jumlah
1	Belawan	1.299	3.089	1.006	77	5.471
2	Langsa	33	158	-	-	191
3	Asahan	24	158	-	-	182
4	Rokan Hilir	2	56	-	-	58
TOTAL		1.358	3.461	1.006	77	5.902

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Dari Tabel 2, dapat diketahui jumlah persuratan yang telah dilaksanakan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan selama tahun 2024 Jumlah surat masuk selama tahun 2024 sebanyak 1.358 surat dan

jumlah surat keluar selama tahun 2024 sebanyak 3.461 surat. Kegiatan persuratan lainnya yaitu terdiri dari Surat Keputusan sebanyak 77 surat dan Surat Tugas sebanyak 1.006 surat untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

B. Barang Milik Negara (BMN)

Nilai BMN per 1 Januari 2024 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp69.852.501.179,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) Rp69.815.252.279,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp37.248.900,00.

Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp75.822.157.340,00 (tujuh puluh lima delapan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 75.784.908.440,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 37.248.900,00.

Mutasi BMN per Semester II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

B.1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 746.304.007 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu tujuh rupiah), yang terdiri dari saldo awal Rp 785.896.239 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan total mutasi selama Tahun 2024 Rp 434.214.217. Jumlah tersebut dirinci dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Belawan KKP
Tahunan T.A 2024, Per 31 Desember 2024

AKUN	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Fluktuasi (%)
117111	Barang Konsumsi	2.842.160	7.960.340	10.802.500	26,3
117114	Suku Cadang	783.054.079	(47.552.572)	735.501.507	0,75
Total		785.896.239	(39.592.232)	790.314.766	-50,90

B.1.1 Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp1.485.395.729 (Satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 6.302 m² (Enam ratus tiga puluh dua) dengan nilai sebesar Rp1.485.395.729 (Satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) mutasi tambah seluas 0 m² (nol) dengan nilai sebesar Rp0 (nol) dan mutasi kurang seluas 0 m² (nol) dengan nilai sebesar Rp0 (nol).

B.1.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel) Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 56.917.426.616 (Lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 57.728.809.172 (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 1.243.304.684 (Satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu enam ratus

delapan puluh empat rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp 2.054.687.240 (Dua miliar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).

B.1.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai gabungan intra&ekstra) Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 13.831.651.967 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 24 Unit (dua puluh empat) dengan nilai sebesar Rp 7.566.735.129 (Tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), mutasi tambah sejumlah 2 Unit (dua) dengan nilai sebesar Rp 6.264.916.838 (enam miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit (nol) dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabe I (Rp)	Ekstrakomptabe I (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	7.566.735.129	0	7.566.735.129
Mutasi Tambah	6.264.916.838	0	6.264.916.838
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	13.831.651.967	0	13.831.651.967

B.1.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai gabungan intra&ekstra) Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.570.821.028 (tiga miliar

lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 3.054.699.149 (Tiga miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), mutasi tambah sebesar mutasi tambah sebesar Rp 516.121.879 (lima ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan mutasi kurang sebesar mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah).

B.1.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah).

B.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 2.215.355.592 (dua miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) merupakan pembangunan kantor Stasiun PSDKP Belawan, mutasi tambah sebesar Rp 4.535.683.125 (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluhh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp 6.751.038.717 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

B.1.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai barang gabungan intra&ekstra) Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.862.000 (enam belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp16.862.000 (enam belas juta

delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

B.2. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 37.562.796.317 (tiga puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya.

Tabel 5. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	752.363.507	0,983	0	0,000	752.363.507	0,983
	Sub Jumlah (1)	752.363.507		0		752.363.507	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	1.485.395.729	1,94	0	0,00	1.485.395.729	1,94
2	Peralatan dan Mesin	56.880.177.716	74,32	37.248.900	100	56.917.426.616	74
3	Gedung dan Bangunan	13.831.651.967	18,07	0	0,00	13.831.651.967	18,06
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.570.821.028	4,67	0	0,00	3.570.821.028	4,66
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	KDP	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (2)	75.768.046.440		37.248.900		75.805.295.340	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan	16.862.000	0,02	0		16.862.000	0,02
	Sub Jumlah (3)	16.862.000		0		16.862.000	
	Total	76.537.271.947	100	37.248.900	100	76.574.520.847	100

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2017-2024 (5 tahun terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	31 Desember 2020	34.584.220.214	-	-
2	31 Desember 2021	64.054.123.965	29.469.903.751	85,21%
3	31 Desember 2022	64.281.391.665	227.267.700	0,35%
4	31 Desember 2023	69.852.501.179	5.571.109.514	8,67%
5	31 Desember 2024	75.822.157.340	5.969.656.161	8,55%

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	1.485.395.729	
2	Peralatan dan Mesin	56.797.096.616	120.330.000
3	Gedung dan Bangunan	7.566.735.129	6.264.916.838
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.570.821.028	
5	Aset Tetap Lainnya	16.862.000	
6	Aset Tak Berwujud		
TOTAL		69.436.910.502	6.385.246.838

Tabel 8. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan per 31 Desember 2024

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang				16.862.000	16.862.000
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a Dikembalikan					
	b Ditolak					
	c Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna				2.519.058.230	2.519.058.230
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					
TOTAL		0	0	0	2.535.920.230	2.535.920.230

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2024.

3.1.2 Program dan Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan TA. 2024 semula sebesar Rp. 36,669,969,000,- (*Tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah*) berubah menjadi Rp. 40,227,391,000,- (*Empat puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) setelah mengalami enam belas kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Rekap Revisi DIPA TA 2024 Stasiun PSDKP Belawan

No	Revisi	Tanggal	Pagu	Kewenangan Revisi	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2023	36.669.969.000	-	-
2	DIPA 1	12 Januari 2024	36.669.969.000	KPA	Revisi Optimalisasi Anggaran Pemutahiran POK
3	DIPA 2	07 Februari 2024	36.669.969.000	DJA	Revisi Blokir Automatic Adjusment
4	DIPA 3	22 April 2024	36.669.969.000	KANWIL	Revisi Hal III DIPA
5	DIPA 4	01 Mei 2024	36.669.969.000	DJA	Revisi Optimalisasi Anggaran Pemutahiran POK
6	DIPA 5	30 Mei 2024	36.669.969.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
7	DIPA 6	30 Mei 2024	36.669.969.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
8	DIPA 7	26 Juni 2024	40.169.969.000	DJA	Revisi Penambahan Anggaran Renovasi
9	DIPA 8	15 Juli 2024	40.169.969.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
10	DIPA 9	08 Oktober 2024	40.169.969.000	KANWIL	Revisi HAL III DIPA
11	DIPA 10	05 November 2024	40.169.969.000	DJA	Revisi Buka Blokir AA
12	DIPA 11	11 Desember 2024	40.227.391.000	DIT. PA	Penambahan Anggaran Belanja Pegawai
13	DIPA 12	12 Desember 2024	40.227.391.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
14	DIPA 13	27 Desember	40.227.391.000	KANWIL	Optimalisasi

		2024			Anggaran dengan Pemutakhiran POK
15	DIPA 14	27 Desember 2024	40.227.391.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
16	DIPA 15	30 Desember 2024	40.227.391.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
17	DIPA 16	31 Desember 2024	40.227.391.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Dari total anggaran tersebut, terdapat 5 program/kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Pemantauan dan Operasi Armada, dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp 20,590,716,000,- (*Dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);
2. Program Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 720,422,000,- (*Tujuh ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
3. Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 512,707,000,- (*Lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*);
4. Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 1.072.000.000,- (*Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah*);
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengawasan SDKP dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 16,328,127,000,- (*Enam belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

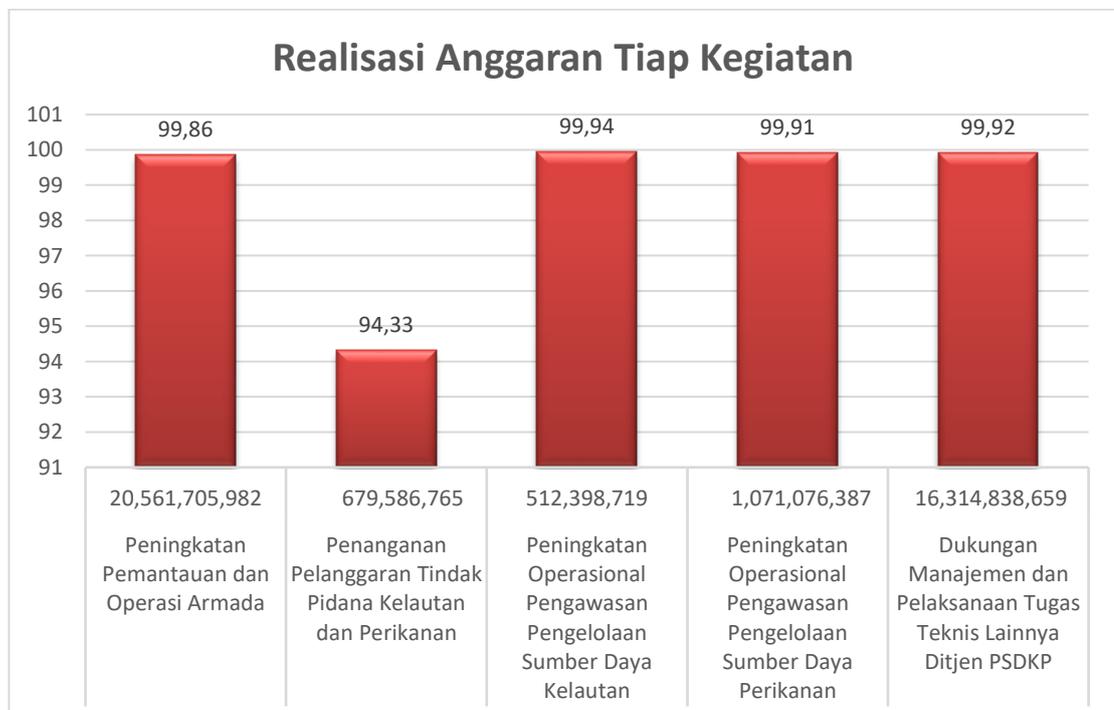
Realisasi anggaran yang terserap tahun 2024 sebesar Rp 39,139,606,512 (*Tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus dua belas rupiah*). Untuk

lebih jelasnya, realisasi anggaran tiap program kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA.2024

KODE	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	%
2350	Peningkatan Pemantauan dan Operasi Armada	20,590,716,000	20,561,705,982	99,86
2351	Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	720,422,000	679,586,765	94,33
2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	512,707,000	512,398,719	99,94
2353	Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.072.000.000	1,071,076,387	99,91
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	16,328,127,000	16,314,838,659	99,92
	JUMLAH	39,223,972,000	39,139,606,512	99,78

Data Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024



Gambar 5. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA.2024

Adapun perkembangan realisasi anggaran setiap bulan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

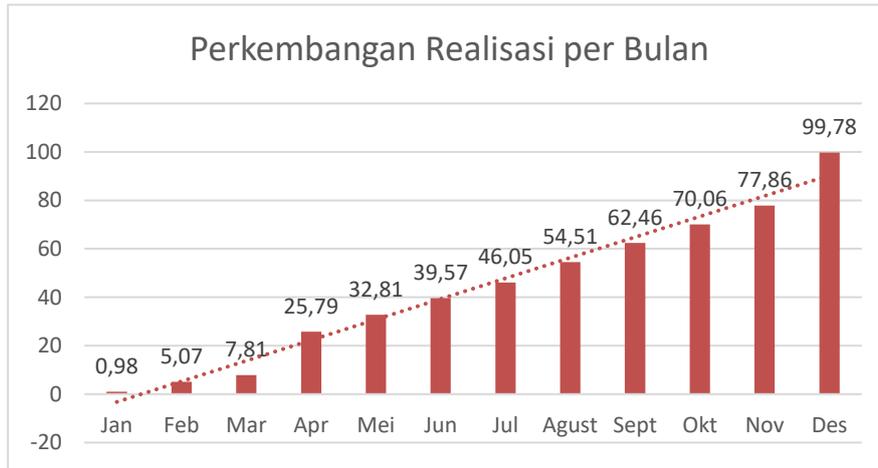
Tabel 11. Perkembangan Realisasi Anggaran Selama Tahun 2024

NO	Bulan	Realisasi (Rp)	Realisasi Sampai Bulan (Rp)	%
1	JANUARI	376.550.500	376.550.500	0,98
2	FEBRUARI	1.564.219.806	1,940,770,306	5,07
3	MARET	1.047.146.278	2.987.916.584	7,81
4	APRIL	5.976.336.952	8,964,253,536	25,79
5	MEI	2.441.318.502	11,405,572,038	32,81
6	JUNI	3.735.623.205	15,141,195,243	39,57
7	JULI	2.478.872.879	17,620,068,122	46,05
8	AGUSTUS	3.237.108.665	20,857,176,787	54,51
9	SEPTEMBER	3.040.448.403	23,897,625,190	62,46
10	OKTOBER	2.908.384.700	26,806,009,890	70,06
11	NOPEMBER	3.688.829.540	30,494,839,430	77,86
12	DESEMBER	8.644.767.082	39,139,606,512	99,78

Data Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tiap bulan mengalami kenaikan, pada bulan April dan Desember paling besar. Pada bulan April dikarenakan adanya pembayaran termin III kontrak jual beli BBM.

Sedangkan pada bulan Desember dikarenakan adanya pembayaran termin XI dan XII kontrak jual beli BBM, penggantian UP Belawan, pembayaran Tunkin, penihilan tambahan uang persediaan (TUP), pembayaran kontrak penyelesaian renovasi konstruksi Pos Pengawasan, Pematangan lahan halaman kantor, Pembangunan Pagar dan Pos Satpam.



Gbr 6. Perkembangan Realisasi Anggaran Per Bulan TA 2024

3.1.3 Kepegawaian

Sumber daya manusia yang ada di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai akhir tahun 2024 berjumlah 129 orang yang terdiri dari PNS (Ditjen PSDKP) berjumlah 59 orang, PNS (Dinas KP Kab./Kota) berjumlah 1 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 24 orang dan PPNPN/PJLP berjumlah 35 orang. Pegawai tersebut berada di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Tabel 12. Komposisi Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Pegawai Negeri Sipil	48	37,21
2	Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja	11	8,53
3	Pegawai Negeri Sipil Awak Kapal Pengawas	21	16,28
4	PPPK Awak Kapal Pengawas	13	10,08
5	Pegawai Negeri Sipil Perbantuan dari Dinas	1	0,78
6	PPNPN	9	6,98
7	PJLP	22	17,05
8	PJLP Awak Kapal Pengawas	4	3,10
Total		129	100

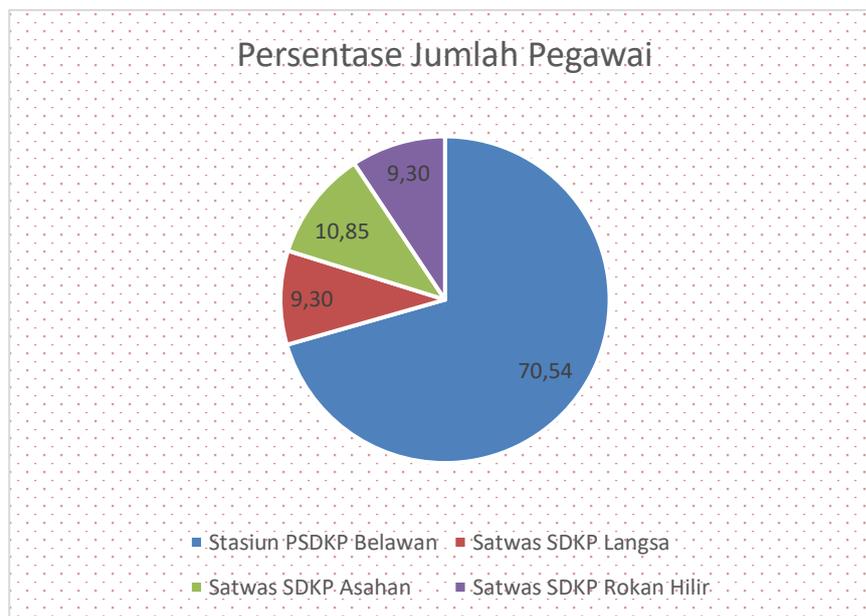
Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja berbeda-beda sesuai dengan banyaknya kegiatan pengawasan. Komposisi pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan di setiap unit kerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Satuan Pengawasan Tahun 2024

No	Unit kerja	Jumlah Pegawai (orang)						%
		PSDKP	Awak KP	PPPK	PPNPN +PJLP	Dinas	Total	
1	Stasiun PSDKP Belawan	28	21	20	22	-	91	70,54
2	Satwas SDKP Langsa	7	-	1	4	-	12	9,30
3	Satwas SDKP Asahan	5	-	3	5	1	14	10,85
4	Satwas SDKP Rokan Hilir	8	-	1	3	-	12	9,30
Total		48	21	25	34	1	129	100

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024



Gambar 7. Komposisi Pegawai yang tersebar di Satwas SDKP Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 93 pegawai dengan status kepegawaian yang berasal dari Ditjen Pengawasan SDKP pada lingkup kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tersebar di beberapa Satwas.

Tabel 14. Komposisi PNS Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2024

Golongan	Jumlah (Orang)					Total	%
	A	B	C	D	E		
Gol. IV	1					1	1,08
Gol. III	10	7	18	18		53	56,99
Gol. II	2	5	4	7		18	19,35
IX						9	9,68
VII						5	5,38
V						7	7,53
Total	13	12	22	25	-	93	100,00

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Tabel 14 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat golongan dimana untuk golongan II berjumlah 18 orang, dan golongan III berjumlah 53 orang. Dari data pegawai tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pegawai yang paling banyak di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah golongan III. Dengan demikian diharapkan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mampu menjadi unit yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.

Tingkat pendidikan pegawai yang bekerja di lingkup UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan didominasi oleh sarjana (S1) dan Diploma III (D-III), sementara Tenaga Kontrak/PPNPN didominasi SMU. Adapun komposisi pegawai dan Tenaga Kontrak/PPNPN Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan, dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Komposisi Pegawai PNS dan Tenaga Kontak/PPNPN Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)					
		PNS PSDKP	PPPK	PNS Dinas	Tenaga Kontak/PPNPN	Jumlah	(%)
1	S2	9				9	6,98
	S1	24	5	1	11	41	31,78
2	DIV	10	5	-	1	16	12,40
	DIII	12	6	-	2	20	15,50
3	SMU/ sederajat	14	8	-	21	43	33,30
<i>Total</i>		69	24	1	35	129	100

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Jumlah Pengawas Perikanan Tahun 2024 yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebanyak 54 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pengawasan SDKP dan pegawai daerah yang bertugas di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan. Dengan perbandingan 53 orang pengawas perikanan Ditjen Pengawasan SDKP, dan 1 orang pengawas perikanan baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota.

Dari data tersebut menggambarkan kondisi komposisi pegawai di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang sebagian berstatus pegawai daerah. Dengan adanya pegawai daerah yang dilibatkan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, maka diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing, akan tetapi pengawas perikanan dengan status pegawai daerah juga mengakibatkan kecenderungan pegawai daerah lebih mengedepankan pekerjaan yang diberikan instansi mereka masing-masing daripada menyelesaikan tugas pengawasan, oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan agar ada penambahan jumlah pegawai yang diangkat dari Pusat (Ditjen Pengawasan SDKP) agar kinerja seluruh Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meningkat.

Tahun 2024 kenaikan pangkat pegawai berubah dari 2 periode menjadi 4 periode. Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat pada periode Februari berjumlah 2 orang, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Februari 2024

No	N a m a	Pangkat Semula	Menjadi
1	Jefri Silalahi, S.Pi	Penata, III/c	Penata Tk. 1, III/d
2	Perkasa Sembiring, S.Pi	Penata Muda Tk.1 / III-b	Penata, III/c

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Sedang periode April ada 7 orang yang mendapatkan kenaikan pangkat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode April 2024

No	N a m a	Pangkat Semula	Menjadi
1	Zahra Rasyid, S.Pi, M.S.E	Penata Tk. 1, III/d	Pembina / IV a
2	Abul Hayyi Almufrudi, S.Pi	Penata Muda Tk.1 / III-b	Penata, III/c
3	Nurhidayanto	Penata Muda / III-a	Penata Muda Tk.1 / III-b
4	Safrudin, S.P	Penata Muda / III-a	Penata Muda Tk.1 / III-b
5	Budi Setiawan Pangaribuan	Pengatur Tk. 1 / II-d	Penata Muda / III-a

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Periode Juni tidak ada pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat.

Sedang periode Oktober ada 1 orang yang mendapatkan kenaikan pangkat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Oktober 2024

No	N a m a	Pangkat Semula	Menjadi
1	Bobby Nofriza Tambunan, S.St.Pi	Penata, III/c	Penata Tk. 1, III/d

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Periode Desember ada 1 orang yang mendapatkan kenaikan pangkat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Oktober 2024

No	N a m a	Pangkat Semula	Menjadi
1	Gustiya Dwi Laksono, A.Md	Pengatur / II-c	Pengatur Tk. 1 / II-d

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Selain itu sejak tanggal 5 Oktober 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024 terdapat pegawai yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Ketua Tim Kerja

No	N a m a	Jabatan	Ketua Tim Kerja
1	Edy Sutanto, S.Pi	Kepala Urusan Umum	Dukungan Manajerial
2	Adhi Kurniadi, S.St.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Prasarana, Sarana & Operasi Kapal Pengawas
3	Josia Suarta Sembiring, SH	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
4	Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
5	Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Penanganan Pelanggaran

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2024 mendapat tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 orang sebagai berikut :

Tabel 21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024

No	N a m a	TMT	Jabatan
1	Ira Gustiana, S.Pi	1 Maret 2024	Pengawas Perikanan Ahli Pertama
2	Alfian, A.Md	1 Maret 2024	Pengawas Perikanan Terampil
3	Sri Andoko	1 Maret 2024	Pengawas Perikanan Pemula
4	Yahya Thussalam	1 Maret 2024	Pengawas Perikanan Pemula

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai yang inpassing/perpindahan jabatan ke Jabatan Fungsional Tertentu, sebagai berikut :

Tabel 22. Pegawai yang inpassing/perpindahan ke JFT

No	N a m a	TMT	Jabatan
1	Arya Rocky Damanik, S.E	17 Mei 2024	Analisis Pengelola Keuangan Ahli Pertama
2	Muhammad Iqbal, S.Pi	17 Mei 2024	Pengawas Kelautan Ahli Muda
3	Muhammad Fahrul Riza, S.I.K	17 Mei 2024	Pengawas Kelautan Ahli Pertama
4	Dia Murthala, S.St.Pi	20 Desember 2024	Penata Perizinan Ahli Muda
5	Bobby Nofriza T, S.St.Pi	20 Desember 2024	Penata Perizinan Ahli Muda
6	M Hamdani, S.St.Pi	20 Desember 2024	Penata Perizinan Ahli Muda
7	Anwar Harahap, S.Sos	20 Desember 2024	Penata Perizinan Ahli Muda
8	Sila Sazali, S.Pi	20 Desember 2024	Penata Perizinan Ahli Muda
9	Edy Sutanto, S.Pi	30 Desember 2024	Pengawas Kelautan Ahli Muda
10	Yoga Kumajaya	30 Desember 2024	Asisten Pengawas Kelautan

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Sedangkan Pegawai lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang mendapatkan kenaikan gaji berkala berjumlah 35 orang, selengkapnya dalam lampiran 5.

Pada tahun 2024 pegawai yang melakukan mutasi masuk ke Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut :

1. Vina Indriani de Saiere, A.Md dari Pemkot Binjai ke Stasiun PSDKP Belawan (2 Januari 2024);
2. Alfian Rio Susanto, S.St.Pi dari KP Orca 02 Dit POA ke KP Hiu 01 (1 Agustus 2024);

3. Bahrudin, S.PKP dari KP Orca 02 Dit POA ke KP Hiu 08 (1 Agustus 2024);
4. Nurholis dari KP Hiu 06 Lan PSDKP Jakarta ke KP Hiu 01 (1 Agustus 2024);
5. Muhamad Iqbal dari KP Orca 03 Dit POA ke KP Hiu 01 (1 Agustus 2024);
6. Mashuri dari KP Paus 01 Dit POA ke KP Hiu 08 (1 Agustus 2024);
7. Neru Purnawan, A.Md, S.Tr.Pi dari KP Orca 04 Dit POA ke KP Hiu 16 (1 Agustus 2024);
8. Siswo Wijanarko, A.Md dari KP Hiu Macan 03 Sta PSDKP Kupang ke KP Hiu 16 (1 Agustus 2024);
9. Taufik Ismail dari KP Hiu Macan 01 ke KP Hiu 08 (1 Agustus 2024);
10. Riko Putra S, S.St.Pi dari Lan PSDKP Tual ke KP Hiu 08 (1 Desember 2024)

Sedangkan yang pindah dari Stasiun PSDKP Belawan per 1 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1. Nurhidayanto dari KP Hiu 01 ke KP Hiu 04 Stasiun PSDKP Cilacap
2. Deistiawan Farisi dari KP Hiu 08 ke KP Hiu 03 Pangkalan PSDKP Batam;
3. Yansen Hilarius Lagus dari KP Hiu 08 ke KP Hiu Macan 01 ke Sta PSDKP Pontianak;
4. Dedi Kurniawan Pohan, A.Md dari KP Hiu 08 ke KP Hiu Macan 01 Sta PSDKP Pontianak;
5. Sanggoro Nur Iman, S.St.Pi dari KP Hiu 16 ke KP Orca 05 Dit. POA;
6. Jabornok Situmorang, S.St.Pi dari KP Hiu 08 ke KP Paus 01 Dit. POA;
7. Jusman, A.Md.Pi dari KP Hiu 08 ke KP Orca 06 Dit. POA;
8. Deden Afriyos dari KP Hiu 16 ke KP Orca 02 Dit. POA;
9. Eka Surya Wijaya dari KP Hiu 16 ke KP Orca 05 Dit. POA;
10. Heru Arisandi dari KP Hiu 08 ke KP Orca 05 Dit. POA;
11. Safrudin,S.P dari KP Hiu 01 ke KP Hiu 17 Lan PSDKP Batam;
12. Hari Widodo, A.Md dari KP Hiu 01 ke KP Hiu Macan 05 Dit POA;

13. Arief Fuddin, A.Md dari KP Hiu 16 ke KP Hiu 06 Lan PSDKP Jakarta;
14. Rajib Ahmad, S.St.Pi dari KP Hiu 16 ke KP Orca 05 Dit POA;
15. Taufik Ikhsan, S.St.Pi dari KP Hiu 01 ke KP Hiu Macan 03 Sta PSDKP Kupang;
16. Sugeng Riyadi dari KP Hiu 01 ke KP Hiu Macan 03 Sta PSDKP Kupang;
17. Riza Darledy, A.Md dari KP Hiu 08 ke KP Hiu 11 Sta PSDKP Pontianak;

Dalam rangka menunjang kegiatan administrasi dan pengawasan Satwas dan Wilker PSDKP masih dibantu oleh PPNPN dan PJLP. Pada tahun 2024 tenaga kontak/PPNPN yang lulus PPPK sebanyak 9 orang (masuk data BKN) dan 15 orang pengangkatan dengan jasa lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Data Tenaga Kontrak/PPNPN 2024

No	No	Lolos PPPK 2024 (PPNPN)	Dengan PJLP
1	Belawan	5	8
2	Langsa	-	3
3	Asahan	3	2
4	Rokan Hilir	1	4
Jumlah		9	15

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan/pelatihan baik secara luring maupun daring. Pada tahun 2024 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan seperti pada tabel berikut :

Tabel 24. Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis Pegawai TA. 2024

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta yang hadir
1	Diklat Polsus PWP3K Kelas Khusus	5-23 25 Feb- 3 Mar	Daring Luring (SPN Brimob Cikeas	Ka Stasiun, Katimja Intelijen & Was SDP, Katimja SarPras & operasi KP, Nakhoda KP Hiu 08
2	Temu Teknis PPNS KP Tahun 2024	27 Feb- 1 Apr	Bogor	Tupa P Sitanggang, Denggan M Ilmi, Inggrika RE KAban
3	Pelatihan Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak	22-23 Apr	BDA Sukamandi	M Fahrul Riza (Polsus)
4	Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Ditjen PSDKP Tahun 2024	27-31 Mei	Cibinong, Bogor	Abdullah AH Nst Zahra Rasyid
5	Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengawas Perikanan Tahun 2024	3-7 Juni	Manado	Tupa P Sitanggang, Askari, Benardo N, Hendri H, Susanto M, Fauzi
6	Bimtek dan sosialisasi sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN)	5 Juni	KPKNL Medan	Anwar Harahap
7	Focus Group Discussion Peningkatan Kapasitas Bendahara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	11-12 Juni	Jakarta	Siti Safiera
8	Uji Kompetensi PBJP Level 1	13-14 Juni	BDA Sukamandi	Retno Adiarti
9	Diklat Polsus PWP3K Kelas Reguler	19 Juni - 25 Juli	Cikeas Bogor	Ach muttaqin, Yoga K, M Iqbal
10	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	20 Juni	Daring	Edy Sutanto
11	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi JIKN	20 Juni	Daring	Gian Ginanjar
12	Pelatihan HACCP	24-28 Juni	Hotel West Bogor	Fitri Zuliana
13	Peningkatan Kompetensi Penghitungan Valuasi Kerusakan Sumber Daya Kelautan kepada Pengawas Kelautan	24-26 Juni	Daring	M Fahrul Riza
14	Workshop Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Risiko Tahun 2024	25 s.d 27 Juni	Hotel Margo Depok	Edy Sutanto, Nur Baety A, Retno Adiarti
15	Pelatihan Dasar Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi PPPK Formasi TA 2022 dan TA 2023 Lingkup	25-30 Juni	Bumi Perkemahan Cibubur	Ira Gustiana, Alfian, Sri Andoko, Yahya Thussalam

	Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024			
16	Praktek lapang pengambilan data lapangan dalam rangka Simulasi Penghitungan Valuasi Kerusakan Sumber Daya Kelautan	30 Juni – 5 Juli	Kepulauan Seribu, Jakarta	M Fahrul Riza
17	Pelatihan Pemeliharaan dan Perawatan Engine Caterpillar	16-19 Juli	Cirebon	Bass Marthy Army T
18	Penyegaran Kemampuan Teknis Menembak Kepala UPT Lingkup Ditjen PSDKP KKP	23-26 Juli	PT Pindad Bandung	Ka Stasiun, Nakhoda KP Hiu 01, 08 dan 16
19	Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2024	25-26 Juli	GMB Jakarta	Chaidi Rindiawati
20	Bimbingan Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan	6-8 Agustus	Hotel Grand Keisha Yogyakarta	Zahra Rasyid M Fahrul Riza
21	Bimbingan Teknis Pencacahan Benih Bening Lobster (BBL) - Peserta	27-30 Agustus	Hotel salak Bogor	Sri kartaharja, Wahyuri Purnamasari
22	Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dengan tema “Penyidikan Cermat, Efektif, Profesional dan Terintegrasi (CEPAT), Sumber Daya Ikan (SDI) Lestari	17-20 Sept	Harris Hotel & Convention Cibinong	Askari, Dia Murthala
23	Pelatihan Penyidikan TPPU	17-20 Sept	Pekanbaru	Hendri Hamzah, Hartoto, Abul Hayyi Almufrodi
24	Peningkatan Kompetensi Implementasi Modul WasRisk dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	17-20 Sept	BPPP Tegal	Josia S Sembiring, Benardo Nababan, Nur Baety A, Zahra Rasyid
25	Pelatihan Penyidikan TPPU	23 Sept-3 Okt	Bogor	Denggan M Ilmi
26	Diklat Intelijen Was SDP Dan SDK	1-23 Okt	Bandung	Benardo Nababan, Zulkarnanin Nasution, M Fahrul Riza
27	Maritime Domain Awareness Intermediate and Advance Courses	14-25 Okt	Hotel Harris Batam	Inggrika RE Kaban & Perkasa Sembiring
28	Kegiatan Capacity Building Workshop on Quota-Based Fisheries Management	15-19 Okt	Australia	Ka Stasiun
29	Peningkatan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Sistem Informasi Geografi (SIG) bagi Polsus PWP3K	28 Okt-2 Nov	BDA Sukamandi	M Iqbal (B)

30	Pelatihan Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Yamaha	4-8 Nov	Denpasar	Achmad Muttaqin, Syahrul Pradana
31	Diklat Intelijen Was SDP Dan SDK bagi PPNS	10 Nov-10 Des	Bandung	Tupa P Sitanggang, Dia Murthala
32	Diklat Dasar JF Asisten Pengawas Perikanan	10-23 Nov	BDA Sukamandi	Kelvin Ramadhan, Desy Natalia, Chaidi Rindiawati
33	Temu Teknis Operasional Aplikasi Data Kelautan dan Perikanan	11-14 Nov	Jakarta	Halimah Thussaddiyah, Didit Aditya
34	Pelatihan Cat. Engine-Maintenance and Repair Management Strategy	20-22 Nov	Bandung	1. Alfian Rio Susanto, S.St.Pi (KKM KP Hiu 01) 2. Jensson, S.St.Pi (KKM KP Hiu 08)
35	Bimbingan Teknis (Bimtek) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	11-12 Des	Daring	Ka Stasiun, Kaur Umum, Tim Pelayanan Publik dan Perwakilan Pegawai Perikanan

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

3.1.4 Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan selama tahun 2024 khususnya yang mendukung peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya meliputi :

- a. Laporan penatausahaan. Laporan ini merupakan laporan dari petugas tata usaha yang meliputi persuratan dan absensi. Laporan ini dibuat setiap bulannya oleh petugas tata usaha. Sampai dengan bulan Desember telah dibuat 12 laporan tata usaha.
- b. Laporan keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang dibuat oleh bendahara dan dibuat setiap bulan. Sampai dengan bulan Desember Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah membuat 12 laporan keuangan.
- c. Laporan SIMAK BMN. Laporan SIMAK BMN dibuat oleh petugas SIMAK dan BMN. Laporan SIMAK BMN ini disusun setiap tri wulan. Sampai pada bulan Januari 2024 telah disusun Laporan SIMAK dan BMN Tri wulan I, II dan III tahun 2024.

- d. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Dokumen perencanaan dan penganggaran ini meliputi ROK (Rencana Operasional Kegiatan) dan dokumen RKAKL. Telah disusun ROK tahun 2024 pada bulan Januari 2024 dan RKAKL pada bulan Oktober 2024.
- e. Laporan Kegiatan Pengawasan SDKP. Laporan ini meliputi laporan tahunan dan laporan kinerja (LKj). Sampai bulan Januari 2024 kedua laporan tersebut (laporan tahunan dan LKj 2024) telah diselesaikan.
- f. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi IKM dalam rangka peningkatan kepuasan pelayanan publik di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada tanggal 5 September 2024 dengan peserta pelaku usaha. Dan telah disusun laporan SKM TW IV Stasiun Pengawasan SDKP dengan nilai IKM Pelayanan SLO 88,00 dan pelayanan LVHPI 91,32.

3.2 Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Operasi Armada

Program/kegiatan dalam rangka Peningkatan Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Operasi Armada mengacu pada rencana pengadaan yang terdapat pada RKKAL Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, dan pelaksanaan patroli kapal pengawas dan speed boat selama tahun 2024.

3.2.1 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

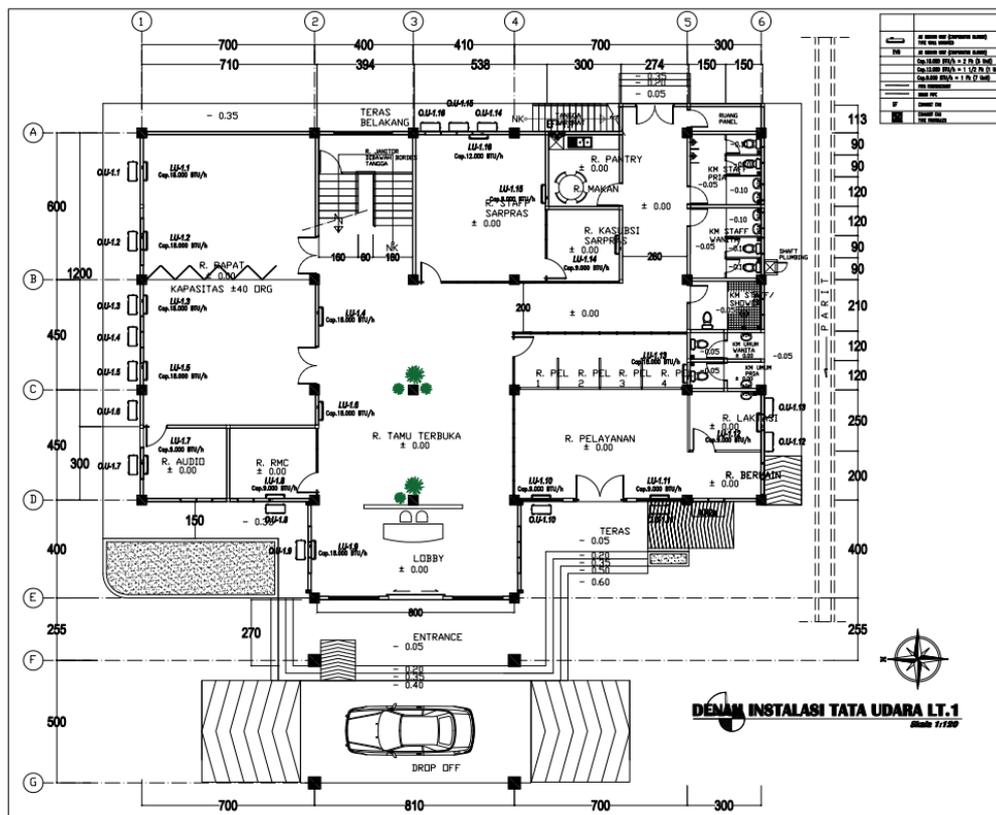
Kegiatan Perencanaan Penyelesaian Renovasi Konstruksi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dilakukan pembahasan pada Triwulan I 2024, dimana kegiatan pembangunan prasarana di Tahun 2024 terdiri atas penyelesaian renovasi konstruksi pos pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan pekerjaan Penimbunan, Perataan dan Pematangan Lahan Kantor Stasiun PSDKP Belawan.

Pembahasan perencanaan kegiatan Pembangunan prasarana tersebut melibatkan konsultan perencana, tenaga ahli, Inspektorat

Jenderal KKP (Itjen KKP), Bagian Prasarana Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP (Dit. POA).

Penandatanganan kontrak pekerjaan penyelesaian renovasi konstruksi dilaksanakan pada tanggal 02 September 2024 antara Stasiun PSDKP Belawan dan CV. Mandiri Ridho Konstruksi dengan nilai kontrak awal sebesar Rp. 2.221.122.236,19 dan rencana lama pekerjaan 120 hari kalender sehingga nantinya serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024. Pekerjaan ini diawasi juga oleh konsultan pengawas yaitu CV. Balakosa Konsultan.

Sesuai dengan gambar pekerjaan luasan bangunan lantai 1 sebesar 650 m² sementara lantai dua sebesar 475 m² sehingga total luasan gedung yang dilakukan renovasi sebesar 1.125 m². Pekerjaan renovasi konstruksi ini juga sempat mengalami kendala progress pembangunan melambat dikarenakan cuaca dan kedatangan material namun hal tersebut dapat segera diatasi dengan sistem kerja lembur dan pararel.



Gambar 8. Denah Lantai 1



Gambar 9. Progress Minggu ke 6



Gambar 10. Progress Minggu ke 8

Ruang lingkup pekerjaan penyelesaian renovasi konstruksi ini merupakan pekerjaan dalam hal finishing baik pada bagian eksterior maupun interior yang meliputi pekerjaan pemasangan ACP (*aluminium composite panel*), pengecatan dinding, pemasangan reling tangga, penyambungan dan pemasangan instalasi listrik, pemasangan kaca, pemasangan keramik, pembuatan saluran air dan kamar mandi serta pemasangan plafon PVC.

Untuk Diketahui bahwa dalam pekerjaan ini terdapat tiga kali Adendum kontrak yang pertama Adendum untuk mengakomodir beberapa pekerjaan tambah kurang dan terdapat item pekerjaan yang

diganti dari kontrak awal karena alasan harga dan ketersediaan bahan material. Adendum kedua terkait perubahan nomor rekening penyedia/kontraktor dan Adendum ketiga terkait penambahan nilai kontrak karena terdapat penambahan pekerjaan.

Sebelum dilaksanakan adendum khususnya terkait perubahan mengenai tambah kurang pekerjaan serta perubahan spek dan penambahan pekerjaan telah tertuang dalam justifikasi teknis sebagai dasar Adendum. Setelah dilaksanakan progress pekerjaan selama 120 hari kalender dengan pembagian minggu pekerjaan sebanyak 18 minggu kegiatan penyelesaian renovasi konstruksi pos pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dapat terselesaikan.



Gambar 11. Progress akhir pekerjaan renovasi konstruksi pos pengawasan

Kegiatan selanjutnya yaitu pekerjaan penimbunan, perataan dan pematangan lahan kantor Stasiun PSDKP Belawan dimana sebelum dilaksanakan mobilisasi material tanah timbun, kontraktor bersama PPK dan konsultan perencana melakukan peninjauan lapangan bersama guna memperoleh dan menyepakati kondisi MC-0 (mutual check nol) di lapangan yang artinya kegiatan penghitungan ulang volume pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan volume yang sesuai dengan kondisi lapangan hal ini dilakukan agar menghindari kelebihan atau kekurangan volume pekerjaan yang hasilnya dituangkan kedalam laporan MC-0.



Gambar 12. Kegiatan Mutual Check Nol (MC-0) secara bersama

Pada pekerjaan penimbunan, perataan dan pematangan lahan Kantor Stasiun PSDKP Belawan kontrak untuk awal pekerjaan ditandatangani pada tanggal 10 September 2024 dengan rencana masa

pekerjaan 90 hari kalender dan nilai kontrak awal sebesar Rp. 469.201.709,53. Penandatanganan kontrak antara Stasiun PSDKP Belawan dengan PT. Sihombing Jaya Perkasa, ruang lingkup pekerjaan diantaranya penimbunan lahan, perataan tanah timbunan dan pematangan tanah timbunan, pemasangan paving blok, pembuatan saluran drainase serta pengujian kepadatan tanah timbunan menggunakan metode *Sandcone*, pengujian kadar air optimal pada kepadatan tanah timbunan dengan menggunakan metode proctor test yang dilakukan di lab Universitas Sumatera Utara dan pengujian kualitas beton paving blok yaitu K-225.

Untuk Luasan lahan yang dilakukan pemasangan paving blok sebesar 1.039,51 m² sementara luasan timbunan tanah 824,34 m³. Kegiatan pekerjaan ini turut diawasi oleh konsultan pengawas yaitu CV. Gedanke. Sementara pekerjaan pembuatan drainase (parit) dilakukan hingga mencapai 190 m dengan posisi bangunan drainase mengelilingi kantor Stasiun PSDKP Belawan.



Gambar 13. Material tanah timbun dan batu kali dan perataan material tanah timbun



Gambar 14. Pengujian Kepadatan Tanah Timbunan



Gambar 15. Kegiatan survey Lokasi penyedia Paving Blok dan Mobilisasi Material

Selain kegiatan penyelesaian renovasi konstruksi dan penimbunan lahan tersebut juga terdapat pekerjaan renovasi pagar Pos Pengawasan SDKP, renovasi Pos Jaga Pos Pengawasan SDKP, renovasi garasi dan pengaman gedung administrasi Perkara Pos Pengawasan SDKP, pembangunan lapangan badminton.

Beberapa pekerjaan tersebut dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan masa pekerjaan untuk renovasi pos jaga dan renovasi pagar masing-masing 60 hari kalender sementara renovasi garasi masa pekerjaan 30 hari kalender. Pekerjaan renovasi pos jaga dimulai dari tanggal 22 Oktober s.d 20 Desember 2024 sementara renovasi pagar mulai tanggal 21 Oktober s.d 19 Desember 2024.



Gambar 16. Kondisi renovasi pos jaga sebelum dan sesudah





Gambar 17. Pagar kantor sebelum renovasi, saat progress renovasi dan sesudah renovasi pagar

Kegiatan renovasi juga dilakukan pada garasi mobil serta pintu gudang arsip. Kegiatan renovasi tersebut meliputi pekerjaan pembongkaran bangunan garasi eksisting, peninggian lantai garasi disesuaikan dengan ketinggian lantai paving blok halaman gedung kantor Stasiun PSDKP Belawan, lalu pekerjaan pengelasan rangka atap baja garasi, pengecatan dan pemasangan kembali atap garasi.



Gambar 18. Progress renovasi garasi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan

Kegiatan renovasi konstruksi pos pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan penimbunan, perataan serta pematangan lahan Kantor juga mendapatkan perhatian dari kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekologi Sumber Daya Laut, Bapak Indra Yusran Siry pada tanggal 24 Oktober 2024 . Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Plt. Kepala Stasiun BP2MHKP Medan II, Kepala BP3 Medan, Kaur Umum Stasiun PSDKP Belawan serta Project Manager CV Mandiri Ridho Konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan Penyelesaian Renovasi Konstruksi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan Direktur PT. Sihombing Jaya Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan Penimbunan, Perataan dan Pematangan Lahan Kantor Stasiun PSDKP Belawan.



Gambar 19. Kunjungan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan

Pada tanggal 05 Desember 2024 Stasiun PSDKP Belawan mendapat kunjungan dari Dirjen PSDKP Bapak Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. beserta jajaran eselon 2 Ditjen PSDKP guna meninjau progress pekerjaan penyelesaian renovasi konstruksi pos pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan Penimbunan, Perataan dan Pematangan Lahan Kantor Stasiun PSDKP Belawan. Pada kesempatan tersebut turut hadir Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan yaitu Bapak Drs Halid K. Jusuf, MPA beserta jajaran staf Ditjen PSDKP.



Gambar 20. Kunjungan Dirjen PSDKP beserta Jajaran Staf Ditjen PSDKP

Selama progress pekerjaan penyelesaian renovasi konstruksi pos pengawasan Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi pekerjaan finishing interior maupun eksterior serta pekerjaan penimbunan hingga pemasangan paving blok perkembangan pekerjaannya dilaporkan secara mingguan oleh konsultan pengawas melalui grup whatsapp sehingga dapat terpantau oleh bagian prasarana Ditjen PSDKP.

Tahapan pembayaran penyedia atau kontraktor pada pekerjaan tersebut diantaranya pembayaran uang muka, pembayaran termin I dengan progress pekerjaan 50% serta termin II dimana progress pekerjaan telah mencapai 100% setelah penyedia menyerahkan kewajibannya berupa realisasi fisik 100% dan jaminan pemeliharaan.

Sebelum dilakukan pembayaran termin I dan II Stasiun PSDKP Belawan mengundang Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Pengendalian Operasi Armada untuk melaksanakan perhitungan bersama dilapangan dalam rangka memastikan kemajuan progress pekerjaan sesuai dengan laporan konsultan pengawas. Kegiatan pemeriksaan bersama meliputi pemeriksaan kesesuaian item pekerjaan, volume pekerjaan, spesifikasi bahan, estetika hasil pekerjaan serta ketepatan waktu pekerjaan.

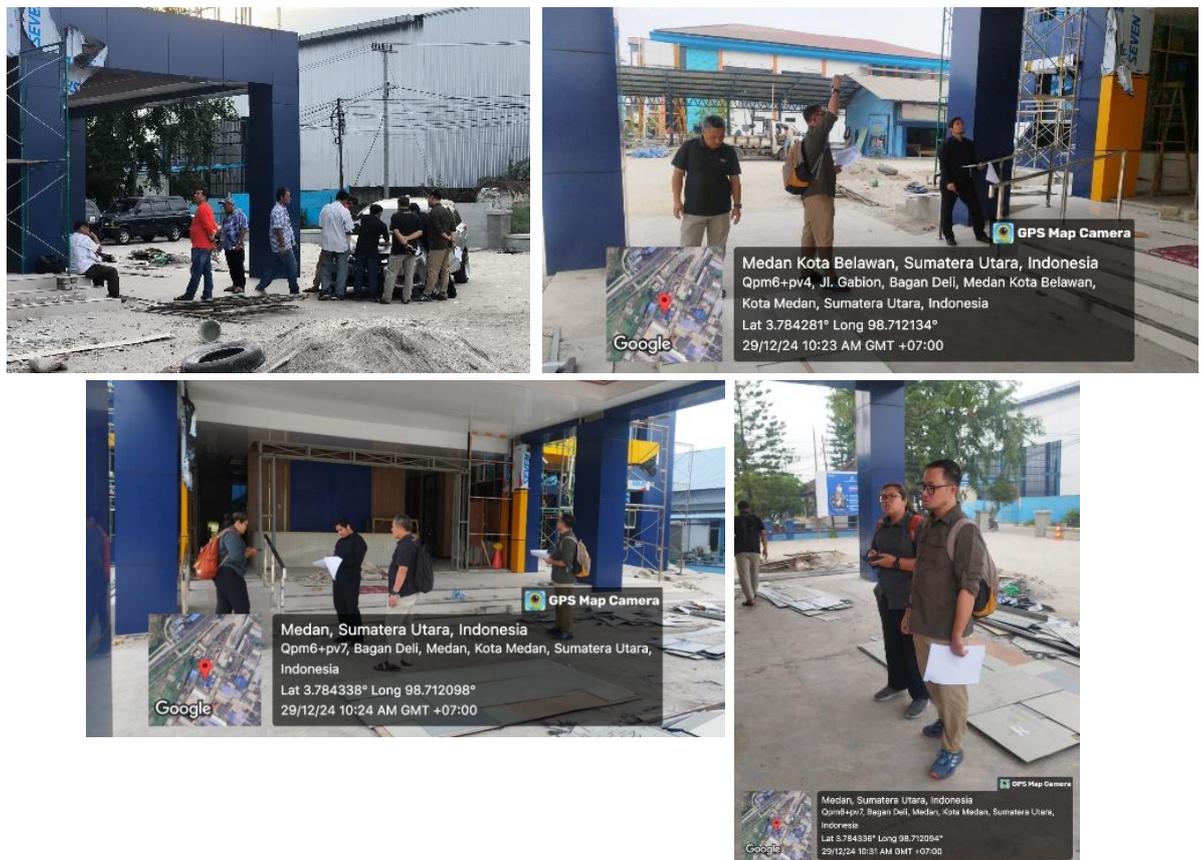
Tanggal 20 s.d 21 November 2024 telah dilaksanakan pendampingan serta pengukuran bersama untuk progress pekerjaan 50% yang dihadiri oleh Direktur PT. Sihombing Jaya Perkasa, Project Manager CV. Mandiri Ridho Konstruksi, Konsultan Pengawas masing-masing pekerjaan, PPK Stasiun PSDKP Belawan beserta tim Auditor Itjen KKP serta Katimja Prasarana dari Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Sebelum dilaksanakan pemeriksaan bersama dilaksanakan rapat pendahuluan guna membahas kendala dilapangan, capaian progress pada minggu berjalan serta komitmen penyedia dalam memberikan yang terbaik kepada user sesuai dengan RAB pada kontrak yang telah disepakati di awal. Apabila terdapat perubahan maka dapat dibahas kembali lalu hasil rapat dituangkan kedalam dokumen CCO (change contract order) yang nantinya dijadikan addendum kontrak disertai dengan justifikasi teknis.



Gambar 21. Pemeriksaan bersama dilapangan terkait progress pekerjaan

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan kembali saat penyedia mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan sebagai syarat pembayaran termin II sehingga pada tanggal 29 Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan bersama untuk kemajuan pekerjaan 100%. Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Kontraktor, PPK serta Konsultan Pengawas.



Gambar 22. Kegiatan Pemeriksaan Bersama Perwakilan dari Direktorat POA Ditjen PSDKP

Dalam rangka mewujudkan prasarana yang baik dan memadai maka diperlukan anggaran yang cukup selain itu dalam pemanfaatan anggaran tersebut juga harus maksimal dan banyak manfaat lebih untuk mendukung kegiatan operasional kantor Stasiun PSDKP Belawan.

Salah satu kegiatan pemanfaatan sisa anggaran dari pekerjaan penyelesaian renovasi konstruksi dan penimbunan selain untuk renovasi pos jaga, renovasi pagar dan renovasi garasi, maka dilakukan perbaikan prasarana yang mendukung operasional Stasiun PSDKP Belawan khususnya untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang sehat dan profesional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan profesional tersebut maka Stasiun PSDKP Belawan menyediakan dukungan prasarana berupa lapangan Badminton dengan ukuran Panjang 15 meter dan lebar 8 meter.



Gambar 23. Progres Pekerjaan Pembangunan Lapangan Badminton

3.2.2. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Boat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan SDKP dan penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah teritorial dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI 571, 572 dan 711) telah dilaksanakan patroli pengawasan dengan menggunakan kapal pengawas type speedboat yang berada di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu sebagai berikut :

Tabel 25. Kapal Pengawas di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

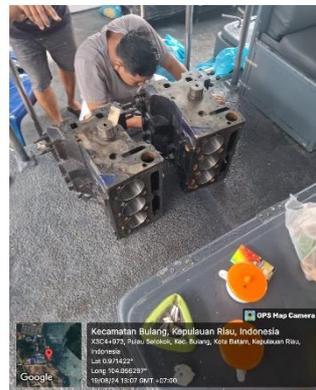
No	UPT/Satker	Tipe Kapal Pengawas	Kondisi
1	Stasiun PSDKP Belawan	Hiu 01	Baik
		Hiu 08	Baik
		Hiu 16	Baik
		Napoleon 028	Baik
2	Satuan PSDKP Asahan	Dolphin 014	Baik (Siap Terbatas)

Data Kapal Pengawas Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2024

Pada tahun 2024 kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dihadapkan pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan serta Penangkapan Ikan secara Terukur serta penindakan kapal-kapal ikan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan atau kegiatan perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia sehingga hal ini menuntut keberadaan sarana pengawasan berupa Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawas yang selalu siap beroperasi.

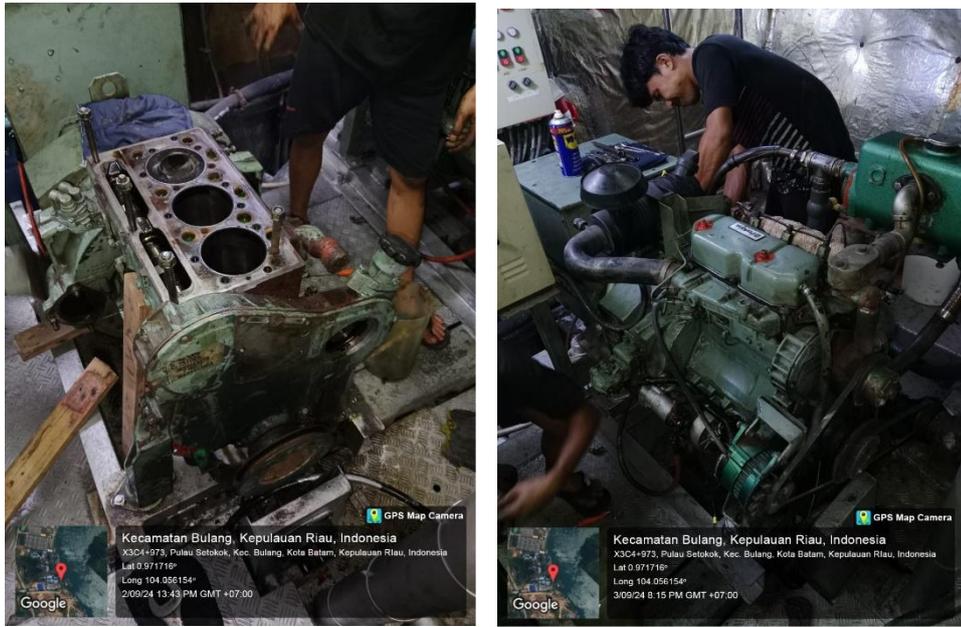
Sarana Pengawasan tersebut agar selalu dalam kondisi siap beroperasi maka perlu dilaksanakan perawatan yang pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan perawatan untuk kapal pengawas maupun speedboat diantaranya :

- 1) General Overhaul Auxiliary Engine KP Hiu 01 dan KP. Hiu 08
- 2) Docking KP Hiu 01 dan KP. Hiu 08 yang dilaksanakan di galangan PT. Seloko Batam Shipyard
- 3) Servis Alat Keselamatan, KP. Hiu 01, KP Hiu 08 dan KP Hiu 16.
- 4) Perawatan berupa Pengecatan dan perbaikan kursi Speedboat Pengawas Napoleon 028 dan Docking Speedboat Pengawas Dolphin 014.



Gambar 24. Pekerjaan General Overhaul KP. Hiu 01





Gambar 25. Galeri pekerjaan General Overhaul Auxiliary Engine KP. Hiu 08



Gambar 26. Galeri Pekerjaan Docking Kapal Pengawas KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08

Untuk diketahui bahwa dalam pekerjaan Docking Kapal Pengawas KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08 juga dilaksanakan pendampingan serta pemeriksaan hasil pekerjaan secara bersama yaitu melibatkan Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) disamping itu PPK Stasiun PSDKP Belawan turut mendampingi bersama Nakhoda KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08 dan Manager Operasional PT. Seloko Batam Shipyard.

Hasil dari pemeriksaan bersama bahwa terdapat beberapa item dan volume pekerjaan yang masih belum sesuai dengan kontrak pekerjaan sehingga diperlukan adanya pembahasan bersama guna dilakukan CCO yang nantinya dituangkan kedalam Adendum kontrak.



Gambar 27. Pemeriksaan Progres Pekerjaan dan pendampingan oleh Itjen KKP

Dalam kegiatan pengoperasian kapal pengawas tentu diperlukan perlengkapan keselamatan berupa tabung pemadam kebakaran, smoke signal, red handflare dan kondisi sekoci penyelamat (liferaft) yang harus diperbarui setiap tahun demi menjaga keselamatan Awak Kapal Pengawas. Kebetulan pada tahun 2024 masing-masing kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu KP. Hiu 01, KP. Hiu 08 dan KP. Hiu 16 mendapatkan kesempatan untuk memperbarui alat keselamatannya mengingat kondisi anggaran yang berbeda2 setiap tahunnya sehingga terkadang hanya bisa mengakomodir 2 kapal saja.

Alat keselamatan merupakan komponen yang paling penting saat berlayar dalam hal ini Kapal Pengawas melaksanakan kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dituntut dapat melaksanakan kegiatan patroli terhadap kapal-kapal perikanan di perairan Selat Malaka atau wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571.



Gambar 28. Servis alat keselamatan pada masing-masing kapal pengawas

Docking merupakan kegiatan perawatan pencegahan kerusakan pada sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa kapal atau speedboat. Sehingga perlakuan kegiatan docking bukan hanya pada kapal pengawas saja melainkan terhadap Speedboat Pengawas.

Kegiatan Docking pada speedboat sendiri biasanya meliputi pengecatan, pendempulan bagian atau badan kapal yang sudah tipis atau bahkan sudah keropos sehingga potensi berlubang yang dapat membahayakan personel. Selain itu kegiatan pada docking meliputi

perbaikan reling, karet kaca, penggantian karpet, penggantian propeller, penggantian wiper kaca, penggantian lampu-lampu, perbaikan instalasi Listrik di speedboat/kapal juga perbaikan saluran pembuangan air atau penambahan/penggantian tenda di buritan. Penggantian atap plafon speedboat perbaikan kemudi, perbaikan kursi-kursi juga perbaikan kamar mandi. Item pekerjaan tersebut memang tidak semua dilakukan setiap tahunnya mengingat keterbatasan anggaran serta pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien serta tepat guna.

Terdapat dua unit Speedboat Pengawas pada Stasiun PSDKP Belawan yaitu :

- a. Speedboat Pengawas Napoleon 028 dengan Panjang 28 meter dan mesin dalam (Inboard Engine) dengan penempatan di Stasiun PSDKP Belawan.
- b. Speedboat Pengawas Dolphin 014 dengan Panjang 8 meter dan menggunakan mesin luar (outboard engine) dengan Lokasi penempatan di Satuan Pengawasan SDKP Asahan.

Tahun 2024 Speedboat Pengawas Dolphin 014 mendapatkan anggaran untuk dilakukan perawatan berupa Docking. Kegiatan Docking pada Speedboat Pengawas Dolphin 014 meliputi Pengecatan Luar, Pengecatan Dalam, Perbaikan Tutup Mesin dan Atap Kanopi, Penggantian pelapis dinding dan Plafon. Kegiatan docking dilaksanakan selama lima hari kalender.





Gambar 29. Kegiatan Docking Speedboat Pengawas Dolphin 014

Realisasi operasional kapal pengawas yang berada di bawah Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024 hingga Oktober 2024 dengan total 120 hari operasi dan pada akhir November 2024 Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan anggaran tambahan untuk BBM Kapal Pengawas sebesar Rp. 654.037.000,- sehingga terjadi penambahan 15 hari operasi Kapal Pengawas. Sehingga akhir Desember 2024 total hari operasi mencapai total 135 hari operasi dengan rincian KP. Hiu 01 sebanyak 45 hari, KP Hiu 08 sebanyak 45 hari dan KP Hiu 16 sebanyak 45 hari, sementara untuk realisasi operasional speedboat pengawasan di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024 sebanyak 30 hari untuk masing-masing speedboat pengawas yaitu Napoleon 028 Belawan dan Dolphin 014 Asahan.

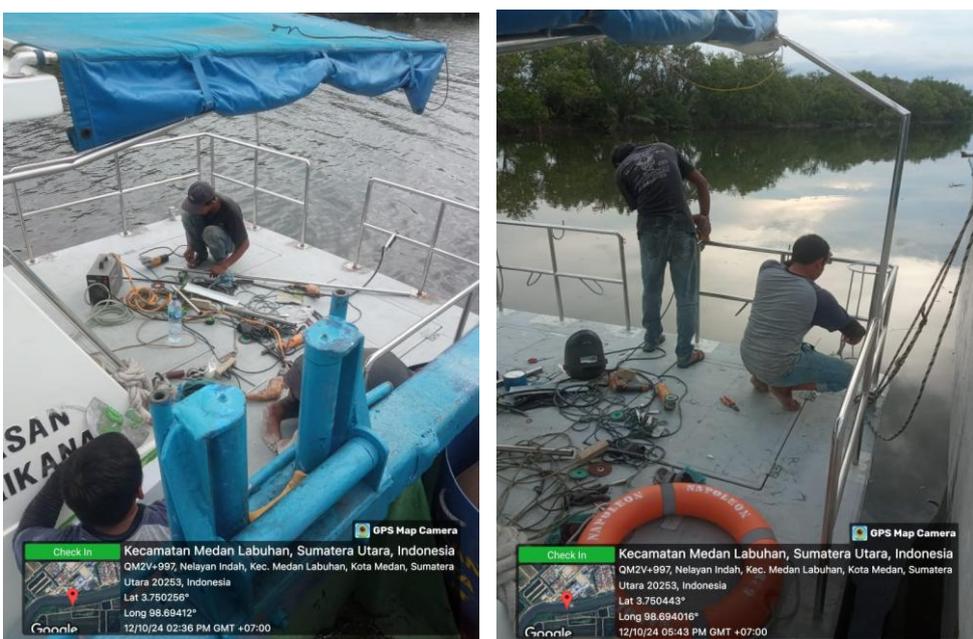
Kegiatan perawatan Speedboat Pengawas Napoleon 028 pada tahun 2024 berupa pengecatan dinding luar bagian atas kapal, perbaikan plafon, penggantian karpet selain itu terdapat perbaikan jok kursi serta perbaikan reling buritan.



Gambar 30. Hasil pengecatan, perbaikan plafon dan perbaikan kursi



Gambar 31. Progress pekerjaan perbaikan reling Speedboat Napoleon 028



Berikut jumlah kapal perikanan yang telah diperiksa oleh kapal pengawas perikanan di lingkup kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu :

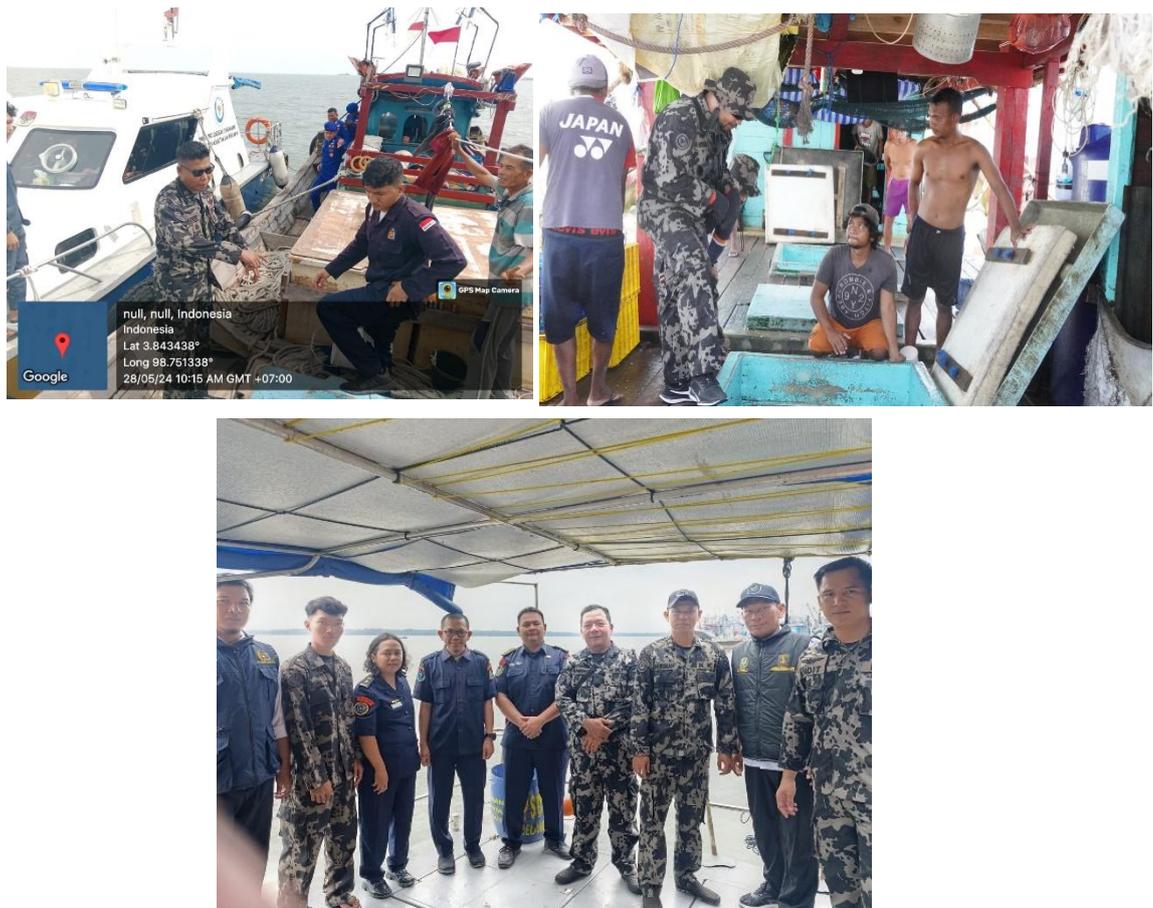
Tabel 26. Kapal Perikanan yang telah Diperiksa oleh Kapal Pengawas Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024

NO	UPT / Satker	Jumlah Kapal Yang Diperiksa	Dokumen		Ket
			Lengkap	Tidak Lengkap	
1	Stasiun PSDKP Belawan				
	a. Kapal Pengawas	422	393	29	
	b. Speed Boat	55	43	12	
2	Satwas PSDKP Asahan	55	55	0	
Total		520	491	41	

Data Kapal Pengawas Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2024

Hingga periode bulan Desember 2024 terdapat 3 kapal pengawas yang berpatroli, dari 520 kapal perikanan yang diperiksa, terdapat 491 kapal perikanan memiliki dokumen yang lengkap dan sisanya 41 kapal tidak memiliki dokumen yang lengkap sehingga 3 kapal KIA di lanjutkan ke tingkat penyidikan.





Gambar 32. Dokumentasi Pemeriksaan Kapal di Laut (Patroli SpeedBoat Napoleon 028)

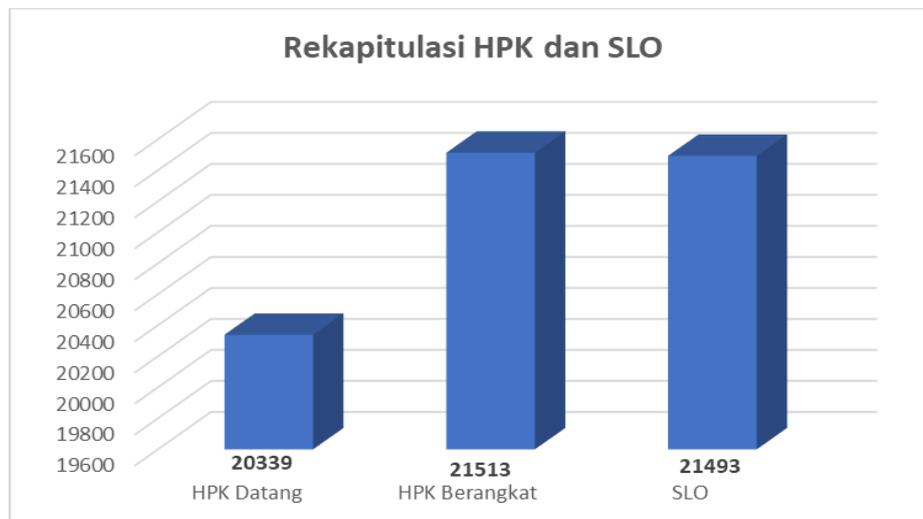
3.3 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

3.3.1 Pengawasan Kapal Perikanan

Pengawasan penangkapan ikan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut hasil perikanan, yang dilakukan dengan cara pemeriksaan pada saat kedatangan kapal dan keberangkatan kapal.

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik dan dokumen kapal yang dituangkan pada form HPK A (Kedatangan), HPK B (Keberangkatan), apabila sesuai dengan persyaratan maka diterbitkan SLO (Surat Laik Operasional).

Gambar 33. Rekapitulasi HPK di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024



Data rekapitulasi HPK di setiap Satwas lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Rekapitulasi HPK lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	TOTAL		
		HPK		SLO
		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	5.457	5.786	5.786
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)	167	258	258
3	Kabupaten Bengkalis	320	326	326
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	55	56	56
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)	292	294	294
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai	261	270	270
7	Satwas PSDKP Langsa	771	771	771
8	Kabupaten Aceh Timur	2.639	2.904	2.904
9	Kota Lhokseumawe	1.890	1.895	1.893
10	Kabupaten Bireuen	787	787	787
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)	939	939	939
12	Kabupaten Pidie	644	738	738
13	Kabupaten Pidie Jaya	0	0	0
14	Satwas PSDKP Asahan	6.117	6.489	6.471
15	Kabupaten Batu Bara	0	0	0
JUMLAH		20.339	21.513	21.493

Data SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas yang dihitung secara berulang dalam tahun 2024 dapat diketahui bahwa kapal yang melaporkan kedatangannya berjumlah 20.339 kapal. Kapal yang melaporkan keberangkatannya sebanyak 21.513 kapal yaitu lebih banyak dibandingkan jumlah Surat Laik Operasi (SLO) yang keluar dikarenakan ada beberapa kapal yang telah dilakukan pemeriksaan akan tetapi tidak laik operasi.

Sedangkan jumlah unit kapal perikanan yang taat dalam melakukan operasi perikanan pada tahun 2024 lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu dengan melakukan serangkaian proses permohonan pemeriksaan melalui HPK Keberangkatan dan SLO adalah sebanyak 1.680 kapal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27. Kapal perikanan laik operasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	Jumlah Kapal
1	Stasiun PSDKP Belawan	448
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)	22
3	Kabupaten Bengkalis	12
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	1
5	Kabupaten Rokan Hilir (Panipahan)	69
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai	13
7	Satwas PSDKP Langsa	24
8	Kabupaten Aceh Timur	213
9	Kota Lhokseumawe	78
10	Kabupaten Bireuen	32
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)	24
12	Kabupaten Pidie	15
13	Kabupaten Pidie Jaya	0
14	Satwas PSDKP Asahan	623
15	Kabupaten Batu Bara	7
JUMLAH		1.581

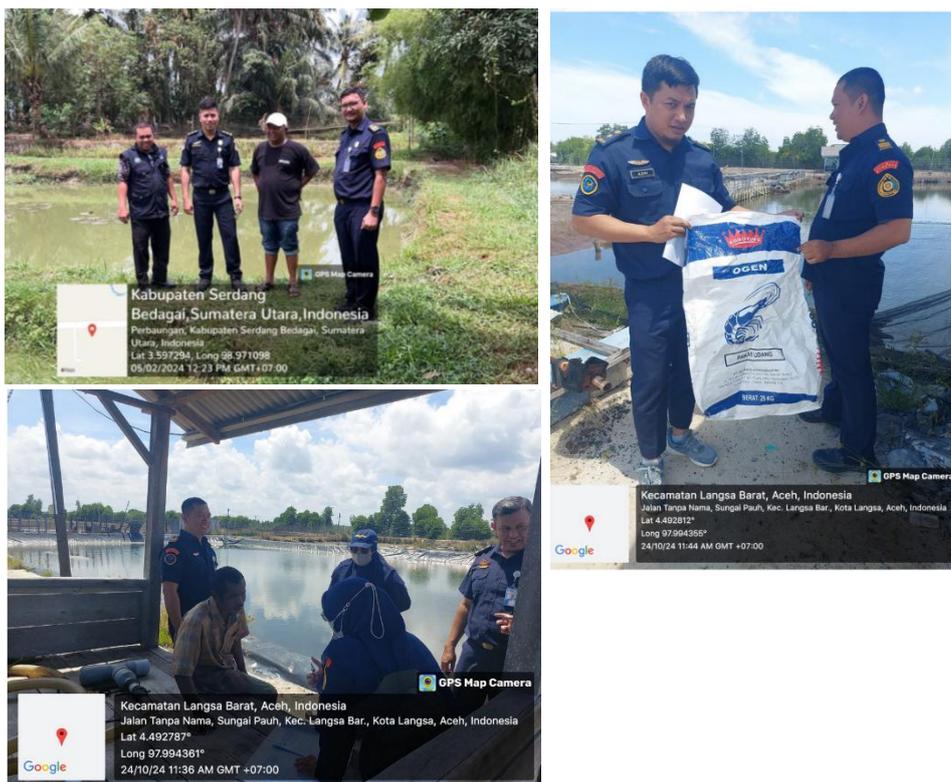
Data SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024



Gbr. 34 Dokumentasi Pengawasan Kapal Perikanan Oleh Pengawas Perikanan

3.3.2 Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pada umumnya kegiatan pengawasan budidaya perikanan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu pemeriksaan jenis kegiatan usaha, sarana produksi dan dokumen perizinan.



Gbr. 35 Dokumentasi Pengawasan Unit Usaha Budidaya Oleh Pengawas Perikanan

UPT serta Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan pengawasan usaha budidaya perikanan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Unit usaha budidaya yang diawasi Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

No	UPT/Satker	Jumlah yang diawasi (Unit)	Jumlah yang memiliki NIB (Unit)
1	Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	20	20
2	Satuan Pengawasan SDKP Langsa	8	7
3	Satuan Pengawasan SDKP Asahan	1	1
4	Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir	11	11
5	Wilker Pengawasan SDKP Lhokseumawe	2	1
6	Wilker IDI	1	1
7	Wilker Pengawasan SDKP Dumai	5	5
Total		48	46

Data Pengawasan SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

Unit usaha budidaya perikanan yang telah diawasi sebanyak 48 unit. Dari 48 unit tersebut yang telah mempunyai NIB berjumlah 46 unit usaha, sedangkan 2 unit usaha yang lain tidak memiliki NIB.

Pada tahun 2024 pengawasan unit usaha budidaya ikan berdasarkan pendekatan perizinan berbasis resiko (*risk based licensing approach*, RBA), hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan Dan Perikanan dimana pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan berdasarkan petunjuk teknis Direktur Jenderal PSDKP, Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan dengan memeriksa beberapa kategori yaitu:

- a. Risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil)
 - 1) Keberadaan laporan kegiatan usaha (LKU);
 - 2) Keberadaan pernyataan mandiri (*self declare*) pemenuhan cara budidaya ikan yang baik.
- b. Risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar)
 - 1) Keberadaan laporan kegiatan usaha (LKU);
 - 2) Keberadaan sertifikat cara budidaya ikan yang baik dan/atau cara pembenihan ikan yang baik.

3.3.3 Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan

Kegiatan pengawasan pelaku usaha subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2014 tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 06 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Kegiatan pengawasan pelaku usaha subsektor Pengangkutan Dan Pemasaran Ikan pada tahun 2024 di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur mengenai teknis pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.



Gbr. 36. Dokumentasi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Oleh Pengawas Perikanan

Kegiatan pengawasan pelaku usaha subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan pada tahun 2024 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan lingkup Satwas SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah

mengawasi 21 pelaku usaha distribusi hasil perikanan, dalam hal ini yaitu pelaku impor dan ekspor ikan. Dari 21 pelaku usaha yang telah dilakukan pemeriksaan, ditemukan satu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran distribusi ketidaksesuaian peruntukkan impor ikan yaitu PT Lautan Persada. Rekapitulasi pelaku usaha yang sudah diawasi disajikan secara lengkap dalam lampiran laporan.

3.3.4 Verifikasi Unit Pengolahan Ikan

Verifikasi unit pengolahan ikan dilakukan dengan melakukan pengawasan pada ketertiban dokumen-dokumen di perusahaan pengolahan ikan. Verifikasi unit pengolahan ikan yang telah dilaksanakan oleh lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi UPI skala besar dan UPI skala kecil.

Tahun 2024 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan lingkup Satwas SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah mengawasi 17 pelaku usaha. Dari 17 pelaku usaha yang telah diperiksa, 15 pelaku usaha telah memiliki kelengkapan perijinan berusaha, sedangkan 2 pelaku usaha yaitu PT Fuda Sari Laut dan PT Golden Seafood Indonesia diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi atas pelanggaran tidak memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Rekapitulasi pelaku usaha yang sudah diawasi disajikan secara lengkap dalam lampiran laporan.



Gbr. 37. Dokumentasi Pengawasan Unit Pengolahan Ikan Oleh Pengawas Perikanan

3.4 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dilakukan berdasar Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Revisi Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; Undang-Undang 01 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan adalah :

- a. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi dilakukan di 5 (lima) lokasi yaitu :
 - 1) PT. Dahlia Mekar Lestari (DML), di Desa Wonosari tengah, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau.
 - 2) PT. Alam Biru Indonusa, Jl. Ladang, Gang Perjuangan No.42 B, Kel Kedai Durian Kec. Medan Johor, Kota Medan.
 - 3) Pengawasan jenis ikan yang dilindungi terbatas (Terubuk/*Tenualosa ilisha*) di Sungai Barumon, Kabupaten Labuhan Batu.
 - 4) Pengawasan Ikan Terubuk yang dilindungi terbatas di sepanjang zona larangan penangkapan terubuk (*Tenualosa macrura*) di Perairan Selat Lalang hingga Selat Bengkalis, Provinsi Riau.
 - 5) Pengawasan Jenis Ikan yang dilindungi milik Bapak Fery Irawan (perorangan) di Gampong Sungai Pauh Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa dan Pengawasan Jenis Ikan Yang dilindungi milik Bapak Muhammad Rizky (Perorangan) di Dusun Tgk. Muda Leube Gp. Paya Bieng Kec. Jangka Kabupaten Bireun Prov. Aceh.

b. Pengawasan Ruang Laut dilaksanakan terhadap 25 (dua puluh lima) pelaku usaha yaitu :

- 1) PT. Kawasan Industri Dumai (KID) di Jl. Pulau Sumatera No.1 Kawasan Industri Dumai, Desa/Kelurahan Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau.
- 2) EUP EMP Gebang di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- 3) PT. Pertamina Patra Niaga FT Krueng Raya di Desa Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
- 4) PT Adhitya Serayakorita di Kota Dumai Provinsi Riau,
- 5) PT. PLN UP3 Binjai di Kelurahan Desa Pulau Sembilan, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Dan seterusnya, selengkapnya dalam lampiran 8.

c. Pengawasan pencemaran perairan dilaksanakan di 31 (Tiga Puluh Satu) Unit Pengolahan Ikan dan Unit Budidaya Perikanan (UPI) dan (UBP) yaitu :

- 1) PT. Medan Tropical Canning Industries and Frozen di Jl. KL. Yos Sudarso KM. 10.5, Kota Medan.
- 2) PT. Suryawindu Pertiwi di Dusun Barat Gampong Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
- 3) PT. Aquafarm Nusantara di Jl. Mess Pemda No 30. Desa Perdamean. Kec, Ajibrata, Kab, Toba Prov, Sumatera Utara.
- 4) PT. Fuda Sari Laut di M. Yakub Lubis Dusun III, Desa/Kelurahan Bandar Khalipah, kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- 5) PT. Seafood Sumatera Perkasa di Jl. Titi Pahlawan No. 38 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Dan seterusnya, selengkapnya dalam lampiran 8.

- d. Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan di 7 (Tujuh) lokasi yaitu :
- 1) PT. Anugerah Nelayan Andalan di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.
 - 2) R.M Pondok DangDangna di Desa Lancok Pantai Lancok Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara.
 - 3) PT. Musim Mas berada di Jl. K.L. Yos Sudarso KM. 7,8, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia, Kec.Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
 - 4) PT. Intibenua Perkasatama berada di Spring Tower 02-21 Jl. K.L. Yos Sudarso, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
 - 5) A.N Mansur berada di Desa Matang Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur.
 - 6) A.n Muhammad Khairullah Ikhsan berada di Wisata Alam Datuk, Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara.
 - 7) PT. Intibenua Perkasatama berada di Jalan Raya Lubuk Gaung, Desa/Kelurahan Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.
- e. Pengawasan Destructive Fishing (DF) di 26 Pelaku Usaha yaitu A.n Bustalami, A.n Mistar, A.n Aidi, A.n Nurdin, A.n Agung Saputra, A.n Hasni, A.n Arbain, A.n Saini, A.n Imran, A.n Harahap, A.n Junaidi, A.n Rahmat, A.n Abd Gofar di Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. A.n Amin Rahul, A.n Abdullah Samad, A.n Benni, A.n Syafe'I, A.n Azizul Fahmi, A.n Hasroni, A.n Aluwi, A.n Baizar, A.n Kamarudin, A.n Kamarudin, A.n Salamuddin, A.n Mukhtar di Selat Air Hitam dan Sungai Suir

Kabupaten Kepulauan Meranti dan A.n Karya Efendi di Sungai Indragiri, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau.

Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi



Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut





Pengawasan Jasa Kelautan (Wisata Bahari)



Pengawasan Pencemaran Perairan



Pengawasan Destructive Fishing (DF)





Gbr 38. Dokumentasi Pengawasan Pengelolaan SDK

3.5 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan

Selama Tahun 2024 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melakukan proses penyidikan terhadap 5 (lima) kasus kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan. Kapal tersebut merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Malaysia. Rekapitulasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Penyidikan yang Dilakukan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

No.	Nama Kapal	Nama Tersangka	Kebangsaan Kapal	Kewarganegaraan tersangka	Tanggal Tertangkap	Perkembangan Perkara
1	KM KF 5032 GT 63,47	Myo Myin Tun alias Ko Cho	Malaysia	Myanmar	2 Maret 2024	Inkracht
2	KM. SLFA 5178 GT. 64,77	JEPRI SETIAWAN	Malaysia	Indonesia	2 Mei 2024	Inkracht
3	KM PKFB 960 GT 49,80	Zaw Zowl	Malaysia	Myanmar	30 November 2024	Persidangan
4	KM PKFB 1913 GT 68,56	Khin Mg Thwe	Malaysia	Myanmar	30 November 2024	Persidangan
5	KM PKFB 1916 GT 69,07	Yin Htwe	Malaysia	Myanmar	30 November 2024	Persidangan

1. KM KF 5032 GT 63,47



2. KM. SLFA 5178 GT. 64,77



3. KM PKFB 960 GT 49,80



4. KM PKFB 1913 GT 68,56



5. KM PKFB 1916 GT 69,07



Gbr 39. Dokumentasi Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) adalah melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat penangkap ikan terlarang Trawl di Perairan Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia. Dengan Pasal Sangkaan: Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1), Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN

4.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, permasalahan yang dihadapi oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Permasalahan terkait kewenangan pengawasan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berisiko dimana pembagian kewenangan pengawasan berdasarkan skala usahanya. Kewenangan pemerintah daerah lebih kepada skala usaha mikro, kecil, dan menengah besar;
2. Dalam pengawasan kapal perikanan, para pelaku usaha penangkapan ikan masih enggan memigrasikan izinnya ke perizinan pusat untuk melakukan pembelian dan pemasangan Sistem Pemantauan Kapal perikanan (SPKP) pada kapal mereka dikarenakan harga pembelian dan airtime yang dianggap cukup tinggi padahal sudah diberikan relaksasi sampai dengan 31 Desember 2024;
3. Tidak tersedianya tempat pendaratan ikan yang tersentral di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan sehingga pendaratan ikan di PPS Belawan langsung dilakukan di tenan – tenan swasta yang menyulitkan pengawas dalam melakukan pengawasan pendaratan ikan;

4. Dalam pengawasan UPI, terdapat UPI skala kecil yang belum memiliki NIB karena kurangnya sosialisasi dari dinas/stakeholder terkait;
5. Dalam pengawasan distribusi, masih ditemukan ikan impor yang tidak sesuai peruntukkan dikarenakan adanya permintaan pasar pada saat hasil tangkapan nelayan kurang, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat;
6. Dalam pengawasan Budidaya skala kecil, masih yang ada pembudidaya kecil yang belum memiliki perizinan yang sah (NIB, CPIB dan CBIB) dan kurangnya sosialisasi dari dinas/stakeholder terkait hal tersebut.

B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jumlah Polsus PWP3K masih terbatas di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dan terdapat 8 orang Polsus yang belum memperoleh penetapan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP sebagai dasar melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan;
2. Pemanfaatan pasir laut di sekitar pulau Rupert Provinsi Riau, tetapi wilayah Pulau Rupert tidak termasuk dalam 7 lokasi prioritas pengelolaan sedimentasi laut sesuai dengan Kepmen KP Nomor 208 Tahun 2023 tentang lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2024 tentang dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
3. Pemanfaatan ruang laut eksisting oleh Pelindo Regional I di Sumatera Utara dan Riau belum memiliki KKPRL;
4. Pemanfaatan Ruang laut berupa dermaga, anjungan minyak lepas pantai, pipa bawah laut dan asset lainnya milik K/L serta BUMN yang sulit diperoleh informasinya apakah izin pemanfaatan atau izin lokasi masih berlaku atau tidak;

5. Update permohonan, progress dan/atau data pelaku usaha yang telah mengajukan atau memiliki PKKPR, yang belum dapat diakses oleh POLSUS PWP3K selaku pengawas ruang laut;
6. Kurangnya wawasan pelaku usaha perihal tata ruang darat dan laut;
7. Masih adanya pipa pengambilan air laut oleh pelaku usaha budidaya ikan (hatchery) yang belum memiliki izin KKPRL.

C. Penanganan Pelanggaran

1. Stasiun PSDKP Belawan belum memiliki dermaga sebagai tempat tambat barang bukti TPP berupa kapal. Hal ini membuat penyidik terpaksa harus menitipkan kapal tersebut pada gudang atau tangkahan swasta di wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;
2. Banyak awak kapal asing, baik Nakhoda dan ABK yang tidak memiliki identitas resmi dari negara asalnya, sehingga terkadang penyidik merasa kesulitan menentukan identitas awak kapal saat akan dijadikan tersangka ataupun saksi karena identitasnya hanya berdasarkan pengakuan semata tanpa bukti yang otentik.
3. Sulitnya mencari juru bahasa asing yang memiliki sertifikat.

D. Operasional Kapal Pengawas

1. Kondisi speedboat ukuran 8 meter (SP. Dolphin 014) tidak memungkinkan melaksanakan pengawasan ke area yang lebih luas/jauh;
2. Dua Satwas (Satuan Pengawasan) SDKP belum memiliki speed boat untuk mendukung pengawasan kapal perikanan di laut;
3. Belum adanya sarana garasi speed boat untuk penyimpanan dan perawatan sehingga speedboat rentan mengalami sabotase pihak luar dan alasan keamanan lainnya menyangkut operasional kapal yang harus siap setiap saat.

4. Belum adanya dermaga khusus untuk tempat kapal pengawas ataupun speed boat Sandar.
5. Belum terakomodirnya listrik darat untuk Kapal Pengawas Hiu 16 yang sandar di Gudang Arang, Belawan.

E. Pembangunan kantor

Pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan Penimbunan, Perataan, dan Pematangan Lahan Stasiun PSDKP Belawan telah selesai 100% pada tahun 2024, yang mengakibatkan ruangan RMC dan Ruang Gudang / Arsip menjadi rendah terendam saat pasang/hujan. Diperlukan anggaran untuk peninggian ruang RMC Stasiun PSDKP Belawan, Ruang Gudang / Arsip di tahun 2025.

F. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengawasan SDKP

1. Kurangnya SDM bagian Jabatan Fungsional Umum sehingga tugas Jabatan Fungsional Umum masih dikerjakan oleh Jabatan Fungsional Tertentu (Pengawas Perikanan), khususnya di bidang keuangan dan pelaporan.
2. Seringnya rotasi Awak Kapal Pengawas sehingga Bendahara gaji harus menerbitkan SKPP pada waktu ada perpindahan AKP ke Unit kerja lain.
3. Perpindahan AKP, masuknya CPNS dan PPPK baru mengakibatkan belanja pegawai kurang sebelum akhir tahun anggaran, sehingga perlu pengusulan tambahan gaji ke Bagian Program PSDKP.

4.2 Strategi Pemecahan

Proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan harus dicarikan strategi pemecahannya agar kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat menjadi instansi yang lebih baik. Untuk itu disusun langkah-langkah dalam penyusunan strategi pemecahan sebagai berikut :

A. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Terkait pembagian wewenang pengawasan Stasiun PSDKP Belawan sudah mempunyai Perjanjian Kerja Sama dengan Provinsi Aceh, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara namun pelaksanaannya belum optimal dikarenakan kurangnya tenaga Pengawas Perikanan di Dinas Provinsi;
2. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pemilik kapal perikanan untuk melakukan pembelian dan pemasangan Sistem Pemantauan Kapal perikanan (SPKP) pada kapal mereka;
3. Berkoordinasi dengan PPS Belawan agar dapat mengupayakan tempat pendaratan ikan yang tersentral di PPS Belawan.
4. Melakukan sosialisasi pada waktu kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha budidaya ikan, UPI dan distribusi hasil perikanan agar mengurus dokumen perizinan yang sah (NIB, CPIB dan CBIB) serta mendistribusikan ikan impor sesuai peruntukannya.

B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Menyurati Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP dan berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan SDK terkait penetapan Polsus di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan sebagai dasar melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
2. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan SDK dan Kantor Induk Pelindo Regional 1 Belawan, untuk mendiskusikan progress perizinan pemanfaatan ruang laut eksisting oleh Pelindo Regional I;

3. Berkooordinasi dengan SKK Migas Regional Sumatera Bagian Utara terkait informasi perizinan usaha migas lepas Pantai di wilayah Regional Sumatera Bagian Utara;
4. Menyurati Direktur Pengawasan SDK perihal update perizinan PKKPR di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan;
5. Melakukan pengumpulan data dan pengawasan pipa pengambilan air laut oleh pelaku usaha budidaya ikan(*hatchery*) yang belum memiliki izin KKPRL.

C. Penanganan Pelanggaran

1. Pengusulan pengadaan lahan dan pembangunan dermaga untuk penyimpanan barang bukti kapal tangkapan;
2. Berkooordinasi dengan kantor Imigrasi Belawan terkait adanya juru bahasa asing yang memiliki sertifikat;

D. Operasional Kapal Pengawas

1. Mengusulkan ke Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk melakukan penghapusan terhadap Dolphin 014;
2. Mengusulkan ke Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk dapat dianggarkan pengadaan speed boat 12 meter dan perbaikan mesin Napoleon 028;
3. Mencari lahan dan mengajukannya ke Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk dapat dibuatkan dermaga kapal pengawas di Belawan dan Dumai;
4. Melakukan pengajuan Pembangunan Listrik darat secara bersurat di Dermaga BPPP Medan untuk mengakomodir kebutuhan Listrik Kapal Pengawas KP. Hiu 16;
5. Mengusulkan ke Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk dapat menambah anggaran terkait Suku Cadang Kapal Pengawas, Speedboat Pengawas maupun Docking Kapal Pengawas. Hal ini

mengingat besaran biaya docking maupun suku cadang setiap tahunnya mengalami perubahan kenaikan harga;

6. Terkait dukungan sarana berupa penambahan speedboat pengawas dapat diusulkan setelah dermaga untuk sandar atau garasi speedboat telah dibangun terlebih dahulu.

E. Pembangunan kantor

Mengusulkan ke Dirjen PSDKP tambahan anggaran untuk merenovasi Ruang RMC dan Ruang Gudang / Arsip di tahun 2025.

F. Dukungan Manajemen

1. Pengusulan formasi Jabatan Fungsional Umum terutama keuangan sesuai dengan Analisa Beban Kerja ke Bagian Kepegawaian PSDKP;
2. Pengusulan ke kepegawain PSDKP dan Dit POA, agar gaji AKP diurus oleh Dit POA sehingga kalau ada perpindahan AKP tidak perlu menerbitkan SKPP.
3. Memastikan ke Dit POA dan Bagian Kepegawaian PSDKP apabila ada tambahan CPNS maupun PPPK baru sehingga anggaran belanja pegawai tersebut sudah diperhitungkan pada saat finalisasi RKAKL.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran tahun 2024 dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 39.223.972.000,- dapat terserap sebesar Rp. 39.139.606.512,- atau 99,78 %.
2. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melaksanakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dengan melakukan kegiatan yang bersifat eksternal dengan baik dan berkesinambungan.
3. Pencapaian kinerja dan kegiatan pada Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sudah memenuhi target.
4. Dalam peningkatan operasional pengawasan Sumber Daya Perikanan telah dilaksanakan pengawasan terhadap kelaikan operasional kapal perikanan 1.581 unit, pengawasan usaha budidaya perikanan sebanyak 48 unit, pengawasan distribusi ikan terhadap 21 unit, verifikasi UPI sebanyak 17 unit.
5. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mendukung pemerintah dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

5.2 Saran

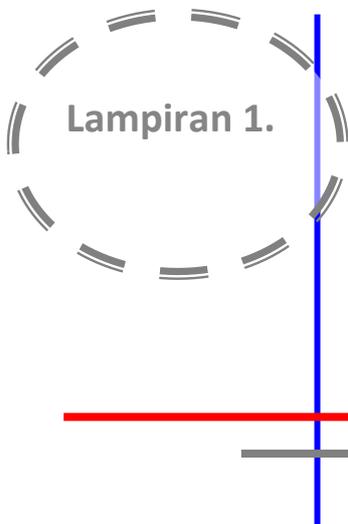
A dapun saran untuk pengembangan kelembagaan dan peningkatan kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu sebagai berikut :

1. UPT lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD);
2. Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP dapat melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai kinerja di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan Satwas/Wilker dibawahnya sebagai acuan untuk melakukan perbaikan sehingga dapat menjadi instansi yang baik;
3. Perlunya melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaku usaha budidaya perikanan dan pelaku usaha pengolahan ikan/distribusi hasil perikanan.

BAB VI

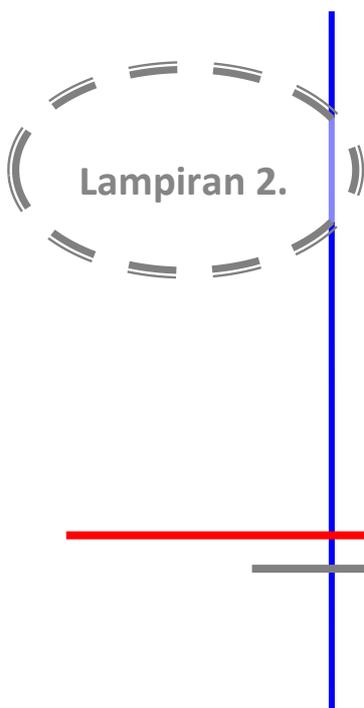
PENUTUP

Laporan tahunan tahun 2024 ini merupakan sebuah pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang sudah berjalan. Dengan diselesaikannya laporan ini diharapkan menjadi sebuah penilaian bagi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan agar dalam proses pelaksanaan program/kegiatan di kemudian hari dapat menjadi lebih baik. Kami menerima saran dan kritik yang membangun agar Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menjadi Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan misi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.



Lampiran 1.

**Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP
Belawan Tahun 2024**



Lampiran 2.

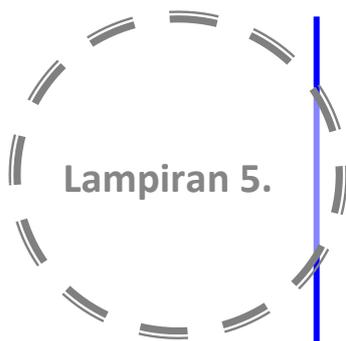
**Persuratan Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Tahun 2024**



**Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP
Belawan Tahun Anggaran 2024**



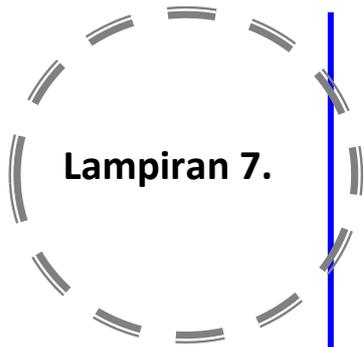
**Daftar Nama Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan
SDKP Belawan tahun 2024**



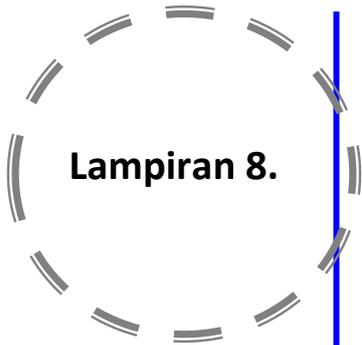
Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2024



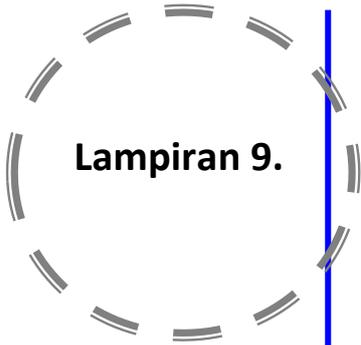
**Daftar Nama PPNS Lingkup Stasiun Pengawasan
SDKP Belawan tahun 2024**



Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024



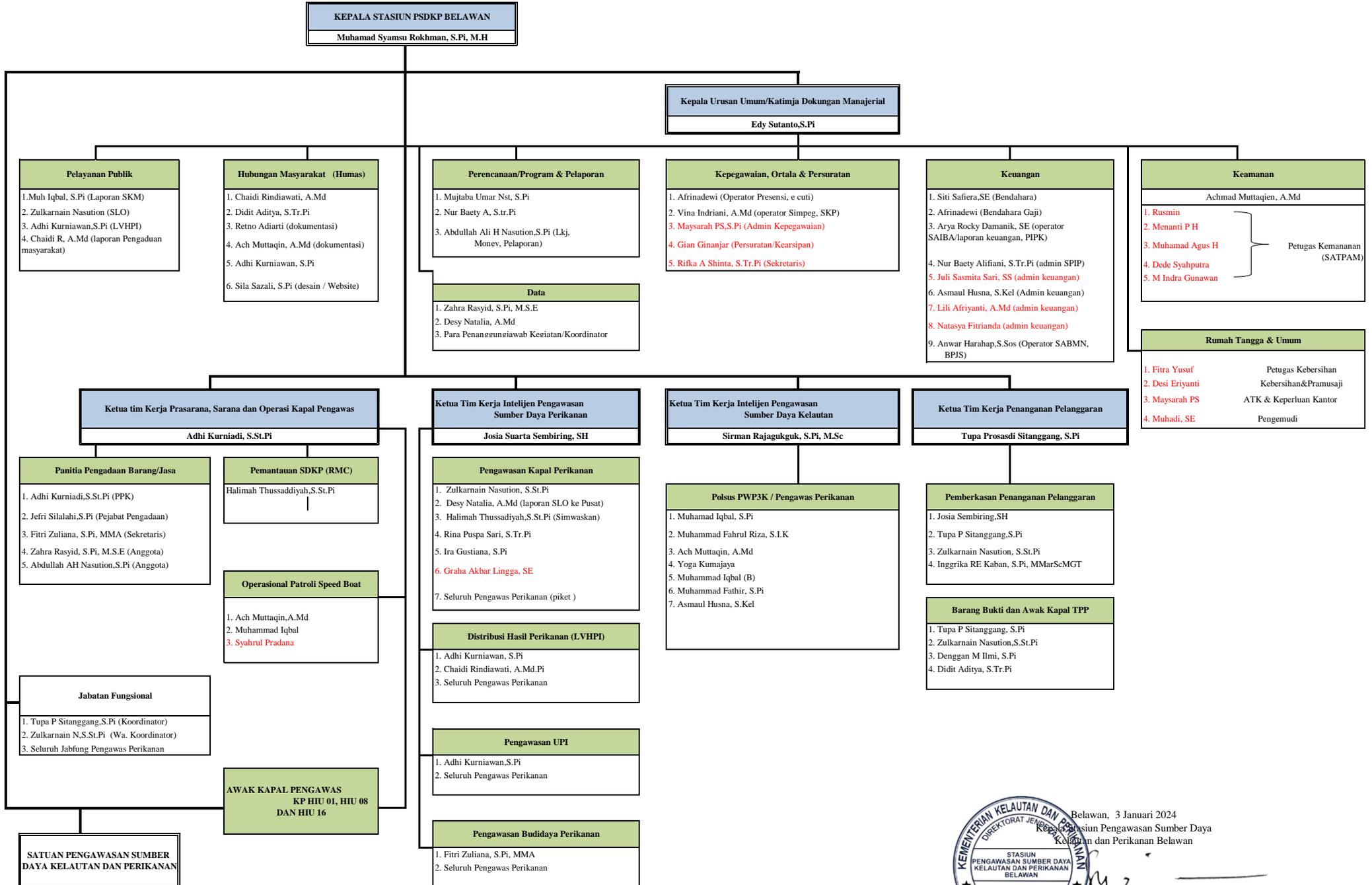
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024



Rekap Kapal yang diperiksa Tahun 2024

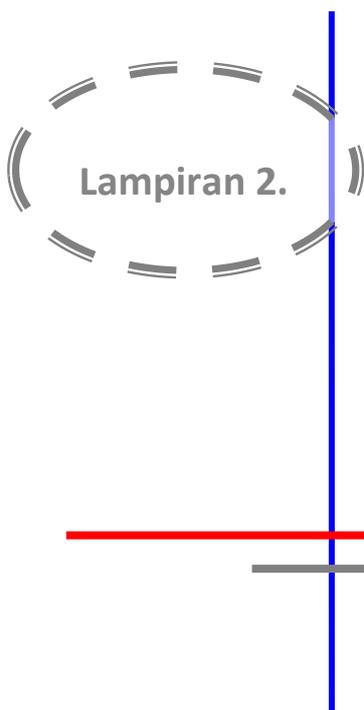


STRUKTOR ORGANISASI STASIUN PSDKP BELAWAN TAHUN 2024_PER 2 JANUARI 2024



Belawan, 3 Januari 2024
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Belawan

Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
 19830730 200801 1 003



Lampiran 2.

**Persuratan Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Tahun 2024**

Lamp. 2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

No	UNIT KERJA		PERSURATAN											Jml	
			Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov		Des
1	Stasiun PSDKP Belawan	Surat Masuk	109	92	115	79	106	103	127	109	108	94	129	128	1299
		Surat Keluar	418	202	257	167	238	208	308	287	302	258	215	229	3089
		SPT	74	85	91	54	83	80	107	94	88	106	87	57	1006
		SK	30	1	6	6	5	2	3	3	2	1	-	18	77
2	Satuan Pengawasan SDKP Asahan	Surat Masuk	2	3	2	-	2	2	2	5	2	1	1	2	24
		Surat Keluar	11	10	13	3	24	19	15	12	17	14	14	6	158
3	Satuan Pengawasan SDKP Langsa	Surat Masuk	2	2	3	6	6	-	-	-	5	-	3	6	33
		Surat Keluar	5	4	6	10	7	4	7	3	10	15	2	7	80
4	Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir	Surat Masuk	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		Surat Keluar	2	1	11	2	3	4	2	3	9	10	8	1	56



**Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP
Belawan Tahun Anggaran 2024**

Lampiran 3. Komposisi Pegawai Stasiun PSDKP Belawan T.A 2024

No	Unit kerja	Jumlah Pegawai (orang)									%
		Pegawai/Pengawas Perikanan					Awak Kapal Pengawas			Total	
		PNS	PPPK	PPNPN	PJLP	Dinas	PNS	PPPK	PJLP		
1	Stasiun PSDKP Belawan	28	7	5	13	-	21	13	4	91	70,54
2	Satwas SDKP Langsa	7	1		4	-				12	9,30
3	Satwas SDKP Asahan	5	3	3	2	1				14	10,85
4	Satwas SDKP Rokan Hilir	8		1	3	-				12	9,30
Total		48	11	9	22	1	21	13	4	129	100,00



**Daftar Nama Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan
SDKP Belawan tahun 2024**



Lampiran 4. Daftar Nama Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024

1. STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
1	Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H	19830730 200801 1 003	Penata Tk.I / III-d	Kepala	PNS	S-2
2	Adhi Kurniadi, S.St.Pi	19860712 200901 1 003	Penata Tk.I / III-d	Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas / Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	D-IV
3	Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc	19820626 200912 1 002	Penata Tk. I / III-d	Ketua Tim Kerja Intenjen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan / Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
4	Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi	19790217 200912 1 001	Penata Tk.I / III-d	Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
5	Edy Sutanto, S.Pi	19761222 200912 1 001	Penata Tk.I/ III-d	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial / Kepala Urusan Umum	PNS	S-1
6	Josia Suarta Sembiring, S.H, M.H	19860603 200912 1 001	Penata / III-c	Ketua Tim Kerja Intenjen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan / Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	S-2
7	Zahra Rasyid, S.Pi, M.S.E	19860523 200804 2 001	Pembina / IV-a	Analisis Pengawasan SDKP	PNS	S-2
8	Zulkarnain Nasution, S.St.Pi	19861021 201012 1 003	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	D-IV
9	Adhi Kurniawan, S.Pi	19870403 201012 1 004	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
10	Inggrika R.E.K, S.Pi, MMarScMgt	19870714 201012 2 002	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
11	Fitri Zuliana, S.Pi, MMA	19820724 200912 2 002	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
12	Indraprastha C.T, S.Pi	19850917 201012 1 001	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda (TUBEL)	PNS	S-1
13	Denggan Muhammad Ilmi, S.Pi, M.H	19840401200912 1 002	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
14	Jefri Silalahi, S.Pi	19760122 200912 1 001	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
15	Anwar Harahap, S.Sos	19840807 201503 1 001	Penata / III-c	Analisis Pelayanan	PNS	S-1
16	Mujtaba Umar Nasution, SE	19870922 201503 1 001	Penata / III-c	Analisis Perencanaan	PNS	S-1
17	Arya Rocky A Damanik, SE	19820921 201503 1 001	Penata / III-c	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	PNS	S-1
18	Abul Hayyi Almufrodi, S.Pi	19881204 201503 1 002	Penata / III-c	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	S-1
19	Halimah Thussaddiyah, S.St.Pi	19870126 201503 2 003	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	D-IV
20	Siti Safiera, SE, M.Si	19870731 201012 2 005	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengelola Keuangan APBN Mahir	PNS	S-2
21	Vina Indriani De Saire, A.Md	19890202 201101 2 009	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengolah Data	PNS	D-3
22	Abdullah Ali Hakim Nasution, S.Pi	19870902 201902 1 003	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	S-1
23	Nur Baety Alifiani, S.Tr.Pi	19960921 202203 2 001	Penata Muda, III/a	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	D-IV
24	Afrinadewi	19920402 201012 2 001	Pengatur Tk.I / II-d	Pengelola Keuangan	PNS	SUPM
25	Desy Natalia, A.Md	19911229 201902 2 007	Pengatur Tk.I / II-d	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	PNS	D-3
26	Achmad Muttaqin, A.Md	19870326 201902 1 005	Pengatur Tk.I / II-d	Operator Speed Boat	PNS	D-3
27	Chaidi Rindiawati, A.Md.Pi	19990724 202203 2 002	Pengatur / II-c	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	PNS	D-3
28	Muhammad Iqbal	19991117 202203 1 001	Pengatur Muda / II-a	Operator Speed Boat	PNS	SUPM
29	Asmaul Husna, S. Kel	19921025 202321 2 038	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	S-1
30	Didit Aditya, S.Tr.Pi	19920616 202321 1 023	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	D-IV
31	Retno Adiarti, S.Kel	19910822 202321 2 046	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	S-1
32	Rina Puspa Sari, S.Tr.Pi	19910923 202321 2 042	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	D-IV

33	Muhammad Fathir, S.Pi	19931102 202321 1 017	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	S-1
34	Ira Gustiana, S.Pi	19860802 202421 2 006	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	S-1
35	Alfian, A.Md, Pel	19791123 202421 1 001	VII	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	PPPK	D-3
36	Yahya Thussalam	19861030 202421 1 002	V	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	PPPK	SUPM
37	Sri Andoko	19800404 202421 1 001	V	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	PPPK	SMK
38	Juli Sasmita Sari, S.S	-	-	Pramubakti (Adm. Keuangan)	PPNPN	S-1
39	Maysarah Paramitha Sahea, S.Pi	-	-	Pramubakti (Adm. Persuratan dan kepegawaian)	PPNPN	S-1
40	Rusmin	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SMP
41	Muhamad Agus Hartono	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SMK
42	Desi Eriyanti	-	-	Petugas Kebersihan	PJLP	SMU
43	Mhd. Indra Gunawan,S.Kom	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PPNPN	S-1
44	Rifka Ade Shinta,S.Tr.Pi	-	-	Pramubakti (Sekretaris dan Operator Portal CO)	PPNPN	D-IV
45	Dede Syahputra	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SMP
46	Menanti P Hutagalung	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SMA
47	Muhadi, SE	-	-	Sopir/Pengemudi	PJLP	S-1
48	Graha Akbar Lingga, S.E	-	-	Pramubakti (Administrasi Pengawasan SDP)	PPNPN	S-1
49	Fitra Yusuf	-	-	Petugas Kebersihan	PJLP	SMA
50	Gian Ginanjar	-	-	Sopir/Pengemudi	PJLP	SMA
51	Lili Afriyanti, S.Ak	-	-	Pramubakti (Adm. Keuangan)	PJLP	S-1
52	Natasya Fitrianda, A.Md	-	-	Pramubakti (Adm. Keuangan)	PJLP	D-3
53	Syahrul Pradana, A.Md.T	-	-	Operator Speedboat	PJLP	D-3
54	Irfan Dani Syahputra, S.Kom	-	-	Pramubakti (Administrasi)	PJLP	S-1
55	Rio Sakti	-	-	Pramubakti (Administrasi)	PJLP	SMK

2. SATUAN PENGAWASAN SDKP LANGSA

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
56	Askari, S.Pi	19790308 200604 1 007	Penata Tk.I / III-d	Koordinator Satwas / Analis Pengawasan SDKP	PNS	S-1
57	Dia Murthala, S.ST.Pi	19821017 201003 1 001	Penata Tk.I / III-d	Analisis Pengembangan Sarpras	PNS	D-IV
58	Muhammad Fahrul Riza, S.I.K	19891006 201505 1 002	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengawas Kelautan Ahli Pertama	PNS	S-1
59	SM Khalidi	-	-	Petugas Kebersihan	PJLP	SUPM
60	Azhari	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SLTA
61	Reza Muhajir	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SLTA
Wilker PSDKP Idi						
62	Afriani, A.Md	19860409 201403 2 001	Pengatur Tk.I / II-d	Pengelola Keuangan	PNS	D-3
63	Samsul Bahri	19840610 201406 1 006	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Pengadministrasi Umum	PNS	SUPM
64	Afrizal	-	-	Petugas Kebersihan	PJLP	SMA
Wilker PSDKP Lhokseumawe						
65	Bobby Novrizta Tambunan, S.St.Pi	19841104 201012 1 001	Penata Tk.I / III-d	Pengolah Data	PNS	D-IV
Wilker PSDKP Biureun						

66	Muhammad Hamdani, S.St.Pi	19860906 201403 1 001	Penata / III-c	Pengolah Data	PNS	D-IV
Wilker PSDKP Sigli						
67	Ade Pitra Aprilian, S.Pi	19920401 202321 1 022	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	S-1

3. SATUAN PENGAWASAN SDKP ASAHAN

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
68	Hartoto, S.Pi	19850210 200912 1 002	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
69	Imran Rosyadi, S.St.Pi	19790805 200804 1 001	Penata Tk.I / III-d	Analisis Pengawasan SDKP	PNS	S-1
70	Benardo Nababan, S.Pi, M.Si	19850802 201012 1 006	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
71	Perkasa Sembiring, S.Pi	19820705 201503 1 001	Penata / III-c	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
72	Yoga Kumajaya	19941201 201403 1 001	Pengatur / II-c	Operator Speed Boat	PNS	SMK
73	Argius Wansyah, S.St.Pi	19840814 202321 1 016	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	D-IV
74	Panji Dwi Novriansyah, S.ST.Pi	19891102 202321 1 017	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	D-IV
75	Yuni Saputra, A.Md	19900618 202321 1 014	VII	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	PPPK	D-3
76	Christina Simorangkir, S.E	-	-	Pramubakti (Adm. Pelaporan)	PPNPN	S-1
77	Dedi Suratna	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SMU
78	Muhamad Rifai, S. Pd.I	-	-	Pramubakti (Adm. Pelaporan)	PPNPN	S-1
79	Rizka Rahmadani, S.Pi	-	-	Pramubakti (Adm. Pelaporan)	PPNPN	S-1
Wilker PSDKP Batubara						
80	Irmansyah Putra, S.Pi	19830626 201001 1 032	Penata / III-c	Pengawas Perikanan	Dinas KP Kab. Batubara	S-1
81	Nurhafizah Husni	-	-	Petugas Kebersihan	PJLP	SMU

4. SATUAN PENGAWASAN SDKP ROKAN HILIR

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
82	Hendri Hamzah, A.Md	19690806 199403 1 008	Penata / III-c	Analisis Penanganan Pelanggaran	PNS	D-3
83	Zulkadrihani, S.Pi	19840621 201403 1 001	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	S-1
84	Kelvin Ramadhan	19980119 201801 1 004	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	PNS	SMK
85	Oko Sarles	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SMA
86	Ikhsan Setiawan, S.Pi	-	-	Pramubakti (Adm. Pelaporan dan Persuratan)	PPNPN	S-1

Wilker PSDKP Panipahan						
87	Muhammad Tarmizi	-	-	Pramubakti (Adm. Pelaporan) & Petugas Kebersihan	PJLP	SMA
Wilker PSDKP Dumai						
88	Muhammad Iqbal, S.Pi	19880716 201407 1 001	Penata / III-c	Pengawas Kelautan Ahli Muda	PNS	S-1
89	Mahendra	-	-	Petugas Keamanan (SATPAM)	PJLP	SMK
Wilker PSDKP Kepulauan Meranti						

90	Sri Kartaharja, S.Pi	19801223 201407 1 001	Penata / III-c	Pengolah Data	PNS	S-1
91	Sila Sazali, S.Pi	19860602 201407 1 001	Penata / III-c	Pengelola Surat	PNS	S-1
Wilker PSDKP Indragiri Hilir						
92	Hardiansyah, A.Md	19860412 200903 1 005	Penata Muda / III-a	Pengolah Data	PNS	D-3
93	Wahyuri Purnamasari, A.Md	19800915 201407 2 007	Pengatur Tk.I / II-d	Pengelola Keuangan	PNS	D-3

5. KAPAL PENGAWAS HIU 01

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
94	Fauzi Nyinga Mura, A.Md	19810916 200502 1 001	Penata / III-c	Nakhoda	PNS	D-3
95	Oktafiandi Fajrin, S.P	19881026 200901 1 001	Penata Muda, III/a	Mualim	PNS	S-1
96	Nurholis	19870915 200701 1 004	Penata Muda, III/a	Markonis	PNS	SUPM
97	Alfian Rio Susanto, S.St.Pi	19881214 201503 1 002	Penata / III-c	KKM	PNS	D-IV
98	Muhammad Iqbal	19870628 200701 1 003	Penata Muda, III/a	Masinis	PNS	SUPM
99	Budi Setiawan Pangaribuan	19880927 200801 1 001	Penata Muda, III/a	Serang	PNS	SMK
100	Abdiyullah, A.Md	19940813 202321 1 016	VII	Juru Mudi	PPPK (PANGKALAN LAMPULO)	D-3
101	Indra Dwi Cahyo	19930505 201801 1 002	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Oiler I	PNS	SUPM
102	Candra Nurdiansyah	19910429 202203 1 001	Pengatur Muda / II-a	Oiler II	PNS	SUPM
103	Sudariyanto	19861026 202321 1 014	V	Kelasi I	PPPK	SMA
104	Muhammad Budi Indra Purnama	19890528 202321 1 014	V	Kelasi II	PPPK	SUPM
105	Abdul Haris	TKP	-	Juru Masak	TKP (Dit.POA)	SMA

6. KAPAL PENGAWAS HIU 08

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
106	Susanto Manggopa, A.Md, S.P	19831008 200604 1 003	Penata / III-c	Nakhoda	PNS	S-1
107	Bahrudin, S.PKP	19881223 200801 1 001	Penata Muda Tk.I/ III-b	Mualim	PNS	S-1
108	Riko Putra S, S.St.Pi	19880322 202321 1 011	Penata Muda, III/a	Markonis	PPPK (PANGKALAN TUAL)	D-IV
109	Jensson, S.St.Pi	19871111 201403 1 001	Penata / III-c	KKM	PNS	D-IV
110	Mashuri	19840503 200701 1 002	Penata Muda, III/a	Masinis	PNS	SUPM
111	Gustiya Dwi Laksono, A. Md	19930805 202012 1 003	Pengatur / II-c	Serang	PNS	D-3
112	Reza Jesia Pratama, A.Md.Pi	19980113 202421 1 001	Pengatur / II-c	Juru Mudi	PPPK (PANGKALAN BATAM)	D-3
113	Taufik Ismail	20000220 201902 1 002	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Oiler I	PNS	SMK
114	Rifki Afrilian	19880416 202421 1 003	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Oiler II	PPPK (PANGKALAN BATAM)	SMA
115	Syahrul Ishak	19860828 202321 1 015	V	Kelasi I	PPPK	SUPM
116	Yul Harisman	19900614 202321 1 019	V	Kelasi II	PPPK	SMA
117	Deri Gusrianto	TKP	-	Juru Masak	TKP (Dit.POA)	SMA

6. KAPAL PENGAWAS HIU 16

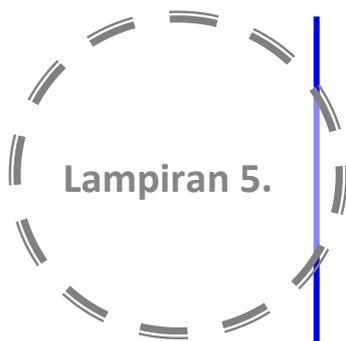
NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
118	Albert Essing, A.Md., S.PKP	19800406 200604 1 007	Penata / III-c	Nakhoda	PNS	S-1
119	Neru Purnawan, A.Md, S.Tr.Pi	19871207 201403 1 001	Penata / III-c	Mualim	PNS	D-IV
120	Dhidit Setiawan	19840822 200502 1 001	Penata Muda, III/a	Markonis	PNS	SMK
121	Marthy Arny Toemigoloeng, A.Md., S.PKP	19790312 200604 1 002	Penata / III-c	KKM	PNS	S-1
122	Nurhaidir Malik, A.Md	19861219 201801 1 001	Pengatur Tk.I / II-d	Masinis I	PNS	D-3
123	Siswo Wijanarko, A.Md	19830408 201503 1 002	Penata Muda, III/a	Masinis II	PNS	D-3
124	Anton Sukrida	19790528 200901 1 004	Pengatur Tk.I / II-d	Serang	PNS	SUPM
125	Muhammad Nazri, A.Md	19911225 202321 1 011	VII	Juru Mudi	PPP (PANGKALAN LAMPULO)	D-3
126	Frando Pangkey, A.Md	19850810 202321 1 021	VII	Oiler I	PPP (PANGKALAN BATAM)	D-3
127	Achmad Fardianzah Nasution	20000125 202321 1 001	V	Kelasi I	PPP (PANGKALAN LAMPULO)	SMA
128	Efendi Silasi Nainggolan	TKP	-	Oiler II	TKP (Dit.POA)	SMA
129	Nuriman	TKP	-	Juru Masak	TKP (Dit.POA)	SMA

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003



Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2024



Lampiran 5.

**KENAIKAN GAJI BERKALA
TAHUN 2024**

BULAN		NAMA PEGAWAI	GOLONGAN	KETERANGAN
Januari	1	Taufik Ikhsan	III-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2024
	2	Samsul Bahri	II-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2024
	3	Safrudin	III-a	KGB mulai tanggal 1 Januari 2024
	4	Muhamad Syamsu Rokhman	III-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2024
	5	Arief Fuddin	III-a	KGB mulai tanggal 1 Januari 2024
	6	Anton Sukrida	II-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2024
	7	Yansen Hilarius Lagus	III-a	KGB mulai tanggal 1 Januari 2024
Februari	1	Dhidit Setiawan	III-a	KGB mulai tanggal 1 Februari 2024
	2	Deistiawan Farisi	III-a	KGB mulai tanggal 1 Februari 2024
Maret	1	Zulkadrihani	III-b	KGB mulai tanggal 1 Maret 2024
	2	Muhammad Hamdani	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2024
	3	Jensson	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2024
	4	Dia Murthala	III-d	KGB mulai tanggal 1 Maret 2024
	5	Afriani	II-d	KGB mulai tanggal 1 Maret 2024
	6	Chaidi Rindiawati	II-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2024
	7	Nur Baety Alifiani	III-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2024
April	1	Zahra Rasyid	III-d	KGB mulai tanggal 1 April 2024
	2	Marthy Army Toemigoloeng	III-c	KGB mulai tanggal 1 April 2024
	3	Imran Rosyadi	III-d	KGB mulai tanggal 1 April 2024
	4	Askari	III-d	KGB mulai tanggal 1 April 2024
	5	Albert essing	III-c	KGB mulai tanggal 1 April 2024
	6	Susanto Manggopa	III-b	KGB mulai tanggal 1 April 2024
Juli	1	Sri Kartaharja	III-c	KGB mulai tanggal 1 Juli 2024
	2	Sila Sazali	III-c	KGB mulai tanggal 1 Juli 2024
	3	Muhammad Iqbal, S.Pi	III-c	KGB mulai tanggal 1 Juli 2024
	4	Halimah Thussaddiyah	III-b	KGB mulai tanggal 1 Juli 2024
September	1	Riza Darledy	II-d	KGB mulai tanggal 1 September 2024
Desember	1	Zulkarnain Nasution	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024
	2	Siti Safiera	III-c	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024
	3	Inggrika R.E Kaban	III/d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024
	4	Indraprastha Cahyaambara T	III/d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024
	5	Gustiya Dwi Laksono	II-c	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024
	6	Bobby Novrizza Nasution	III-c	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024
	7	Benardo Nababan	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024
	8	Adhi Kurniawan	III/d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2024



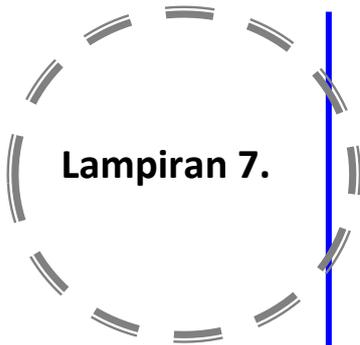
**Daftar Nama PPNS Lingkup Stasiun Pengawasan
SDKP Belawan tahun 2024**

Lampiran 6. Daftar Nama (PPNS) Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No.	Nama / NIP. / Tempat / Tgl. Lahir	Pangkat Gol. Dan Jabatan	Tgl. Pelatihan	Pelaksana Diklat	S.KEP PPNS	S.Kep Wil. Kerja PPNS
					No. / Tgl	
Stasiun Pengawasan SDKP Belawan						
1	Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H	Penata Tk.I / III-d	21 September s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-462.AH.09.02	Seluruh Indonesia
	NIP. 19830730 200801 1 003	Kepala Stasiun PSDKP	19 November 2010	Mega Mendung	Tahun 2017	
	Rembang, 30 Juli 1983	Belawan			6 Juli 2017	
2	Adhi Kurniadi, S.St.Pi	Penata Tk.I / III-d	20 Agustus s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-36.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19860712 200901 1 003	Pengawas Perikanan	18 Oktober 2013	Mega Mendung	Tahun 2013	
	Jakarta, 12 Juli 1986				27 Desember 2013	
3	Josia Suarta Sembiring, SH	Penata / III-c	29 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-34.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19860603 200912 1 001	Pengawas Perikanan	27 Juni 2014	Mega Mendung	Tahun 2014	
	Medan, 3 Juni 1986				25 Agustus 2014	
4	Denggan M Ilmi, S.Pi	Penata / III-c	29 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-34.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19840401 200912 1 002	Koordinator Satwas SDKP	27 Juni 2014	Mega Mendung	Tahun 2014	
	Medan, 1 April 1984	Asahan			25 Agustus 2014	
5	Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi	Penata / III-c	13 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-56.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19790217 200912 1 001	Pengawas Perikanan	12 Juni 2015	Mega Mendung	Tahun 2015	
	Samosir, 17 Februari 1979				02 November 2015	
6	Zulkarnain Nasution, S.St.Pi	Penata Tk.I / III-d	6 Maret s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-24.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19861021 201012 1 003	Pengawas Perikanan	4 Mei 2018	Mega Mendung	Tahun 2018	
	Tarlola Mandailing Natal, 21 Oktober 1986				23 Agustus 2018	
Satuan Pengawasan SDKP Asahan						
7	Hartoto, S.Pi	Penata / III-c	13 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-56.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP. 19850210 200912 1 002	Pengawas Perikanan	12 Juni 2015	Mega Mendung	Tahun 2015	
					02 November 2015	
Satuan Pengawasan SDKP Langsa						
8	Askari, S.Pi	Penata Tk.I / III-d	20 Agustus s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-36.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP. 19790308 200604 1 007	Koordinator Satwas SDKP	18 Oktober 2013	Mega Mendung	Tahun 2013	
	Aceh Timur, 8 Maret 1979	Langsa			27 Desember 2013	
9	Dia Murthala, S.St.Pi	Penata / III-c	24 Mei s/d	Pusdik Reskrim POLRI	Skep belum terbit	Seluruh Indonesia
	NIP. 19821017 201003 1 001	Analisis Pengembangan	23 Juli 2021	Mega Mendung		
	Julok Cut, 17 Oktober 1982	Sarana Prasarana				
10	Abul Hayyi Almufrodi, S.Pi	Penata Muda Tk.I / III-b	24 Mei s/d	Pusdik Reskrim POLRI	Skep belum terbit	Seluruh Indonesia
	NIP. 19881204 201503 1 002	Pengawas Perikanan	23 Juli 2021	Mega Mendung		
	Lumajang, 04 Desember 1988					

Medan, 10 Januari 2024





Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024

7. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

7.1. REKAPITULASI KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN S/D BULAN DESEMBER 2024

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	JANUARI									FEBRUARI								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	96	129	129	173	185	185	269	314	314	71	88	88	168	182	182	239	270	270
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				21	31	31	21	31	31				16	13	13	16	13	13
3	Kabupaten Bengkalis				21	28	28	21	28	28				37	36	36	37	36	36
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				5	6	6	5	6	6				7	6	6	7	6	6
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				49	51	51	49	51	51	15	51	51	41	44	44	56	95	95
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				28	28	28	28	28	28				21	20	20	21	20	20
7	Satwas PSDKP Langsa				71	71	71	71	71	71				57	57	57	57	57	57
8	Kabupaten Aceh Timur	4	8	8	198	228	228	202	236	236	12	14	14	226	250	250	238	264	264
9	Kota Lhokseumawe				195	198	196	195	198	196				173	175	175	173	175	175
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				77	77	77	77	77	77				77	77	77	77	77	77
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				73	73	73	73	73	73				81	81	81	81	81	81
12	Kabupaten Pidie				24	35	35	24	35	35				28	47	47	28	47	47
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	27	6	3	546	619	618	573	625	621	3	7	4	474	601	599	477	608	603
15	Kabupaten Batu Bara							-	-	-							-	-	-
	Jumlah	127	143	140	1.481	1.630	1.627	1.608	1.773	1.767	101	160	157	1.405	1.589	1.587	1.506	1.749	1.744

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	MARET									APRIL								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	115	130	130	231	241	241	346	371	371	169	195	195	211	229	229	364	406	424
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				11	26	26	11	26	26				8	17	17	-	8	17
3	Kabupaten Bengkalis				36	36	36	36	36	36				14	14	14	-	14	14
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				6	5	5	6	5	5				6	6	6	-	6	6
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				63	68	68	63	68	68				63	68	68	-	63	68
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				28	29	29	28	29	29				97	98	98	-	97	98
7	Satwas PSDKP Langsa				69	69	69	69	69	69				60	60	60	-	60	60
8	Kabupaten Aceh Timur	14	17	17	241	252	252	255	269	269	12	12	12	185	199	199	24	197	211
9	Kota Lhokseumawe				190	190	190	190	190	190				141	141	141	-	141	141
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				90	90	90	90	90	90				90	90	90	-	90	90
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				80	80	80	80	80	80				88	88	88	-	88	88
12	Kabupaten Pidie				46	59	59	46	59	59				26	45	45	-	26	45
13	Kabupaten Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	2	36	36	557	526	526	559	562	562	18	55	54	303	301	301	72	358	355
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	131	183	183	1.648	1.671	1.671	1.779	1.854	1.854	199	262	261	1.292	1.356	1.356	460	1.554	1.617

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	MEI									JUNI								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	268	294	294	307	312	312	575	606	606	222	223	223	266	269	269	488	492	492
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				21	25	25	21	25	25				12	20	20	12	20	20
3	Kabupaten Bengkalis				24	24	24	24	24	24				19	19	19	19	19	19
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				3	4	4	3	4	4				4	4	4	4	4	4
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				57	60	60	57	60	60				57	60	60	57	60	60
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				23	23	23	23	23	23				21	22	22	21	22	22
7	Satwas PSDKP Langsa				60	60	60	60	60	60				94	94	94	94	94	94
8	Kabupaten Aceh Timur	18	16	16	244	260	260	262	276	276	9	10	10	154	170	170	163	180	180
9	Kota Lhokseumawe				201	202	202	201	202	202				108	108	108	108	108	108
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				106	106	106	106	106	106				63	63	63	63	63	63
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				105	105	105	105	105	105				60	60	60	60	60	60
12	Kabupaten Pidie				70	100	100	70	100	100				35	67	67	35	67	67
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	42	38	37	471	598	598	513	636	635	41	56	54	424	394	394	465	450	448
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	328	348	347	1.692	1.879	1.879	2.020	2.227	2.226	272	289	287	1.317	1.350	1.350	1.589	1.639	1.637

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	JULI									AGUSTUS								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	213	205	205	303	313	313	516	518	518	219	271	271	275	289	289	494	560	560
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				6	19	19	6	19	19				12	25	25	12	25	25
3	Kabupaten Bengkalis				31	31	31	31	31	31				30	30	30	30	30	30
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				4	4	4	4	4	4				4	5	5	4	5	5
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				15	15	15	15	15	15				40	42	42	40	42	42
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				29	28	28	29	28	28				24	25	25	24	25	25
7	Satwas PSDKP Langsa				90	90	90	90	90	90				56	56	56	56	56	56
8	Kabupaten Aceh Timur	17	20	20	209	234	234	226	254	254	16	14	14	159	229	229	175	243	243
9	Kota Lhokseumawe				182	183	183	182	183	183				199	201	199	199	201	199
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				88	88	88	88	88	88				78	78	78	78	78	78
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				77	77	77	77	77	77				90	90	90	90	90	90
12	Kabupaten Pidie				42	67	67	42	67	67				74	74	74	74	74	74
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	50	32	32	413	421	421	463	453	453	30	50	48	425	469	469	455	519	517
15	Kabupaten Batu Bara							-	-	-							-	-	-
	Jumlah	280	257	257	1.489	1.570	1.570	1.769	1.827	1.827	265	335	333	1.466	1.613	1.611	1.731	1.948	1.944

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	SEPTEMBER									OKTOBER								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	252	265	265	277	289	289	529	554	554	287	295	295	295	309	309	582	604	604
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				16	23	23	16	23	23				136	218	218	136	218	218
3	Kabupaten Bengkalis				20	21	21	20	21	21				23	23	23	23	23	23
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				4	3	3	4	3	3				3	4	4	3	4	4
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				19	19	19	19	19	19				20	20	20	20	20	20
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				17	17	17	17	17	17				19	23	23	19	23	23
7	Satwas PSDKP Langsa				49	49	49	49	49	49				66	66	66	66	66	66
8	Kabupaten Aceh Timur	14	14	14	206	218	218	220	232	232	18	20	20	227	249	249	245	269	269
9	Kota Lhokseumawe				166	166	166	166	166	166				162	162	162	162	162	162
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				71	71	71	71	71	71				74	74	74	74	74	74
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				74	74	74	74	74	74				74	74	74	74	74	74
12	Kabupaten Pidie				70	70	70	70	70	70				66	66	66	66	66	66
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	38	49	49	477	501	501	515	550	550	51	55	53	527	537	537	578	592	590
15	Kabupaten Batu Bara							-	-	-							-	-	-
	Jumlah	304	328	328	1.466	1.521	1.521	1.770	1.849	1.849	356	370	368	1.692	1.825	1.825	2.048	2.195	2.193

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	NOVEMBER									DESEMBER								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	306	315	315	259	265	265	565	580	580	260	292	292	222	219	219	482	511	511
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				17	18	18	17	18	18				14	22	22	14	22	22
3	Kabupaten Bengkalis				27	27	27	27	27	27				29	29	29	29	29	29
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				4	4	4	4	4	4				5	5	5	5	5	5
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				17	17	17	17	17	17				9	9	9	9	9	9
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				28	28	28	28	28	28				18	18	18	18	18	18
7	Satwas PSDKP Langsa				55	55	55	55	55	55				51	51	51	51	51	51
8	Kabupaten Aceh Timur	18	19	19	194	201	201	212	220	220				15	14	14	178	183	183
9	Kota Lhokseumawe				179	183	181	179	183	181				162	163	159	162	163	159
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				74	74	74	74	74	74				61	61	61	61	61	61
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				82	82	82	82	82	82				82	82	82	82	82	82
12	Kabupaten Pidie				70	70	70	70	70	70				49	49	49	49	49	49
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	35	37	37	546	575	575	581	612	612	68	11	10	560	518	518	628	529	528
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-
	Jumlah	359	371	371	1.552	1.599	1.597	1.911	1.970	1.968	328	303	302	1.277	1.240	1.236	1.768	1.712	1.707

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	2024								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	2.478	2.702	2.702	2.987	3.102	3.102	5.449	5.786	5.804
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)	-	-	-	289	457	457	281	448	457
3	Kabupaten Bengkalis	-	-	-	311	318	318	297	318	318
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	-	-	-	55	56	56	49	56	56
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)	15	51	51	450	473	473	402	519	524
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai	-	-	-	353	359	359	256	358	359
7	Satwas PSDKP Langsa	-	-	-	778	778	778	718	778	778
8	Kabupaten Aceh Timur	152	164	164	2.258	2.504	2.504	2.400	2.823	2.837
9	Kota Lhokseumawe	-	-	-	2.058	2.072	2.062	1.917	2.072	2.062
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)	-	-	-	949	949	949	859	949	949
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)	-	-	-	966	966	966	878	966	966
12	Kabupaten Pidie	-	-	-	600	749	749	574	730	749
13	Kabupaten Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	405	432	417	5.723	6.060	6.057	5.879	6.494	6.474
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.050	3.349	3.334	17.777	18.843	18.830	19.959	22.297	22.333

Lampiran 7.2. REKAP HASIL PENGAWASAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) HASIL PERIKANAN LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

No	UPT PSDKP	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pengawas Perikanan	Nama Pelaku Usaha (sesuai dengan data NIB)	Nama Perusahaan (Diisi jika usaha berbentuk korporasi/usaha berbadan hukum, jika usaha berbentuk perseorangan mohon cantumkan tanda (-))	NIB Jika usaha tidak memiliki izin, maka berikan tanda (-)	NPWP	Lokasi Usaha (Nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Status Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Risiko (Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi)	Kode KBLI	Nama KBLI
1	Stasiun PSDKP Belawan	14 Maret 2024	Denggan M Ilmi Inggrika R Kaban Desy Natalia	PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries	PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries	8120101920359	01.225.202.9-1233.000	Jln. K.L. Yos Sudarso KM. 10.5, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	PMA		10213	Industri Pembekuan Ikan
2	Stasiun PSDKP Belawan	14 Maret 2024	Denggan M Ilmi Inggrika R Kaban Desy Natalia	PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries	PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries	8120101920359	01.225.202.9-1233.000	Jln. K.L. Yos Sudarso KM. 10.5, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	PMA		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
3	Stasiun PSDKP Belawan	14 Maret 2024	Denggan M Ilmi Inggrika R Kaban Desy Natalia	PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries	PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries	8120101920359	01.225.202.9-1233.000	Jln. K.L. Yos Sudarso KM. 10.5, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	PMA		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
4	Stasiun PSDKP Belawan	26 Maret 2024	1. Josia Suarta Sembiring, S. Pi 2. Chaidi Rindiawat, A.Md.Pi	PT FUDA SARI LAUT	PT FUDA SARI LAUT	8120315120371	85.369.350.5-125.000	Jl. M. YAKUB LUBIS DUSUN III Kab. Deli Serdang Sumatera Utara	PMA	Menengah	10293	KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
5	Stasiun PSDKP Belawan	27 Maret 2024	Adhi Kurniawan, Nur Baety Alifiani	-	PT. Seafood Sumatera Perkasa	8120002962402	02.528.697.2-112.000	Jl. Titi Pahlawan No.28 Medan Marelan	PMA	Menengah Tinggi	10213	Industri Pembekuan Ikan
6	Stasiun PSDKP Belawan	27 Maret 2024	Adhi Kurniawan, Nur Baety Alifiani	-	PT. Seafood Samudera Pacific	8120108841644	70.942.657.1-125.000	Jl. Gabion Nomor 15, Kota Medan	PMA	Menengah Tinggi	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
7	Stasiun PSDKP Belawan	20 Maret 2024	1. Zulkarnain Nasution, S.St.Pi 2. Abdullah Ali Hakim Nasution, S.Pi	PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	1802220041127		Jl. Pinus Lk. IV, Jati Utomo, Binjai Utara	PMA	Tinggi	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
8	Stasiun PSDKP Belawan - Satwas SDKP Langsa	03 Mei 2024	Muhammad Hamdani	Udin S.	Polakhsar Jasa Laot	2804240020469		Dusun Kenangkun, Desa Muka Sei Kuruk	PMDN	Menengah Rendah	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
9	Stasiun PSDKP Belawan - Satwas SDKP Langsa	13 Mei 2024	Muhammad Hamdani	Safrina	Polakhsar Usaha Bunda	805240309686	-	Dusum Ikhlas, Desa Kuala Langsa	PMDN	Menengah Rendah	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
10	Satwas SDKP Rokan Hilir - Stasiun PSDKP Belawan	21 Mei 2024	Hendri Hamzah, A.Md	CV. Satu Wahana Jaya Sentosa	CV. Satu Wahana Jaya Sentosa	1271000711175	76.282.196.216.000	Jalan Lobak, No. 109 C, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru	PMDN	Menengah Rendah	10216	Industri Berbasis Daging Lumutan dan Surimi
11	SATWAS PSDKP ASAHAN	16 Mei 2024	1. Imran Rosyadi 2. Yuni Saputra	SHINTARIA ANGELINA	PT. HALINDO BERJAYA MANDIRI	812010189093	74.572.938.4-115.000	Jl. Burhanuddin Teluk Nibung kel. Perjuangan Kota	PMDN	Menengah rendah	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
12	SATWAS PSDKP ASAHAN	29 Mei 2024	PERKASA SEMBIRING ARGIOUS WANSYAH	LINA	CV. SURYA TIRTA MUARA	8120010132215	02,310,128,0-115,000	JLN. RAYA SEI MERBAU KEC. TELUK NIBUNG	PMDN	Menengah rendah	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT

13	SATWAS PSDKP ASAHAN	30 Mei 2024	IMRAN ROSYADI BENARDO NABABAN	SAGINO	GALDINO TIRTO	08092201098 33	60.933.439.9- 115.000	JL. YOS SUDARSO, Kelurahan Sei Merbau	PMDN	Menengah rendah	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
----	------------------------	-------------	----------------------------------	--------	---------------	-------------------	--------------------------	--	------	--------------------	-------	--

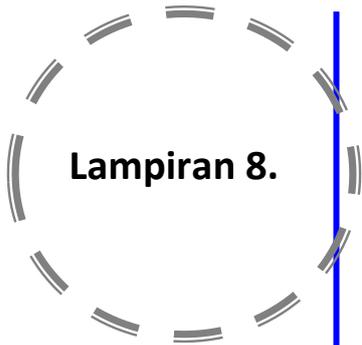
7.4. Rekapitulasi Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan

No	UPT PSDKP	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten	Lokasi Proyek	Status Penanaman Modal	Risiko	Kode KBLI	Nama KBLI	Skala Usaha
1	Stasiun PSDKP Belawan	PT SURYAWINDU PERTIWI	PT SURYAWINDU PERTIWI	Aceh	Bireun	Dusun Barat, Desa Lipah Rayeuk, Kec Jeumpa Kabupaten Bireun	PMA	Menengah Tinggi	03211	Pembenihan Ikan Laut	Besar
2	Stasiun PSDKP Belawan	Jeremy Tarigan	Jeremy Tarigan	Sumatera Utara	Deli Serdang	Dusun I Kepala Gajah, Desa Mbarua, Kab. Deli Serdang	PMDN	Menengah Rendah	03224	pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Mikro
3	Stasiun PSDKP Belawan	Firdaus	KPB Patin	Riau	Kampar	Dusun IV Kampung Baru, Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
4	Stasiun PSDKP Belawan	Ogi Asendo	KPB Patin	Riau	Kampar	Dusun IV Kampung Baru, Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
5	Stasiun PSDKP Belawan	Sukardi	KPB Gurami	Sumatera Utara	Deli Serdang	Dusun I, Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
6	Stasiun PSDKP Belawan	Maryudi	KPB Windu	Aceh	Aceh Tamiang	Dusun Meunasah, Desa Tanjung Keramat, Kec Banda Mulia	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
7	Stasiun PSDKP Belawan	Muklis	KPB Windu	Aceh	Aceh Tamiang	Dusun Damai, Desa Tanjung Keramat, Kec Banda Mulia	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea	Mikro
8	Stasiun PSDKP Belawan	Edy Surifto	KPB Gurami	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Dusun II, Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
9	Stasiun PSDKP Belawan	Binaranga Tarigan	KPB Mas	Sumatera Utara	Karo	KPB Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
10	Stasiun PSDKP Belawan	Marim Tarigan	KPB Mas	Sumatera Utara	Karo	KPB Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
11	Stasiun PSDKP Belawan	Zainuddin	KPB Patin	Riau	Rokan Hilir	Jalan Parit Aman, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
12	Stasiun PSDKP Belawan	Suharyani	KPB Patin	Riau	Rokan Hilir	Jalan Parit Aman, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
13	Stasiun PSDKP Belawan	Sapri	SAPRI FARM	Riau	Bengkalis	Jalan Sudirman Kel. Batang Duku, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
14	Stasiun PSDKP Belawan	Cinbeng	CINBENG FARM	Riau	Bengkalis	Desa Batang Duku, Kec. Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Kecil
15	Stasiun PSDKP Belawan	Martin	MARTIN FARM	Riau	Bengkalis	Desa Batang Duku, Kec. Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro

No	UPT PSDKP	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten	Lokasi Proyek	Status Penanaman Modal	Risiko	Kode KBLI	Nama KBLI	Skala Usaha
16	Stasiun PSDKP Belawan	Yanto Saputra	YANTO SAPUTRA FARM	Riau	Bengkalis	Jalan Sudirman Kel. Batang Duku, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Kecil
17	Stasiun PSDKP Belawan	Jun Efendi	AHAT STEFANUS FARM	Riau	Bengkalis	Desan Buruk Bakul, Kec. Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
18	Stasiun PSDKP Belawan	Taslem	Taslem	Aceh	Lhokseumawe	Gampong Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
19	Stasiun PSDKP Belawan	SUGIATNO, S.Pi	SUGIATNO, S.Pi	Sumatera Utara	Asahan	Dusun V, DESA TANJUNG ALAM, Desa/Kel Tanjung Alam Kab Asahan	PMDN	Menengah Rendah	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Mikro
20	Stasiun PSDKP Belawan	Irwansyah	PT AQUA FARM NUSANTARA	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Dusun VII, Desa/Kelurahan Naga Kisar, Kec. Pantai Cermin	PMA	Menengah Tinggi	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Besar
21	Stasiun PSDKP Belawan	Irwansyah	PT AQUA FARM NUSANTARA	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Dusun VII, Desa/Kelurahan Naga Kisar, Kec. Pantai Cermin	PMA	Menengah Tinggi	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Besar
22	Stasiun PSDKP Belawan	Irwansyah	PT AQUA FARM NUSANTARA	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Dusun VII, Desa/Kelurahan Naga Kisar, Kec. Pantai Cermin	PMA	Menengah Tinggi	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Besar
23	Stasiun PSDKP Belawan	SRI SUYATMI	PT. Istanaindo Family Arowana	Riau	Pekanbaru	Jalan Toman, Kelurahan Rantaupanjang, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	PMA	Menengah Tinggi	'03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Besar
24	Stasiun PSDKP Belawan	SRI SUYATMI	PT. Istanaindo Family Arowana	Riau	Pekanbaru	Jalan Toman, Kelurahan Rantaupanjang, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	PMA	Menengah Tinggi	'03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Besar
25	Stasiun PSDKP Belawan	SRI SUYATMI	PT. Istanaindo Family Arowana	Riau	Pekanbaru	Jalan Toman, Kelurahan Rantaupanjang, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	PMA	Menengah Tinggi	'03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Besar
26	Stasiun PSDKP Belawan	SRI SUYATMI	PT. Istanaindo Family Arowana	Riau	Pekanbaru	Jalan Toman, Kelurahan Rantaupanjang, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	PMA	Menengah Tinggi	'03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Besar
27	Stasiun PSDKP Belawan	Abu Bakar	KPB Bandeng	Aceh	Aceh Utara	Desa Geulumpang Umpung Unou, Kec T. Jambo Aye Kecamatan Aceh Utara	PMDN	Menengah Rendah	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Mikro
28	Stasiun PSDKP Belawan	Sudarto	KPB Lele	Sumatera Utara	Binjai	Jalan MJ Sutoyo No.100B LK V, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
29	Stasiun PSDKP Belawan	Joko Pranoto	KPB Lele	Sumatera Utara	Binjai	Jalan Kelapa LK.IV, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
30	Stasiun PSDKP Belawan	Aditya	KPB Patin	Riau	Rokan Hilir	Jalan Parit Aman, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
31	Stasiun PSDKP Belawan	Satrio Aji	KPB Patin	Riau	Rokan Hilir	Jalan Parit Aman, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
32	Stasiun PSDKP Belawan	Joseph Ginting	KPB Mas	Sumatera Utara	Deli Serdang	Desa Sibiru-biru Kecamatan Sibiru-Biru Kab. Deli Serdang	PMDN	Menengah Rendah	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Mikro

No	UPT PSDKP	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten	Lokasi Proyek	Status Penanaman Modal	Risiko	Kode KBLI	Nama KBLI	Skala Usaha
33	Stasiun PSDKP Belawan	Syapuan Epis	KPB Nila	Riau	Kuantan Singingi	Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantang Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
34	Stasiun PSDKP Belawan	Huskal	KPB Nila	Riau	Kuantan Singingi	Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantang Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau	PMDN	Menengah Rendah	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
35	Stasiun PSDKP Belawan	HASBALLAH	PT.NEUHEUN AQUAKULTUR TIMUR	Aceh	Aceh Timur	Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, 5°1'35,635"N 97°41'58,444"E 10°N.	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
36	Stasiun PSDKP Belawan	Robin Bakkara	Robin Bakkara	Sumatera Utara	Simalungun	Huta I Sualan	PMDN	Menengah Rendah	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	Mikro
37	Stasiun PSDKP Belawan	Syafrol	Syafrol	Aceh	Lhokseumawe	Daud Beureuh Ujung Blang Kec Banda Sakti Kota Lhosemawe, 5°20'9644"N 97°11'3431N.	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
38	Stasiun PSDKP Belawan	Lena Sapriadi	KPB LKR	Aceh	Langsa	Gampong Sungai Pauh, Kec Langsa Barat Kota Langsa, Provinsi Aceh	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
39	Stasiun PSDKP Belawan	A.Hamid	KPB LKR	Aceh	Aceh Timur	Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kec Simpang Ulim, Aceh Timur	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
40	Stasiun PSDKP Belawan	MUHAMMAD YATIM	KPB LKR	Aceh	Aceh Utara	Dusun Keude, Desa Ulee Rubek Timur Kecamatan Seunuddon Provinsi Aceh	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
41	Stasiun PSDKP Belawan	Adham Mirza	KPB LKR	Sumatera Utara	Langkat	Lingkungan Kampung Baru, Desa/Kelurahan Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
42	Stasiun PSDKP Belawan	Sapriadi	KPB LKR	Sumatera Utara	Langkat	T. Lagan Barat, Desa/Kelurahan Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
43	Stasiun PSDKP Belawan	Adham Mirza	KPB LKR	Sumatera Utara	Langkat	Lingkungan Kampung Baru, Desa/Kelurahan Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro
44	Stasiun PSDKP Belawan	PT AQUA FARM NUSANTARA	PT AQUA FARM NUSANTARA	Sumatera Utara	Toba	Jalan Justin Sirait, Desa Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	PMA	Menengah Tinggi	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	Besar
45	Stasiun PSDKP Belawan	PT AQUA FARM NUSANTARA	PT AQUA FARM NUSANTARA	Sumatera Utara	Toba	Jalan Justin Sirait, Desa Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	PMA	Menengah Tinggi	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	Besar
46	Stasiun PSDKP Belawan	PT AQUA FARM NUSANTARA	PT AQUA FARM NUSANTARA	Sumatera Utara	Toba	Jalan Justin Sirait, Desa Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	PMA	Menengah Tinggi	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	Besar
47	Stasiun PSDKP Belawan	PT AQUA FARM NUSANTARA	PT AQUA FARM NUSANTARA	Sumatera Utara	Toba	Jalan Justin Sirait, Desa Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	PMA	Menengah Tinggi	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	Besar

No	UPT PSDKP	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten	Lokasi Proyek	Status Penanaman Modal	Risiko	Kode KBLI	Nama KBLI	Skala Usaha
48	Stasiun PSDKP Belawan	Miswar	Miswar	Aceh	Lhokseumawe	Jl. Jalur Dua Ps. Induk Ujung Blang	PMDN	Menengah Rendah	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro



Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024

Lampiran 8. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

8.1. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1	Stasiun PSDKP Belawan	25-Mar-24	PT. Dahlia Mekar Lestari (DML)	<p>PT. Dahlia Mekar Lestari (DML) yang beralamat di Desa Wonosari tengah, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau</p> <p>Jenis Ikan yang dimanfaatkan oleh perusahaan ini adalah Arwana Kalimantan (<i>Scleropages formosus</i>) dan Arwana Irian (<i>Scleropages jardini</i>).</p> <p>Perusahaan ini memiliki tiga lokasi pengembangbiakan yaitu di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Kantor Pusat di Kota Pekanbaru. Keseluruhan lokasi tersebut berada pada Provinsi Riau</p> <p>PT. DML di lokasi Kab. Bengkalis ini hanya untuk tujuan pengembangbiakan, untuk proses pemeliharaan selanjutnya dilakukan di Kota Pekanbaru</p> <p>Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104202128 Tanggal 22 Februari 2019, dengan KBLI 03271 – Pengembangbiakan Ikan Bersirip yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES, Dengan Kalsifikasi Resiko Tinggi. Adapun Status penanaman modal adalah PMDN.</p> <p>Surat Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) pengembangbiakan Nomor I-202110131440307956328 yang berlaku hingga Tahun 2026</p> <p>Dokumen Izin Edar Luar Negeri Nomor SK.303/KSDAE/SET/KSA.2/7/2019 yang berlaku hingga Bulan Juli 2024, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)</p> <p>petugas belum menemukan adanya Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) di lokasi ini, penanggung jawab menyampaikan bahwa semua dokumen tersebut, termasuk untuk lokasi lainnya terdapat di kantor pusat di Kota Pekanbaru</p> <p>Hasil konsultasi dengan Ibu Hasneli, S.Pi selaku koordinator Kantor Karantina ikan Bengkalis menyampaikan bahwa PT. DML selalu mengurus HC dengan melampirkan SAJI apabila akan melakukan perpindahan ikan dari Kab.Bengkalis ke Kota Pekanbaru</p> <p>Disimpulkan bahwa usaha ini legal karena memiliki izin pengembangbiakan maupun perdagangan dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Tim PSDKP melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Labuhan Batu, dengan Ibu Suaibah Permata Sari selaku JFT Pembina Mutu Hasil Perikanan terkait pelaksanaan pengawasan bersama</p> <p>Tim berhasil memeriksa 4 (empat) kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di Sungai Barumun dengan data sebagai berikut:</p> <p>KM. Tanpa Nama</p> <p>1) GT : - (Sampan)</p> <p>2) Asal : Desa Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu</p> <p>3) Pemilik : Muhamad Yusuf</p> <p>4) Nakhoda : Muhamad Yusuf</p> <p>5) No. SIUP : -</p> <p>6) No. SIPI : -</p> <p>7) Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan</p> <p>8) Alat Penangkap Ikan : Gill Net</p> <p>9) ABK : -</p> <p>10) Muatan : 1 kg ikan gulamah</p> <p>11) Posisi riksa : 2°30'42,85926"LU - 100°9'8,28115"BT</p> <p>KM. Tanpa Nama1)</p> <p>1)GT : - (sampan)</p> <p>2) Asal : Desa Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu</p> <p>3) Pemilik : Sahrul</p> <p>4) Nakhoda : Sahrul</p> <p>5) No. SIUP : -</p> <p>6) No. SIPI : -</p> <p>7) Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan</p> <p>8) Alat Penangkap Ikan : Gill Net</p> <p>9) ABK : -</p> <p>10) Muatan : 1 kg ikan gulamah</p> <p>11) Posisi riksa : 2°30'55,18004"LU - 100°8'37,96555"BT</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
2	Stasiun PSDKP Belawan	1 s.d 3 April 2024	Kabupaten Labuhan Batu	<p>KM. Tanpa Nama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GT : - 2) Asal : Desa Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu 3) Pemilik : Ahmad Sangkot 4) Nakhoda : Ahmad Sangkot 5) No. SIUP : - 6) No. SIPI : - 7) Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan 8) Alat Penangkap Ikan : Gill Net 9) ABK : - 10) Muatan : - 11) Posisi riksa : 2°30'55,75249"LU - 100°8'37,35686"BT <p>KM. Tanpa Nama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GT : - 2) Asal : Desa Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu 3) Pemilik : Imran 4) Nakhoda : Imran 5) No. SIUP : - 6) No. SIPI : - 7) Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan 8) Alat Penangkap Ikan : Gill Net 9) ABK : 1 10) Muatan : 1 kg ikan gulamah 11) Posisi riksa : 2°30'56,75249"LU - 100°8'48,77549"BT <p>Dugaan Pelanggaran : Tidak ditemukan dugaan pelanggaran karena tidak ditemukan adanya penangkapan ikan terubuk oleh 4 (empat) unit kapal perikanan yang diperiksa dalam dua hari pengawasan dimasa larangan (1-3 April 2024) seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor KEP.43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (T. illisha).</p> <p>Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Labuhan Batu akan melakukan pendampingan terhadap nelayan di wilayah sungai Barumon terkait periode masa larangan. b. Meningkatkan kerja sama Pokmaswas, BPSPL, dan Dinas Perikanan terkait pelaksanaan Kepmen Kap No. 43/KEPMEN-KP/2016. 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
3	Stasiun PSDKP Belawan	25 April 2024	PT. Alam Biru Indonusa	<p>Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 bersama dengan tim BPSPL Padang Satker Medan di PT. Alam Biru Indonusa , Jl. Ladang, Gang Perjuangan No.42 B, Kel Kedai Durian Kec. Medan Johor, Kota Medan</p> <p>Hasil pengawasan jenis ikan yang dilindungi dan/atau ikan yang tercantum dalam appendiks CITES pada PT. Alam Biru Indonusa sudah memiliki dokumen perizinan berusaha berupa : NIB (1217000462639),</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIPJI Dalam Negeri (12170004626390002), SIPJI Luar Negeri (12170004626390014), SIUP (1217000462639) dan KBLI 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan <p>Jenis ikan yang diperdagangkan adalah Sirip Hiu yang diperoleh dari suplier di Aceh, Sibolga, dan Kep. Riau dengan tujuan wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemasaran adalah Hongkong. Supplier Sirip Hiu sudah terverifikasi oleh tim BPSPL Padang Satker Medan. <p>Dari hasil pengawasan terhadap PT. Alam Biru Indonusa disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. 	
				<p>Kegiatan dilaksanakan pada 6 dan 7 Juni 2024 di perairan Selat Lalang hingga Selat Bengkalis diikuti oleh UPT PSDKP Wilayah II DKP Provinsi Riau, Bidang Kelautan dan Pengawasan DKP Provinsi Riau, BPSPL Padang dan Satwas PSDKP Rokan Hilir menggunakan KP Kurau 02</p> <p>Selama patroli tim memeriksa 12 kapal motor nelayan di mana 3 di antaranya ditemukan telah menangkap ikan terubuk. Adapun data kapal motor tersebut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - A. KM. Tirusan <ul style="list-style-type: none"> * Nama Pemilik/Nakhoda: Andika * Alamat/Asal: Desa Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 1 GT * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Selat Lalang * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: - * Koordinat : 1,051204 LU, 102,220033 BT 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>B. KM. Putri Todak * Nama Pemilik/Nakhoda: Syafrizal * Alamat/Asal: Desa Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 1,5 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Selat Lalang * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: - * Koordinat : 1,0563 LU 102,2198 BT</p> <p>C. KM. Pejuang Rupiah * Nama Pemilik/Nakhoda: Miswandi * Alamat/Asal: Desa Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 1,5 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Selat Lalang * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: - * Koordinat : 1,0560 LU 102,2201 BT</p> <p>D. KM. Berkah Jaya * Nama Pemilik/Nakhoda: Musmuliadi * Alamat/Asal: Desa Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 1 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Selat Lalang * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: - * Koordinat : 1,0560 LU 102,2201 BT</p> <p>E. KM. Rezeki Baru * Nama Pemilik/Nakhoda: Musmuliadi * Alamat/Asal: Desa Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 1 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Selat Lalang * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: - * Koordinat : 1,1480 LU 102,2206 BT</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
4	Stasiun PSDKP Belawan	6 s.d 7 Juni 2024	Perairan Selat Lalang hingga Selat Bengkalis	<p>F. KM. Rezeki Baru * Nama Pemilik/Nakhoda: Musmuliadi * Alamat/Asal: Desa Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 1 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Muara Sungai Siak * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: - * Koordinat : 1,1480 LU 102,2206 BT</p> <p>G. KM. Tanpa nama * Nama Pemilik/Nakhoda: Alim * Alamat/Asal: Desa Sungai Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 1 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Muara Sungai Siak * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: Ikan Kelampai/ 19 kg * Koordinat : 1,1575 LU 102,2242 BT</p> <p>H. KM. Senangin * Nama Pemilik/Nakhoda: Ogi * Alamat/Asal: Desa Sungai Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 3 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Muara Sungai Siak * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: Ikan Kelampai/ 13 kg * Koordinat : 1,1593 LU 102,2251 BT</p> <p>I. KM. Senang * Nama Pemilik/Nakhoda: Beny Afrizal * Alamat/Asal: Desa Sungai Kayu Ara, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 3 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Muara Sungai Siak * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/jumlah Ikan Hasil Tangkapan: - * Koordinat : 1,1592 LU 102,2251 BT</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>J. KM. Tanpa Nama * Nama Pemilik/Nakhoda: Kamaludin * Alamat/Asal: Desa Kuala Alam, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 3 GT - * No. SIUP/SIPI: - * Daerah tangkapan: Selat Bengkalis * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/Jumlah Ikan Hasil Tangkapan: ikan terubuk/ 7 ekor (3 kg) * Koordinat : 1,394029 LU 102,176054 BT</p> <p>K. KM. Tanpa Nama * Nama Pemilik/Nakhoda: Syafi'i * Alamat/Asal: Desa Tanjung Datuk, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 3 GT * No. SIUP/SIPI: - - * Daerah tangkapan: Selat Bengkalis * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/Jumlah Ikan Hasil Tangkapan: ikan terubuk, ikan biang, ikan lomek/ sekitar 5 kg * Koordinat : 1,3704 LU 102,1868 BT</p> <p>L. KM. Rahmad * Nama Pemilik/Nakhoda: Rahmad * Alamat/Asal: Desa Lubuk Muda, Kab. Bengkalis * Ukuran Kapal: 2 GT * No. SIUP/SIPI: - - * Daerah tangkapan: Selat Bengkalis * Alat Tangkap: Jaring * Jenis/Jumlah Ikan Hasil Tangkapan: ikan terubuk/ sekitar 7 kg * Koordinat : 1,3702 LU 102,1880 BT</p> <p>Pengawas perikanan memberikan surat peringatan terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memberikan tempo 30 hari untuk mengurus perizinan. Terhadap 3 unit kapal motor yang telah menangkap ikan terubuk, pengawas perikanan meminta pelaku usaha untuk menandatangani surat pernyataan telah melakukan pelanggaran dan akan dikenakan sanksi peringatan jika dikemudian hari tetap melakukan pelanggaran yang sama. Pertimbangan dari hal tersebut adalah karena Permen KP 210 Tahun 2023 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk baru ditetapkan dan ketentuan waktu larangan terjadi perubahan yang signifikan sehingga masyarakat nelayan belum mengetahuinya;</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Dari temuan saat pengawasan di laut ataupun saat sosialisasi di darat, hampir semua nelayan meminta solusi agar mereka mendapatkan semacam kompensasi atau bantuan alat tangkap lain di saat musim</p> <ul style="list-style-type: none"> - larangan tersebut agar pendapatan mereka tetap ada, terlebih lagi sebagian besar nelayan penangkap terubuk termasuk berpendapatan rendah. 	
5		27 Juni 2024	Bapak Fery Irawan	<p>Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 di</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gampong Sungai Pauh Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa. <p>Hasil pengawasan jenis ikan yang dilindungi dan/atau ikan yang tercantum dalam appendiks CITES pada Fery Anggriawan sudah</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki dokumen perizinan berusaha berupa : NIB (01112200908670001), SIPJI Dalam Negeri (01112200908670001), SAJI DN (01165/SAJI/DN/BPSPL.INI/2024) dan KBLI 47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan <p>Jenis ikan yang diperdagangkan adalah Sirip Hiu yang diperoleh dari supplier di Langsa, Idi dan Lhoksemawe dengan tujuan wilayah pemasaran adalah Medan, Jakarta *Supplier Sirip Hiu sudah terverifikasi oleh tim BPSPL Padang Satker Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil pengawasan terhadap Bapak Fery Anggriawan disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan 	
6		16 Agustus 2024	Muhammad Risky	<p>Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024 di</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dusun Tgk. Muda Leube Gp. Paya Bieng Kec. Jangka Kabupaten Bireun Prov. Aceh <p>Hasil pengawasan jenis ikan yang dilindungi dan/atau ikan yang tercantum dalam appendiks CITES pada Muhammad Risky sudah</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki dokumen perizinan berusaha berupa : NIB (1239000210498), SIPJI Dalam Negeri (161/1/KKP/2021), SAJI DN (00846/SAJI/DN/BPSPL.1/IV/2024) dan KBLI 46216.1 Perdagangan Besar Hasil Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Jenis ikan yang diperdagangkan adalah Sirip Hiu yang diperoleh dari Nelayan yang memiliki kartu tanda pengenal nelayan sipji di Bireun dengan tujuan wilayah pemasaran adalah Medan salah satunya Ke PT. Alam Biru Indonesi 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				Dari hasil pengawasan terhadap Bapak Muhammad Risky disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan	

8.2. Pengawasan Pencemaran Perairan

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1.	Stasiun PSDKP Belawan	14 Maret 2024	PT. Medan Tropical Canning	<p>PT. Medan Tropical Canning terletak di Jl. P. Kangean No. 3-5 KIM I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;</p> <p>Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang unit pengolahan ikan yang melakukan kegiatan pengolahan ikan & udang;</p> <p>Perusahaan ini memiliki NIB nomor 98120101920359 tanggal 5 Sept 2018;</p> <p>UKL UPL nomor : 660/1078/BLH/III/2013 (04 April 2013) diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Medan;</p> <p>Pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan;</p> <p>Hasil uji kualitas air terakhir pada bulan November 2023 menunjukkan hasil tidak melebihi baku mutu air limbah atau berada di bawah nilai ambang batas (NAB).</p>	
2		14-15 Maret 2024	PT. Suryawindu Pertiwi	<p>PT. Surya Windu Pertiwi terletak di Dusun Barat Gampong Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;</p> <p>Perusahaan merupakan Pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan Pembenihan Ikan Laut (Udang Vaname);</p> <p>Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;</p> <p>UKL UPL nomor : 660/186 tanggal 18 September 2024 diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kab. Bireuen;</p> <p>PT. Suryawindu Pertiwi telah melakukan pengelolaan limbah dan melakukan pengecekan kualitas air secara berkala setiap bulannya melalui Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I medan Kemenkes RI;</p> <p>Hasil uji kualitas air terakhir pada bulan September 2023 menunjukkan hasil tidak melebihi baku mutu air limbah atau berada di bawah nilai ambang batas (NAB).</p>	
		26-28 Maret 24	PT. Aquafarm Nusantara	<p>Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan tanggal 26 s.d 28 Maret 2024 di PT. Aquafarm Nusantara yang merupakan unit pembesaran ikan nila (<i>Oreochromis Niloticus</i>) pada lokasi sampling Keramba Jaring Apung (KJA) Pangabatan;</p> <p>PT. Aquafarm Nusantara memiliki dokumen :</p> <p>a.NIB 8120015280138 dengan KBLI 03222 yang terbit tanggal 3 Desember 2018.</p> <p>b. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Nomor 660/4223/K/Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara.</p> <p>c.Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 15 Oktober 2009</p> <p>Perusahaan secara rutin melakukan pengujian kualitas air danau secara internal dan eksternal. Uji kualitas air secara internal dilakukan setiap bulan, sedangkan uji eksternal dilakukan oleh</p> <p>- PT. Citra Lestari Enviro setiap 3 bulan. UPT. Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Samosir dan PT. Beta Julu Enviro Laboratorium melakukan uji kualitas air danau setiap semester;</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
3				<p>Uji kualitas air secara mandiri dilakukan terakhir pada bulan Februari 2024, PT. Citra Lestari Enviro bulan Desember 2023, UPT. Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Samosir bulan Oktober 2023 dan PT. Beta Julu Enviro Laboratorium pada bulan November 2023. Dimana semua hasil uji yang dilakukan tiap parameter dibawah baku mutu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Aquafam Nusantara rutin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Gubernur Sumatera Utara setiap enam bulan sekali. <p>Upaya perusahaan untuk menjaga kualitas air danau dilakukan dengan cara: Menggunakan pakan terapung, penggunaan jala ganda, pengambilan ikan mati, pemantauan kualitas air yang bekerjasama dengan Wagenigen University (Belanda) serta bekerja sama dengan World Wide Fund for Nature (WWF) melalui Tilapia Aquaculture Dialogue;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3, dan menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga yang telah memiliki izin yaitu PT Amindy Barokah Medan - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Aquafarm Nusantara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. - Dalam pengelolaan kualitas air Danau Toba, diperlukan sinergi dari pemerintah pusat dan daerah dalam pelestarian populasi ikan bilih (<i>Mystacoleucus padangensis</i>) di danau Toba, menerbitkan regulasi tentang alat penangkapan ikan, dan musim penangkapan. Ikan bilih merupakan herbivor yang memakan algae, sehingga berperan untuk pemulihan kualitas air danau. Saat ini penangkapan ikan bilih sudah over fishing. Perusahaan siap mendukung pemerintah dan berpartisipasi dalam restocking dan pelestarian ikan bilih di Danau Toba. 	
4		26/03/2024	PT. Fuda Sari Laut	<p>Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan tanggal 26 Maret 2024 di PT. Fuda Sari Laut yang merupakan Unit Pengolahan Ikan yang melakukan kegiatan Pembekuan Ikan dan Biota Air Lainnya.</p> <p>PT. Fuda Sari Laut memiliki dokumen perizinan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.NIB: 8120315120371 terbit tanggal 7 November 2018 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; - b.UKL-UPL Nomor: TL.T/439/VII/2018 terbit tanggal 8 Agustus 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang; c.IMB Nomor: 506.607/4708 tanggal 14 Desember 1989 diterbitkan oleh Sekretariat Wilayah Kabupaten Deli Serdang; d.Izin Lingkungan Nomor: 503.570/0172/IL/DPMPPTSP-DS/IX/2018 diterbitkan tanggal 18 Kabupaten Deli Serdang. 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada PT Fuda Sari Laut tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungan;</p> <p>Terkait pengujian kualitas air pada limbah pembuangan dan pengelolaan limbah B3, pengawas perikanan memberikan arahan agar segera dilakukan pengujian kualitas air pada air limbah setiap sebulan sekali dan menyerahkan limbah B3 ke Perusahaan yang memiliki izin agar limbah B3 tidak disalah gunakan.</p>	
5		27/03/2024	PT. Seafood Sumatera Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dilaksanakan tanggal 27 Maret - a.NIB : 8120002962402 terbit tanggal 20 Septamber 2018 - dilakukan treatment menggunakan bakteri pengurai secara berurutan dan kemudian dengan perizinan serta tersedia fasilitas pencegahan pencemaran. PT Seafood Sumatera - Untuk limbah padat seperti kepala, kulit sisik ikan diambil oleh teknisi (pihak ketiga) - Tidak ditemukan indikasi pelanggaran 	
6		27/03/2024	PT. Anugerah Global Maju	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Anugerah Global Maju (AGM) beralamat di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, 0222000941478001 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pengujian atas kualitas air dilakukan baik oleh Lab. PT Mabar Feed Indonesia dan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis secara berkala. Hasil yang diperoleh adalah tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran; - penerbit Izin untuk dapat memantau perkembangan jumlah dan luasan kolam tambak milik 	
7		27/03/2024	Koperasi Produsen Bumi Sukses Bersama	<p>Koperasi Produsen Bumi Sukses Bersama yang beralamat di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Koordinat 1. 606200N 102.820070N). Dengan usaha KBLI 03254-Pembesaran Crustacea Air Payau</p> <p>Koperasi ini Telah memiliki NIB Nomor 0112230024743, Sertifikat Standar Nomor 0112230024743001 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>Pengujian atas kualitas air dilakukan baik oleh Lab. PT Indojoya Agrinusa dan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis secara berkala. Hasil yang diperoleh adalah tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran</p> <p>Dari hasil PULBAKET bersama ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selaku Instansi penerbit Izin untuk dapat memantau perkembangan jumlah dan luasan kolam tambak milik perusahaan ini, karena apabila telah melebihi 10 Ha, maka dokumen lingkungan yang dipergunakan tidak lagi SPPL, namun berubah menjadi UKL-UPL</p>	
8		25 April 2024	PT. Marindo Utama Lestari	<p>Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau</p> <p>PT. Marindo Utana Lestari ini telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120209992037 tanggal 23 September 2019</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT. Marindo Utana Lestari diperoleh hasil bahwa usaha sesuai dalam kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Permen LHK Nomor : 4 tahun 2021 bahwa PT. Marindo Utana Lestari Bersama dengan kode KBLI 03254 Kegiatan Pembesaran Crustacea Air Payau memiliki luas dibawah 50 Ha termasuk dalam Skala izin UKL-UPL.</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan di PT. Marindo Utana Lestari diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan/kegiatan tidak ada pencemaran. 	
9		25 April 2024	CV. PRIMA VANAME SEJAHTERA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau - CV. Prima Vaname Sejahtera ini telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 0806220072952 tanggal 8 Juni 2022 - Pihak CV. Prima Vaname Sejahtera melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala melalui Laboratorium kualitas air PT. Central Proteina Prima. Usaha ini memiliki 03254 - Pembesaran crustacean air payau. <p>Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di CV. Prima Vaname Sejahtera diperoleh hasil bahwa usaha sesuai dalam kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Permen LHK Nomor : 4 tahun 2021 bahwa CV. Prima Vaname Sejahtera Bersama dengan kode KBLI 03254 Kegiatan Pembesaran Crustacea Air Payau memiliki luas dibawah 10 Ha termasuk dalam Skala izin SPPL.</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan di CV. Prima Vaname Sejahtera diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan/kegiatan tidak ada pencemaran. 	
10		16 Mei 2024	PT. HALINDO BERJAYA MANDIRI	<p>Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 di lokasi Jl. Burhanuddin Lk. II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara</p> <p>PT. Halindo Berjaya Mandiri ini telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120101890393, telah memiliki UPL-UKL, Memiliki Izin Lingkungan.</p> <p>Pemenuhan dan/atau kesesuaian persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam dokumen rencana pencegahan pencemaran Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengawasan yaitu: sesuai terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dengan (UKL-UPL) dan tidak ada dugaan pencemaran. <p>Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan di Tanjungbalai kepada PT. Halindo Berjaya Mandiri diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan/kegiatan tidak ditemukan pencemaran. 	
11		19 June 2024	PT. Mutiara Laut Abadi	<p>Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan tanggal 20 Juni 2024 di PT. Mutiara Laut Abadi yang bergerak di bidang pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB 8120216151849 dengan KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan), 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya), dan telah memiliki UKL-UPL serta Izin Lingkungan. - Perusahaan secara rutin melakukan pengujian kualitas air baik mandiri, maupun oleh pengelola IPAL terpadu Kawasan Industri Medan. 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>PT. Mutiara Laut Abadi rutin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang setiap enam bulan sekali.</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Mutiara Laut Abadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	
12		21 Juni 2024	PT. Winson Prima Sejahtera	<p>Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024 di PT Winson Prima Sejahtera yang berada di KIM II, Jl. P. Solor II, No. 11/12, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.</p> <p>Perusahaan telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 9120303362805, Izin Lingkungan dan UKL/UPL.</p> <p>Adapun pengelolaan limbah PT Winson Prima Sejahtera dilaksanakan secara terpadu oleh pihak Kawasan Industri Medan, namun perusahaan ini memiliki bak pengendapan sebanyak 5 buah bak sebagai tahap awal pengelolaan limbah. Untuk sampah produksi diangkut setiap hari, sedangkan limbah B3 dibuang setelah penampungan penuh. Kedua limbah tersebut dikelola oleh pihak ketiga.</p> <p>Laporan pengujian kualitas air terakhir pada tanggal 20 Desember 2023 dengan No. 480-2/A/ENVIRO/XII/2023 yang dilakukan oleh PT Citra Lestari En.viro – Pro Enviro Laboratorium menunjukkan hasil yang masih berada di batas baku mutu</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan, dokumen rencana pencegahan pencemaran telah sesuai dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	
13		25-26 Juni 2024	PT. Suri Tani Pemuka	<p>Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang dilaksanakan tanggal 25-26 Juni 2024 di PT. Suri Tani Pemuka yang merupakan Pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan Pembenihan Ikan Laut (Udang Vaname).</p> <p>PT. Suri Tani Pembuka memiliki dokumen perizinan berupa, NIB: 8120001702648, UKL/UPL dan Izin Lingkungan.</p> <p>PT. Suri Tani Pembuka telah melakukan pengelolaan limbah secara mandiri dengan melakukan pengecekan kualitas air secara berkala setiap bulannya melalui Laboratorium dan menyampaikan Hasil Laporan UKL-UPL Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya setiap semester.</p> <p>Hasil uji kualitas air terakhir pada bulan Mei menunjukkan hasil tidak melebihi baku mutu air limbah atau berada di bawah nilai ambang batas (NAB).</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.</p>	
		26 June 2024	PT. Global Pasific Seafood Industry	<p>Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan tanggal 26 Juni 2024 di PT. Global Pasific Seafood Industry yang bergerak di bidang pengolahan dan pengawetan ikan.</p> <p>Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen meliputi NIB, Izin lingkungan, Dokumen UKL/UPL, Hasil Uji kualitas air serta survey lapangan.</p> <p>PT. Global Pasific Seafood Industry memiliki dokumen :NIB 8120108860184, UKL/UPL dan Izin Lingkungan</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>PT. Global Pasific Seafood Industry melakukan pengujian kualitas air secara terpadu yang dilakukan oleh UPL – II PT. KIM. Hasil laporan uji kualitas air limbah terakhir pada bulan April 2024 dengan hasil dibawah baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan PT. Global Pasific Seafood Industry sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran</p>	
15		27 -28 Juni 2024	PT. Suri Tani Pemuka	<p>Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah dilaksanakan tanggal 27 Juni 2024 di PT. Suri Tani Pemuka yang merupakan unit pengolahan ikan yang melakukan kegiatan pengolahan ikan tilapia.</p> <p>PT. Suri Tani Pemuka memiliki dokumen : NIB 8120001702648, UKL/UPL dan Izin Lingkungan</p> <p>PT. Suri Tani Pemuka memiliki IPAL Mandiri dengan kapasitas sekitar 3.562 m³. Perusahaan melakukan langkah pengendapan, pengadukan dan penyaringan air limbah sebelum dialirkan ke parit. Pada saat pemeriksaan, IPAL dioperasikan dengan baik dan air buangan yang keluar dari outlet terlihat jernih dan tidak berbau</p> <p>Limbah cair perusahaan ini merupakan limbah organik berupa hasil pencucian ikan. Pengujian sample mutu air limbah per 6 bulan sekali. Pengujian dilakukan di PT. Atmos Laboratorium Indonesia.</p> <p>Hasil uji kualitas air terakhir pada bulan Mei 2024 menunjukkan hasil semua parameter memenuhi standard, tidak melebihi baku mutu air limbah atau berada di bawah nilai ambang batas (NAB).</p> <p>PT. Suri Tani Pemuka memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3, kemudian limbah B3 berupa oli, dan pada saat penggantian limbahnya langsung diambil oleh pihak ketiga.</p> <p>Tidak ditemukan indikasi pelanggaran</p>	
16		22 - 23 Juli 2024	PT. Suri Tani Pemuka	<p>Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juli 2024 di KJA Tambun Raya, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara</p> <p>PT Suritani Pemuka memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001702648, UKL/UPL dan izin Lingkungan</p> <p>Kegiatan Usaha PT Suritani Pemuka merupakan kegiatan pembesaran ikan nila dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) dengan luas 2,49 Ha. Kuota produksi sesuai izin sebesar 10.000 MT/Tahun, Jumlah Produksi pada Tahun 2022 sebesar 9.407 MT dan Tahun 2023 sebesar 9.649 MT, sedangkan produksi pada tahun 2024 hingga semester I yaitu 5.843.668,48 Kg</p> <p>PT Suritani Pemuka melakukan pengujian sampel air yang dilakukan tiap semester yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan PT Betajulu Enviro Laboratorium. Pada semester I Tahun 2024 dilakukan pada Tanggal 23 Februari 2024, dengan parameter uji antara lain : pH (berada pada range baku mutu), COD (diatas baku mutu), dan BOD, TSS, NH3-N, NO3-N, Cl2, PO4, Total Coliform, Fecal Coliform (dibawah baku mutu)</p> <p>Tidak ditemukan indikasi pelanggaran</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
17		24 - 25 Juli 2024	UD Pangkai Na	<p>Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanggal 24 s.d 25 Juli 2024 di Dusun Barat Gampong Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh - UD. Pangkai Na memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 03082300937840001, dan SPPL UD. Pangkai Na mempunyai saluran pembuangan dan kolam penampungan dalam pengelolaan - limbah hasil pembuangan kegiatan pengolahan ikan bandeng tanpa duri sehingga tidak terjadinya pencemaran ke perairan umum <p>Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan di UD Pangkai Na Nurmasiyah diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan/kegiatan tidak ada pencemaran 	
18		24 July 2024	PT. Bumi Menara Internusa	<p>Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan pada tanggal 24</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juli 2024 di PT. Bumi Menara Internusa Jln. Pulau Sumbawa Kawasan Industri Medan 2, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara - NIB 81202029990554, UKL/UPL, dan Izin Lingkungan <p>Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) PT. Bumi Menara Internusa dikelola terpadu oleh KIM. Dimana pihak KIM melakukan pemeriksaan kualitas air sebanyak setiap bulan pada bak penampungan sementara sebelum akhirnya disalurkan melalui pipa saluran perusahaan yang terhubung dengan IPAL terpadu KIM. Adapun titik koordinat pengambilan sampel air limbah PT. Bumi Menara Internusa yaitu Garis lintang (latitude) 3,4062137 dan garis bujur (longtitude) 98,411922</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan di Internusa Jln. Pulau Sumbawa Kawasan Industri Medan 2, Kabupaten Deli 	
19		26 July 2024	PT. Red Ribbon Indonesia	<p>Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanggal 26 Juli 2024 di PT PT. Red Ribbon Indonesia yang berlokasi di Jalan Sulawesi Kawasan Industri Medan I (KIM), Mabar, Medan Deli, Sumatera Utara - (NIB): 8120004872553, UKL/UPL dan Izin Lingkungan <p>Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa PT. Red Ribbon Indonesia telah melakukan pengelolaan limbah dengan baik, dimana limbah tersebut telah dialirkan melalui pipa ke tempat IPAL terpadu KIM. Pihak KIM melakukan pemeriksaan kualitas air sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu.</p> <p>Jenis IPAL PT BMI adalah jenis IPAL terpadu yang dimiliki dan di kelola oleh Kawasan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medan (KIM). Semua limbah cair yang dihasilkan dalam kegiatan produksi di PT. Red Ribbon Indonesia, ditampung pada bak penampungan terlebih dahulu dengan melakukan penyaringan dengan aerasi yang selanjutnya akan disalurkan ke IPAL terpadu Kawasan Industri Medan <p>Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan di PT. Red Ribbon Indonesia diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan/kegiatan tidak ada pencemaran. 	
		20 Agustus 2024	PT. Ayu Bumi Sejati	<p>Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan pada tanggal 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agustus 2024 di PT. Ayu Bumi Sejati, Jalan Medan-Belawan KM. 17,5 , Medan Labuhan, Kota Medan 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
20				<p>1. Persetujuan Bangunan Gedung: Nomor SK-PBG-127113-11112022-001 tanggal 11 November 2022;</p> <p>2. UKL-UPL : Nomor 660/5017/BLH/XI/2011 tanggal 3 Oktober 2011; dan</p> <p>3. NIB Nomor 0220107641955 tanggal 15 Juni 2020.</p> <p>Pada saat ini penanganan limbah cair adalah proses pengendapan dan penyaringan karena pada dasarnya limbah cair yang dihasilkan adalah air hasil pencucian bahan baku, pencucian lantai dan pembersihan diri. Proses pengendapan dan penyaringan dilakukan pada bak penampungan di masing-masing proses yaitu di unit proses kodok dan unit proses udang. Air limbah setelahnya disaring selanjutnya dialirkan ke badan air Sungai Deli. Proses penanganan air limbah selanjutnya adalah dengan menggunakan metode koagulasi/flokulasi dan proses oksidasi sehingga diharapkan air limbah yang dibuang layak dibuang ke badan air. Limbah padatan berupa kepala maupun cangkang diambil langsung oleh pihak ketiga untuk diolah kembali menjadi pakan ternak.</p> <p>- dilaksanakan di PT. Ayu Bumi Sejati diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan/kegiatan</p>	
21		21/08/2024	PT. Sumber Usaha Nusantara	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 di PT. Sumber Usaha Nusantara, Jl. Kapten Rahmadbudin, Gg. Puskesmas LK.13 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota.Medan, Provinsi. Sumatera Utara.</p> <p>1. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha (PPKPLH) dengan Nomor: 07062201112710036 tanggal 7 Juni 2022, 19092201112710170 tanggal 19 September 2022, 19092201112710175 tanggal 19 September 2022, 19092201112710174 tanggal 19 September 2022, 19092201112710169 tanggal 19 September 2022 19092201112710168</p> <p>- dikeluarkan tanggal 19 September 2022 oleh Walikota Medan;</p> <p>2. SPPL Nomor 660/3394 dikeluarkan tanggal 20 Juli 2020 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;</p> <p>3. NIB 0220104622534 diterbitkan tanggal 23 Juni 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).</p> <p>PT. Sumber Usaha Nusantara memiliki 7 bak control sebelum air limbah di alirkan ke sungai atau pembuangan akhir. PT Sumber Usaha Nusantara juga memiliki ruang limbah B3, dan limbahnya di ambil oleh pihak ke tiga. Setiap bulan PT Sumber Usaha Nusantara rutin melakukan uji air limbah dan hasil terakhir bulan Mei 2024 dengan hasil dibawah baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Permen LH RI nomor 05 tahun 2014 Lampiran XIV. PT. Sumber Usaha Nusantara juga sudah patuh dalam menyampaikan laporan tiap semester ke Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Sumber Usaha Nusantara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	
		27/08/2024	PT. Anugerah Alam Industri	<p>Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannyadilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 di PT. ANUGERAH ALAM INDUSTRI, Jl. Jala IV Nomor 32, Lingk. III, Desa/Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
22				<p>1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPRL) tidak ada;</p> <p>2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor: 648/1106 dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2012 oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan; b. Nomor: 648/838/C dikeluarkan tanggal 24 Juni 2015 oleh Walikota Medan; c. Nomor: 648/1034/C dikeluarkan tanggal 19 Desember 2016 oleh Walikota Medan; <p>3. UKL-UPL Nomor 0032/2.3/0202/05/2019 dikeluarkan tanggal 17 Mei 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;</p> <p>4. NIB 91202042000489 diterbitkan tanggal 08 Februari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).</p> <p>Limbah cair perusahaan ini merupakan limbah organik berupa hasil pencucian ikan & udang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sample air limbah diambil & diperiksa oleh pihak ketiga setiap bulan dan perusahaan melakukan pengujian sample mutu air limbah per bulan secara mandiri. <p>Hasil laporan uji kualitas air limbah terakhir pada bulan Juni 2024 dengan hasil dibawah baku mutu untuk 6 parameter yang di uji berdasarkan air limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Permen LH RI nomor 05 tahun 2014 Lampiran XIV.</p> <p>PT. AAI rutin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan setiap enam bulan sekali, terakhir di laporkan tanggal 1 Agustus tahun 2024.</p> <p>Untuk limbah padat seperti kepala ikan ditampung dan diambil oleh pihak ketiga, sedangkan untuk Limbah padat disimpan dahulu di tempat penampungan limbah B3 yang kemudian akan diambil oleh pihak ketiga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Anugerah Alam Industri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. 	
23		28/08/2024	PT. Bahari Makmur Sejati	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 di PT. Bahari Makmur Sejati Jl. Pulau Sumatera No. 13 KIM-I, Medan, Provinsi Sumatera Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 5 Oktober 2015 oleh Walikota Medan; 2. UKL-UPL Nomor 660/1965/BLH/VI/2013 diikeluarkan tanggal 18 Juni 2013 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan; 3. NIB 8120316002347 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2015 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). <p>Berdasarkan hasil Wawancara dan pengamatan di lapangan, PT. Bahari Makmur Sejati memiliki tempat penampungan air limbah semetara dan 10 bak control pembuangan air limbah sebelum di alirkan ke saluran penampungan air limbah Kawasan Industri Medan, PT Bahari Makmur Sejati juga memiliki ruang limbah B3 yang dikelola langsung oleh pihak ke tiga. PT. Bahari Makmur Sejati juga sudah patuh dalam menyampaikan laporan tiap semester ke Dinas Lingkungan Hidup, Kota Medan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Bahari Makmur Sejati sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
24		28/08/2024	PT. Sorby Internasional Medan	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 di PT. Sorby Internasional Medan, Jl. Pulau Irian, Kawasan Industri Medan, Kel. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB nomor 9120105192189 dengan KBLI 10213 (Industri pembekuan ikan), 10213 (Industri Pembekuan Ikan), 46206 (Perdagangan besar hasil perikanan), yang terbit tanggal tanggal 28 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).; 2. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 14 Agustus 2018. 3. UKL-UPL/DPLH Rekomendasi DPLH dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang nomor: TL.P/122/II/2018, tanggal 28 Februari 2018. 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati Kab Deli Serdang Nomor : 503.647/1456/DPUDS. Tanggal 25 Agustus 1995 <p>PT. Sorby Internasional Medan memiliki 6 bak control sebelum air limbah di alirkan ke saluran penampungan air limbah Kawasan Industri Medan. PT Sorby Internasional Medan juga memiliki ruang limbah B3, dan limbahnya di ambil oleh pihak ke tiga. Setiap bulan PT. Sorby Internasional Medan rutin melakukan uji air limbah dengan hasil dibawah baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Permen LH RI nomor 05 tahun 2014 Lampiran XIV. PT. Sorby Internasional Medan juga sudah patuh dalam menyampaikan laporan tiap semester ke Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Sorby Internasional Medan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	
25		12 September 2024	PT. Toba Surimi Industries	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024 di PT. Toba Surimi Industries Jl. Pulau Sumatera, MABAR, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 9 Desember 2016 oleh Gubernur Sumatera Utara; 2. UKL-UPL Nomor 660/5330/BLH/XII/2016 diikeluarkan tanggal 9 Desember 2016 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan; 3. NIB 8120002702482 diterbitkan tanggal 28 Juli 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). <p>Berdasarkan hasil Wawancara dan pengamatan di lapangan, PT. Toba Surimi Industries memiliki 3 bak control penampungan air limbah semetara sebelum di alirkan ke saluran penampungan air limbah Kawasan Industri Medan, Perusahaan juga telah memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang pengelolaannya sudah bekerjasama dengan pihak ketiga. Setiap bulan PT Toba Surimi Industries rutin melakukan uji air limbah secara mandiri dan hasil pengujian air limbah terakhir bulan September 2024 dengan hasil dibawah baku mutu air limbah bagi usaha.</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Toba surimi industries sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
26		13 September 2024	PT. SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024 di PT. Seafood Samudera Pasific (SSP), Jl. Gabion No. 15, Kel, Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB 8120108841644 dengan KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya), 10293 (Industri Pembekuan Ikan) dan 46206 dan (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) nomor 660/0627 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 11 Februari 2021. 3. Izin Lingkungan dari Walikota Medan yang terbit tanggal 18 November 2014 <p>Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, PT SSP berasal dari hasil pencucian dan pengolahan hasil perikanan dengan kisaran 100-150 m3 dengan kapasitas bak penampungan air limbah dengan 7 bak sebesar 540 m3. Perusahaan sudah memiliki IPAL yang dikelola secara mandiri. Perusahaan secara rutin melakukan pengujian kualitas air secara mandiri. ui kualitas air limbah dilakukan setiap bulan sekali dan hasil terakhir bulan Juli 2024 dengan hasil dibawah baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Permen LH RI nomor 05 tahun 2014 Lampiran XIV oleh PT. Sucofindo.</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. SSP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	
		19 September 2024	PT. MARINE MAJU PERKASA	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 di PT. Marine Maju Perkasa Jl. Pulau Solor, KIM 2, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB dengan nomor 0109220000393 yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2022 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; 2. RKL-RPL RINCI Nomor S-17/CEOF/RKL-RPL/0723 diikeluarkan tanggal 31 Juli 2023 oleh PT. Kawasan Industri Medan; 3. Sertifikat Standar dengan nomor 523.2/P2HP/003/V/2023 yang diterbitkan oleh oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; 4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan nomor: SK-PBG-120726- 04122023-001 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab. Deli Serdang). 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
27				<p>Berdasarkan hasil Wawancara dan pengamatan di lapangan, PT. Marine Maju Perkasa memiliki 4 bak pembuangan air limbah sebelum di alirkan ke saluran penampungan air limbah Kawasan Industri Medan yang merupakan bak pengendapan dan bak penyaringan. Adapun kapasitas bak tersebut ialah 30 m3, dengan hasil air limbah yang dikelola sebesar 27,7 m3 per hari. Limbah padat dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Marine Maju Perkasa terdiri dari bagian tubuh ikan berupa kepala, tulang, ekor, insang, dan jeroan yang setiap hari diangkut oleh pihak ketiga. Limbah cair perusahaan ini berasal dari hasil pencucian, pembilasan produk, pembersihan lantai dan peralatan produksi. PT Marine Maju Perkasa rutin melakukan uji air limbah dan Uji terakhir dilakukan pada bulan Juli 2024, dimana hasilnya menunjukkan semua parameter yang diuji tidak melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah atau berada di bawah nilai ambang batas (NAB). - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT Marine Maju Perkasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. 	
28		26 September 2024	PT. Aneka Sari Utama	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 di PT. Aneka Sari Utama, Jl.Pulau Halmahera Kawasan Industri Medan 3, Kel/Desa Pematang Johar, Kec.Labuhan Deli, Kab.Deli Serdang. Prov Sumatera Utara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB nomor 8120012110246 dengan KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan), 46206 (Perdagangan besar hasil perikanan), yang terbit tanggal tanggal 4 November 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).; 2. Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari Keputusan Direktur Utama PT. Kawasan Industri Medan NOMOR: S-16/CEO/RKL-RPL/0524, tanggal 20 Mei 2024; - 3. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dari Bupati Deli Serdang tanggal 26 September 2024; 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bupati Deli Serdang tanggal 26 September 2024; 5. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Nomor : 193/HGB/BPN-12.07/10/2017. Tanggal 25 Oktober 2017. <p>Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, PT. Aneka Sari Utama memiliki 3 bak control sebelum air limbah di alirkan ke saluran penampungan air limbah Kawasan Industri Medan. PT Aneka Sari Utama juga memiliki ruang limbah B3, dan limbahnya di ambil oleh pihak ke tiga. PT. Aneka Sari Utama Belum melakukan uji air limbah di karenakan PT. Aneka Sari Utama belum melakukan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Aneka Sari Utama belum beroperasi tetapi dokumen pencegahan pencemaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. 	
		3 Oktober 2024	CV. Golden Seafresh	<p>Pengawasan pencemaran perairan akibat perikanan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024 di CV. Golden Seafresh Jl. Kapten Rahmad Buddin LK.14, Desa/Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
29				<p>1. Izin Lingkungan Nomor 0036/0032/2.3/0203/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>2. UKL-UPL Nomor 660/2276 dikeluarkan tanggal 27 April 2020 oleh DinasLingkungan Hidup Pemko Medan;</p> <p>3. NIB 8120017221293 diterbitkan tanggal 19 Desember 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).</p> <p>Berdasarkan hasil Wawancara dan pengamatan di lapangan. CV. Golden Seafresh memiliki bak kontrol penampungan air limbah sementara tujuan dari bak kontrol tersebut untuk mengendapkan dan memisahkan limbah padat yang bercampur dengan limbah cair untuk pada akhirnya limbah cair dibuang ke selokan yang mengalir ke sungai. Perusahaan juga telah memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang pengelolaannya sudah bekerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengujian kualitas air yang dilakukan oleh PT. Betajulu Enviro Laboratorium dengan hasil masih di bawah baku mutu.</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan CV. Golden Seafresh sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	
30		15 Oktober 2024	PT. Toba Surimi Industries	<p>Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2024 Jl. Pulau Pinang II, Kawasan Industri Medan II, Kel. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara</p> <p>1. NIB 8120002702482 yang terbit tanggal tanggal 28 Juli 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).</p> <p>2. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Deli Serdang dengan nomor surat rekomendasi: 660.P/735/660.1/DS/2012 tanggal 13 April 2012.</p> <p>Air limbah di PT. Toba Surimi Industries berasal dari hasil pencucian dan pengolahan hasil perikanan dengan kisaran 100.000 liter per hari dengan kapasitas bak penampungan air limbah 172.000 liter. Perusahaan sudah memiliki IPAL yang dikelola bersama KIM. Perusahaan secara rutin mengelola dan melakukan pengujian kualitas air limbah secara mandiri. Uji kualitas air limbah dilakukan setiap enam bulan sekali</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran yang dilakukan PT. Toba Surimi Industries sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan pencemaran akibat kegiatan perikanan.</p>	
		13 November 2024	PT. Aquafarm Nusantara Serdang Bedagai	<p>Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 di PT. Aquafarm Nusantara yang merupakan unit pembenihan ikan nila (<i>Oreochromis Niloticus</i>)</p> <p>PT. Aquafarm Nusantara memiliki dokumen :</p> <p>a.NIB 8120015280138 dengan KBLI 03222 yang terbit tanggal 3 Desember 2018.</p> <p>b. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Nomor 660/4223/K/Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara.</p> <p>c.Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 15 Oktober 2009</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
31				<p>Air limbah di PT. Aquafarm Nusantara berasal dari hasil pencucian pengolahan hasil perikanan dan Air Hasil Budidaya Ikan dan di olah di IPAL mandiri dengan pencegahan pencemaran sesuai dokumen DPPL. IPAL terdiri dari 10 petak penampungan dengan kapasitas petak yang berbeda-beda. Total luasan IPAL sekitar 47.102 m². Total debit air limbah rata-rata 138,9 m³ per hari. Pengelolaan air limbah dilakukan secara terpadu antara limbah dari proses pengolahan dan pembenihan</p> <p>Perusahaan secara rutin melakukan pengujian kualitas air secara internal dan eksternal. Uji kualitas air secara internal dilakukan setiap bulan, sedangkan uji eksternal dilakukan oleh PT. Beta Julu Enviro Laboratorium uji kualitas air setiap semester. Uji kualitas air secara mandiri dilakukan terakhir pada bulan Februari 2024, PT. Beta Julu Enviro Laboratorium pada bulan Juli 2024. Dimana semua hasil uji yang dilakukan tiap parameter dibawah baku mutu</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Aquafarm Nusantara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.</p>	

8.3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1	Stasiun PSDKP Belawan	16 Februari 2024	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut PT. Kawasan Industri Dumai (KID)	<p>PT. Kawasan Industri Dumai (KID) merupakan kompleks industri yang dikelola oleh PT. KID itu sendiri. Memiliki NIB Nomor 8120202951843 dengan KBLI 68130-Kawasan Industri dan KBLI 35101-Pembangkit Tenaga Listrik, dan merupakan perusahaan dengan kategori* Penanaman Modal Asing (PMA)* . PT. KID merupakan Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 805/M-IND/Kep/12/2017</p> <p>PT KID juga telah memiliki Izin Lingkungan Nomor 296/KLH/2013 dari Walikota Dumai, dan PT. Kawasan Industri Dumai Telah memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 28092210511400003, Tanggal 28 September 2022 dengan luas area 23,70 Ha.</p> <p>PT. Kawasan Industri Dumai dinilai telah melaksanakan semua kewajiban kecuali membuat Laporan tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada menteri, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Hak dan Kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PKKPRL. Adapun Laporan ini selanjutnya di-update oleh perusahaan telah dikirimkan pada Hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan</p> <p>Berdasarkan Hasil pemeriksaan di lapangan, seluruh bangunan fisik dermaga TERSUS milik PT.KID benar berada dalam koordinat PKKPRL. Sedangkan pipa intake air laut yang dahulu dipergunakan pendingin turbin tenaga listrik sudah tidak lagi dipergunakan, sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk mengurus izin penggunaan air laut selain energy (ALSE);</p> <p>Polsus PWP3K tidak menemukan adanya pelanggaran.</p>	
		27 February 2024	EMP Gebang Ltd	<p>Kantor EMP Gebang Ltd. yang berlokasi di Kab. Langkat, sedangkan pengembangan lapangan migas berlokasi di Desa Bubun, Kec. Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Prov. Sumatera Utara;</p> <p>Nomor: 11012210511200001 yang diterbitkan a.n Menteri Kelautan dan</p> <p>Adapun Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ialah 35115</p> <p>Memiliki Surat Rekomendasi Gubernur No: 522/529 perihal : Rekomendasi</p> <p>SK Persetujuan Amdal No: SK.1042/MENLHK/SETJEN/PLA.4/9/2023 tanggal 25</p> <p>Luas lapangan migas yang akan dikembangkan adalah adalah 4,84 Ha</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
2				<p>Pemeriksaan ke lapangan sesuai titik koordinat perizinan PKKPR, belum ada realisasi fisik dikarenakan perizinan kegiatan reklamasi masih berproses di Dit Jasa Kelautan, Ditjen PRL. Progres kegiatan EMP Gebang dalam Pengembangan Lapangan Migas Sicanggang sampai dengan saat ini sampai pada tahap</p> <ul style="list-style-type: none"> - membangun infrastruktur jalan dan pembangunan jalan penghubung melewati hutan, yang dijadwalkan selesai bulan Juni. Untuk perencanaan reklamasi dijadwalkan bulan Juni menunggu terbitnya izin reklamasi. <p>Proses Pengembangan Lapangan Migas Sicanggang EMP Gebang berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - reklamasi sampai saat ini berproses sampai tahap asistensi terakhir dari TIM KKP PUSAT dalam rangka penerbitan izin reklamasi. <p>BUT EMP Gebang sudah menyampaikan laporan tahunan secara tertulis tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023, tetapi laporan tahun 2024 belum disampaikan. Polsus PWP3K sudah menyampaikan supaya BUT EMP Gebang segera menyampaikan laporan tahunan. Note: Laporan Tahun 2024 sudah di laporkan tertanggal 29 Feb 2024. 	
3		02 s.d 4 April 2024	PT. Pertamina Patra Niaga Kreung Raya	<p>Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan pada Tanggal 02 s.d 4 April 2024 di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh <p>Nomor Induk Berusaha (NIB):8120200840621 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2018, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 46610 dengan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha: Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI <p>PT. Pertamina Patra Niaga memiliki 3 Dokumen Persetujuan Kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) a. Nomor PKKPR 03052310511100005 yang terbit tanggal 03 Mei 2023 dengan Panjang 0.39 Km dengan kedalaman 30 meter. Detail kegiatan usaha Pkkprl - Pemasangan Submarine Pipeline 1 Fuel Terminal Krueng Raya di perairan selat malaka termasuk dalam Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) Zona Pelabuhan sub Zona DLKr/DLKp b. Nomor PKKPR 03052310511100006 yang terbit tanggal 03 Mei 2023 dengan Panjang 0.39 Km dengan kedalaman 30 meter. Detail kegiatan usaha Pkkprl - Pemasangan Submarine Pipeline 2 Fuel Terminal Krueng Raya di perairan selat malaka termasuk Zona Pelabuhan sub Zona DLKr/DLKp, dan memiliki izin lingkungan nomor: SK.5857/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2022 tanggal 04 juli 2022 Oleh KemenLHK c. Nomor PKKPR 03052310511100007 yang terbit tanggal 03 Mei 2023 dengan Luas 13,05 Ha dengan kedalaman 12 meter. Detail kegiatan usaha Pkkprl - Pengembangan Fuel Terminal Krueng Raya di perairan selat malaka termasuk Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) Zona Pelabuhan sub Zona DLKr/DLKp 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Kegiatan Submarine Pipeline\ pipa bawah laut Fuel Terminal Krueng Raya posisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - pipa bahwa laut belum terdaftar di hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) <p>PT. Pertamina Patra Niaga Kreung Raya segera menyampaikan Laporan Tahunan Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa</p> <ul style="list-style-type: none"> - berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 03 mei 2024. <p>PT Pertamina segera Melakukan Pendaftaran sistem E-Pipakabel untuk mekanisme penyelenggaraan pendiri atau penempatan bangunan dan intalasi di laut, sistem ini merupakan penjabaran dan implementasi dari keputusan Menteri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelautan dan Perikanan No. 42 tahun 2022 tentang mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut 	
4		24 April 2024	PT.PLN Pangkalan Susu	<p>Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 di</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Desa Pulau Sembilan, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara <p>PT. PLN sudah memilki izin PKKPRIL Nomor 17122110511200001, terbit tanggal 16 Desember 2021 dengan kode KBLI 35115, untuk kegiatan interkoneksi kabel laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20kV Pulau Sumatera - Pulau Sembilan dengan panjang kabel 0,75 Km dan kedalaman 15 m. <p>Dalam pemeriksaan perusahaan telah memiliki keabsahan dokumen diantaranya yaitu persetujuan konfirmasi KKPRL, Izin lingkungan, dan izin pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - dengan titik koordinat, peta dan panjang pemasangan kabel sesuai lampiran KKPRL telah sesuai. Tim melakukan pemeriksaan sampling kesesuaian dari 23 titik koordinat pada lampiran PKKPRIL. <ul style="list-style-type: none"> - PT PLN telah melaksanakan 16 kewajiban pemegang PKKPRIL termasuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri setiap satu tahun. <p>Pemanfaatan Ruang Laut pada PT PLN untuk kegiatan interkoneksi kabel laut 20kV Pulau Sumatera - Pulau Sembilan telah memiliki dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan/KKPRL yang absah dan dilakukan dilokasi yang sesuai peruntukannya. 	
		23 April 2024	PT. Adhitya Serayakorita	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut terhadap PT. Adhitya Serayakorita Kota Dumai Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024. <p>PT. Adhitya Serayakorita merupakan perusahaan yang memiliki dermaga tersendiri yang dimanfaatkan oleh perusahaan ini berupa dermaga terminal khusus (TERSUS). PT. Adhitya Serayakorita memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8120315111055 yang diterbitkan tanggal 15 November 2018 dan memiliki beberapa KBLI. Namun KBLI yang dipergunakan adalah KBLI-52221 (Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut). 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
5				<p>PT. Adhitya Serayakorita (ASK) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban, seluruh bangunan fisik yang memanfaatkan ruang laut benar berada dalam koordinat yang tercantum dalam PKKPR.</p> <p>Laporan tertulis merupakan bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan usahanya sesuai dengan data perizinan yang tercantum dalam dokumen PKKPR, sehingga belum dibuatnya laporan ini dapat menjadi penilaian oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjadi terhambat. Apabila</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan ini tidak dibuat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut semenjak dokumen PKKPR terbit, maka dokumen PKKPR dapat dicabut karena dianggap tidak melaksanakan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut. <p>Pelaku usaha agar tetap melaksanakan enam belas kewajiban yang tercantum</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam dokumen PKKPR dengan baik dan jangan terlewat perihal laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. 	
6		24 April 2024	PT. Semen Padang	<p>Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 29 April 2024 di lokasi PT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semen Padang di jalan Cut Nyak Dien, Kel. Lubuk Gaung, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau dengan koordinat 1.728945N - 101.381253E; <p>PT. Semen Padang Memiliki NIB Nomor 9120504990821 dan di terbitkan pada tanggal 2 September 2019 dengan KBLI 82920 – Aktivitas Pengepakan dan merupakan perusahaan dengan kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Klasifikasi Resiko Tinggi;</p> <p>PT. Semen Padang Telah memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) Nomor 22122310511400002, dan di terbitkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pada Tanggal 22 Desember 2023 dengan luas area 12.59 Ha dan dengan kedalaman 15 M, Adapun PKKPR dipergunakan untuk bangunan Terminal Khusus (TERSUS) berupa dermaga; <p>PT. Semen Padang telah memiliki perizinan pembangunan bangunan Terminal Khusus (TERSUS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor</p> <ul style="list-style-type: none"> - BX.644/PP 008 Tanggal 12 November 2012 dan Izin Operasional Terminal Khusus yang diterbitkan via OSS dengan Nomor 91205049908210000010 Tanggal 18 April 2024; <p>PT. Semen Padang telah memiliki perizinan pembuangan air limbah (IPAL) dengan Nomor 45/IPAL/DPMPPTSP/XI/2020 yang diterbitkan DPMPPTSP Kota Dumai, berlaku hingga 24 November 2025 dan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya Nomor 24/TPSLB3/DPMPPTSP/V/2020 yang diterbitkan DPMPPTSP Kota Dumai, yang berlaku hingga 20 Mei 2025;</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, seluruh bangunan fisik dermaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - TERSUS milik PT. Semen Padang benar dalam koordinat PKKPR; <p>PT. Semen Padang belum menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri KP,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dikarenakan belum genap 1 (satu) tahun dari terbitnya dokumen PKKPR (Masih memiliki waktu Hingga 21 Desember 2024) 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
7		6 Mei 2024	PT. Pertamina Patra Niaga AFT Kuala Namu	<p>Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Pertamina Patra Niaga Aftiation Fuel Terminal (AFT)Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024.</p> <p>PT. Pertamina Patra Niaga Aftiation Fuel Terminal (AFT) Kualanamu Memiliki NIB - Nomor 9120309310613 yang terbit pada tanggal 1 Maret 2019 dengan KBLI 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI dengan kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Klasifikasi Resiko Tinggi.</p> <p>PT. Pertamina Patra Niaga (AFT) Kualanamu memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 27122310511200020, dan di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan luas area 49.01 Ha dan dengan kedalaman 9 m, adapun PKKPRL dipergunakan untuk Area Conventional Buoy Mooring (CBM) DPPU Kualanamu, sedangkan PKKPRL nomor 27122310511200021, terbit tanggal 27 Desember 2023 dengan panjang 4,99 km dengan kedalaman 9m yang digunakan untuk Submarine Pipeline (SPL) DPPU Kualanamu;</p> <p>PT. Pertamina Patra Niaga (AFT) Kualanamu telah memiliki izin Lingkungan dari Bupati Deli Serdang dengan Nomor 1776 tahun 2015 yang terbit tanggal 12 Oktober 2015, Izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 964/MENLHK/Setjen/PLA4 /10/2021 tentang persetujuan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang terbit tanggal 25 Oktober 2021, serta Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus minyak dan gas bumi dari Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor B.X.182/PP008 yang terbit tanggal 8 April 2015;</p> <p>- Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Pertamina Patra Niaga Aftiation Fuel</p>	
		7 s.d 8 Mei 2024	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal(FT) Medan Group	<p>Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal(FT) Medan Group, Medan - Belawan yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 8 Mei 2024.</p> <p>PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal(FT) Medan Group, Medan – Belawan Memiliki NIB Nomor 9120309310613 yang terbit pada tanggal 1 Maret 2019 - dengan KBLI 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI dengan kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Klasifikasi Resiko Tinggi.</p> <p>PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal(FT) Medan Group, Medan - Belawan memiliki 4 dokumen PKKPRL yan terbit tanggal 04 Desember 2023 dan dilakukan pengawasan pada Tanggal 07 Mei 2024.</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
8				<p>PT. Pertamina Patra Niaga (FT) Medan Group, Medan - Belawan memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)</p> <p>a. Nomor 04122310511200015, dan di terbitkan pada tanggal 04 Desember 2023 dengan panjang 12.49 KM dan dengan kedalaman 16 m, untuk kegiatan Submarine Pipeline.</p> <p>b. Nomor 04122310511200018 dan diterbitkan 04 Desember 2023 dengan Luas 49 Ha dan dengan Kedalaman 16 M untuk Kegiatan Single Point Mooring.</p> <p>c. Nomor 04122310511200016 dan diterbitkan 04 Desember 2023 dengan Panjang 14,58 KM dan dengan Kedalaman 17 M untuk Kegiatan Submarine Pipeline.</p> <p>d. Nomor 04122310511200017 dan diterbitkan 04 Desember 2023 dengan luas 49 Ha dan dengan kedalaman 17M untuk Kegiatan Single Point Mooring; BX.644/PP 008 Tanggal 12 November 2012 dan Izin Operasional Terminal Khusus yang diterbitkan via OSS dengan Nomor 912050499082100000010 Tanggal 18 April 2024;</p> <p>PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Medan Group, Medan - Belawan telah memiliki Izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.1404/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/2/2022 tentang persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan Fuel Terminal Medan Group Labuhan Deli yang terbit tanggal 10 Februari 2022, serta Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Instalasi Bawah Air Pengawasan PKKPRL PT. Pertamina Patra Niaga FT Medan Group 4 Nomor B XXVI-2169/PP 72 dari Direktur Perhubungan Laut Tanggal 30 Juni 1995 dan Keputusan Direktur Perhubungan Laut Nomor A.1022/AL.824/DCPL Tentang Pemberian Izin Membangun 1 Jalur pipa bawah laut dari Land Fall ke Single Point Mooring (SPM).</p> <p>Berdasarkan pengawasan di lapangan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Medan Group, Medan - Belawan dengan hasil PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Medan Group, Medan - Belawan telah memenuhi perizinan PKKPRL namun dalam kegiatan Submarine Pipeline\ pipa bawah laut Fuel Terminal Medan Group, Medan - Belawan posisi pipa bahwa laut belum terdaftar di hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) sebagai pedoman alur pelayaran dan terdaftar di katalog peta.</p> <p>Polsus PWP3K Polsus PWP3K merekomendasikan agar PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Medan Group, Medan-Belawan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum 03 Desember tiap tahunnya.</p>	
		8 Mei 2024	PT. Marita Makmur Jaya	<p>- Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut terhadap PT. Marita Makmur Jaya Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024.</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
9				<p>PT. Marita Makmur Jaya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120007111706 yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2019 dan memiliki 3 KBLI, yaitu KBLI 10431 –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), KBLI 01262 – Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan KBLI – 46202 – Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak; <p>Adapun Perizinan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1712110211403137 dan Instansi Penerbitan Oleh DPMPSTSP Tanggal Terbit 17/12/2021 <p>Eksisting pemanfaatan ruang laut di PT. MMJ berupa dermaga Terminal Khusus (TERSUS) saat ini dengan luasan 0,12Ha dan 0,22Ha.</p> <p>PT. Marita Makmur Jaya (MMJ) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban, seluruh bangunan fisik yang memanfaatkan ruang laut tidak memiliki izin PKKPR. <p>Pelaku usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut belum memiliki perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena belum melakukan mitigasi lingkungan serta kegiatan tersebut tidak terdata oleh KKP. Sehingga diduga melanggar dua ketentuan, yaitu; Pasal 18 angka 13 Jo Pasal 18 angka 12, UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk pelanggaran tidak memiliki KKPR; dan Pasal 18 angka 17 UU No 6 Tahun 2023 Jo Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021 Jo Pasal 15 PERPRES Nomor 122 Tahun 2012 untuk Pelanggaran melakukan reklamasi tanpa memiliki perizinan berusaha.</p> <p>Selanjutnya akan dilakukan Pemanggilan pada pihak PT.MMJ guna permintaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - keterangan, untuk melengkapi data dan memperoleh keterangan tertulis lebih jelas. 	
		14 Mei 2024	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA LPG TERMINAL PANGKALAN SUSU	<p>Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024.</p> <p>PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu Memiliki NIB Nomor</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9120309310613 yang terbit pada tanggal 1 Maret 2019 dengan KBLI 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI dengan kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Klasifikasi Resiko Tinggi; <p>PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) : Nomor 27122310511200019, dan di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan luas 4,14 Ha dan dengan kedalaman 9 m, dengan detail kegiatan usaha untuk Dermaga Terminal LPG Pangkalan Susu;</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
10				<p>PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara telah memiliki Izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.4279/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2022 tentang persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan LPG Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pangkalan Susu Provinsi Sumatera Utara yang terbit tanggal 24 Mei 2022, Surat persetujuan pengelolaan TUKS di DLKR- DLKP Pangkalan Susu guna menunjang kegiatan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi PT. PERTAMINA tanggal 20 Maret 2015 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Surat Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi Untuk Kegiatan Niaga Nomor: 69/A.8/MIGAS/2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia; <p>Berdasarkan pengawasan di lapangan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pangkalan Susu, dengan hasil PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu telah memiliki dokumen KKPRL yang absah dan seluruh titik koordinat pada lampiran PKKPRL sudah sesuai peruntukannya; <p>Polsus PWP3K sudah menyampaikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu bahwasanya PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu segera menyampaikan Laporan Tahunan Sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 27 Desember 2024, serta melaporkan apabila ada rencana untuk pengembangan kegiatan di wilayah dalm perizinan PKKPRL. 	
11		15 Mei 2024	DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, PPS Belawan.	<p>Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Prov. Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024;</p> <p>PPS Belawan telah memiliki Dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) : Nomor: B.526/MEN-KP/X/2021 diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan luas 156,55 Ha. Jenis kegiatan yaitu Pengembangan Pelabuhan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samudera Belawan. PPS Belawan telah memiliki Izin Lingkungan Nomor: 660/62 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang diterbitkan oleh Dinas PM-PPTSP Sumatera Utara; <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan telah memiliki dokumen KKRL yang absah dan seluruh titik koordinat sesuai dengan peruntukannya yaitu Pengembangan Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perikanan Samudera Belawan sebagai dermaga. Eksisting kegiatan yang dilakukan yaitu Operasional Pelabuhan Berdasarkan Permen KP Nomor 08 Tahun 2012; 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Laporan tahunan, laporan tentang berkala pelaksanaan kegiatan ruang laut disampaikan secara kolektif oleh eselon I yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) kepada Menteri KP. Berdasarkan hasil pengawasan, DJPT telah membuat laporan berkala tahunan pada Tahun 2022, sedangkan laporan tahun 2023-2024 masih dalam penyusunan dan segera disampaikan;</p> <p>Polsus PWP3K sudah menyampaikan kepada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan bahwasanya Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan segera menyampaikan Laporan Tahunan Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2024, serta melaporkan apabila ada rencana untuk pengembangan kegiatan di wilayah KKRL.;</p>	
12		18 Mei 2024	BUT ZARATEX N.V	<p>Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) BUT Zaratex NV Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024;</p> <p>BUT Zaratex N.V,Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Prov. Aceh memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) : Nomor 28022310511100001 dan di terbitkan pada tanggal 28 Februari 2023 dengan panjang pipa bawah laut 8,01 KM dan luas Anjungan/Platform 1 Ha dan dengan kedalaman 9 m, dengan detail Kegiatan Usaha Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>BUT Zaratex N.V,Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Prov. Aceh Memiliki NIB Nomor 0209210000029 yang terbit pada tanggal 02 September 2021 perubahan ke 3 tanggal 16 Juni 2022 dengan KBLI 06201 – Pertambangan Gas Alam dan KBLI 06100 - Pertambangan Minyak Bumi dengan kategori Penanaman Modal Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Klasifikasi Resiko Tinggi;</p> <p>Berdasarkan hasil Pengawasan bersama dengan tim BPSLP Padang Satker Aceh dilapangan, BUT Zaratex N.V memiliki dokumen KKPRL yang tidak sesuai atau kesalahan yang terletak di titik koordinat yang sama antara koordinat pipa bawah laut dengan koordinat anjungan pada lampiran PKKPR, saat dikonfirmasi kepada BUT Zaratex N.V ternyata memang benar ada kesalahan pada penginputan pada tabel koordinat dan pihak BUT Zaratex N.V langsung menindak lanjuti kesalahan tersebut dengan pengajuan revisi melalui email dan hotline chat KKP, dengan menunjukkan bukti pengiriman email dan screenshot Hotline KKP kepada tim pemeriksa, sedangkan berdasarkan pemeriksaan di lapangan BUT Zaratex N.V belum melakukan kegiatan karena sambil menunggu terbitnya izin lingkungan Amdal;</p> <p>- Zaratex NV tetap menyampaikan Laporan Tahunan secara rutin pertahunnya</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
13		14 Mei 2024	PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	<p>Pengawasan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 di PT. Multimas Nabati Asahan yang berlokasi di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara;</p> <p>PT. Multimas Nabati Asahan adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di industri pengolahan kelapa sawit dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) - 9120503102224. Perusahaan memanfaatkan ruang laut untuk mendukung kegiatan usaha, berupa pembangunan Jetty untuk keperluan tambat labuh kapal pengangkut produk untuk dipasarkan. Jetty ini dibangun pada tahun 1998 – 2000 dengan panjang sekitar 2,4 km dan lebar 7 m dan memiliki 2 (dua) dermaga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR), - Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44/349/KPTS/2021 tanggal 24 Juni <p>Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT. Multimas Nabati Asahan yang berlokasi di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara sudah memiliki dokumen Persetujuan KKPRL yang absah dan dilakukan di lokasi yang sesuai peruntukannya.</p>	
14		11 Juni 2024	PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP)	<p>Kegiatan dilakukan pada PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) pada tanggal 11 Juni 2024 di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, kemudian melakukan pemeriksaan atas pemanfaatan Ruang laut yang dimanfaatkan oleh PT. RAPP di Futong Seapord PT. RAPP. Pemeriksaan dengan cara presentasi hasil identifikasi awal, pengecekan dokumen perizinan dan pengamatan dan pengukuran langsung</p> <p>PT. RAPP Merupakan Perusahaan penghasil Pulp dan Kertas dan memiliki NIB dengan Nomor 8120013181654 status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 5219: Pergudangan dan penyimpanan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perubahan ke-64 tanggal 7 Maret 2023 <p>pemeriksaan ke lapangan sesuai identifikasi awal, PT. RAPP melakukan kegiatan operasional Perusahaan dengan pemanfaatan Ruang Laut berupa 2 Dermaga yaitu Dermaga A seluas 1,44 Ha; Dermaga B seluas 1,65 Ha, dan 1 Kegiatan Reklamasi seluas 1,1 Ha.</p> <p>pemeriksaan dokumen perizinan, PT. RAPP tidak memiliki perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) Dimana perizinan PKKPR dalam pengurusan atau Submit di OSS untuk 2 Dermaga sedangkan untuk kegiatan Reklamasi tim tidak menemukan perizinan Reklamasi.</p> <p>Polisus PWP3K dan Tim akan melakukan pemanggilan permintaan keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terhadap PT.RAPP segera terkait indikasi pelanggaran berupa 2 Jetty dan 1 Kegiatan Reklamasi 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
15		12 s.d 13 Juni 2024	PT. Samudera Siak	<p>Pengawasan terhadap PT. Samudera Siak Pada tanggal 12 dan 13 Juni 2024 di Kabupaten Siak. PT. Samudera Siak yang bergerak di pelayanan logistic</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki NIB dengan Nomor 8120001940553 dengan kode KBLI 5221 status PMDN - Aktifitas pelayanan kepelabuhan laut tertanggal 5 September 2018. - PT. Samudera Siak di Identifikasi awal menggunakan pemanfaatan ruang laut berupa dermaga <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan bahwa PT. Samudera Siak menyewa Lokasi Dermaga/Pelabuhan dari KSOP Kelas II Tanjung Buton dengan perjanjian sewa Nomor: HK.201/1/1/KSOP.TG.BTN/2021, Nomor: 003/PT.SS-KSOP/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Pemanfaatan Ruang Laut yang digunakan PT. Samudera Siak berupa 1 Unit Dermaga luas 0,7 Ha dan Lokasi Pelabuhan yang diluar garis Pantai (reklamasi) luas 0,19 Ha Sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut ke kantor KSOP Kelas II Tanjung Buton tentang kepemilikan dan Perizinannya.</p> <p>Polsus PWP3K dan Tim akan akan memintai keterangan ke KSOP Kelas II Tanjung Buton terkait kepemilikan Lokasi Dermaga/Pelabuhan yang disewa oleh PT. Samudera Siak.</p>	
16		12 s.d 14 Juni 2024	PT. Imbang Tata Alam	<p>Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2024, di PT. Imbang Tata Alam, Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (koordinat 1.055492N – 102.259266E)</p> <p>PT. Imbang Tata Alam (ITA) telah memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB dengan Nomor 1276000371105 dengan Kode KBLI 06100-Pertambangan Minyak Bumi. Adapun Skala Usaha adalah besar, klasifikasi resiko tinggi dan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); - Dokumen PKKPRL Nomor 30112310511400001 Tanggal 30 November 2023, dengan luas 2,41 Ha, yang terbagi di dua lokasi , yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, di Provinsi Riau; <p>Berdasarkan hasil pengamatan di Lapangan, Keseluruhan fisik Pelabuhan yang sedang berproses pembangunannya, baik di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak berada dalam koordinat PKKPRL yang telah ditetapkan;</p> <p>PT. ITA masih memiliki waktu hingga 30 November 2024 untuk mengajukan Laporan tahunan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Petugas juga telah mengingatkan bahwa denda keterlambatan pelaporan adalah lima juta rupiah per hari keterlambatan</p> <p>maka tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah agar Stasiun PSDKP Belawan dapat mendorong adanya komunikasi antara Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan Kepala Divisi Formalitas, SKK Migas yang dilanjutkan dengan membuat Surat Dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSDKP/Direktur PSDK kepada Kepala SKK Migas, yang isinya permohonan agar SKK Migas memerintahkan seluruh K3S yang ada di Indonesia, yang kegiatannya memanfaatkan ruang laut, untuk mengajukan PKKPRL pada Tahun 2024 ini;</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - perlu komunikasi lebih lanjut kepada Ditjen PKRL, mengingat pengelola blok migas sering berganti kontraktor/pengelola, maka apakah PKKPRL yang telah diterbitkan tetap berlaku apabila K3S pengelola blok migas tersebut berganti. 	
17		30 Juli s.d 1 Agustus 2024	Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan pada tanggal 30 Juli dan 1 Agustus 2024 di Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang yang beralamat di Jl.Pelabuhan Beran No. 1 Kel Kota Selat Panjang, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau - Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang bergerak pada Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, dan telah memiliki NIB Nomor: 8120109982359 terbit pada 25 September 2018; Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang memiliki izin lingkungan dengan nomor 12/KPTS/V/2015 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kab. Kepulauan Meranti yang terbit tanggal 5 Mei 2015; - Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang berada pada daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 tahun 1999, dan memiliki surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan di Pelabuhan Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 243 Tahun 2022 yang terbit tanggal 29 Desember 2022 - Terdapat pemanfaatan ruang laut berupa eksisting bangunan dermaga dan trestle seluas: 1.585 m2 melalui hasil pengukuran yang dilakukan oleh Polsus PWP3K dan Tim - Hingga saat ini Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang belum submit PKKPRL, dan menurut penanggung jawab akan dilakukan secara serentak oleh Pelindo Pusat 	
18		30 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT. National Sago Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan pada pada tanggal 30 Juli 2024 di PT NSP yang beralamat didesa Tanjung Bandul, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau - PT NSP merupakan PMA bergerak di bidang Industri tepung sago dengan izin usaha industri dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, nomor 75/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tanggal 20 April 2012. Memiliki Izin Lingkungan dari Bupati Kepulauan Meranti dengan Nomor: 272/HK/KPTS/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Memiliki penetapan Lokasi Terminal Khusus dengan Nomor: KP 162 tahun 2013 dari Menteri Perhubungan tanggal 15 Februari 2013. Memiliki Izin Pembangunan dengan nomor BX.532/PP.008 dari Direktur Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tanggal 15 Agustus 2013; Memiliki izin Operasi Tersus dari Kementerian Perhubungan, nomor: KP 575 tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 yang berlaku selama 5 tahun (sampai dengan 4 Juni 2019); 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Pada tanggal 29 Maret 2019, PT. NSP sudah memohon perpanjangan izin operasional Tersus dan mendapat rekomendasi dari KSOP Kelas IV Selat Panjang, dan seyogyanya di proses melalui sistem OSS, namun terkendala pada sistem OSS dan masih tahap proses penyelesaian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen AHU dan BKPM;</p> <p>Hingga saat ini PT NSP belum submit perijinan PKKPRL maupun NIB dikarenakan adanya kendala pada sistem OSS dimana adanya perbedaan status perusahaan dan status pemegang saham yang di tarik dari data AHU/Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) yaitu status badan hukum PT. NSP adalah perusahaan PMA, tetapi pada sistem OSS ke dua pemegang sahamnya tercatat sebagai perusahaan lokal/PMDN.</p>	
19		30 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT Energi Unggul Persada	<p>Dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024 di PT EUP yang beralamat di - Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau</p> <p>PT EUP merupakan Perusahaan yang bergerak pada sektor Industri dan perdagangan produk kelapa sawit, dan telah memiliki NIB Nomor 8120103921509 dengan perubahan ke 56 pada Tanggal 18 Februari 2021, dengan Multi KBLI dan berstatus Penanaman Modal Asing. PT EUP telah memiliki Dokumen Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) Pt Energi Unggul Persada di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor A.1503/AL.308/DJPL Tanggal 13 Desember 2019, dan masih berlaku hingga 13 Desember 2024</p> <p>Polsus Kelautan melakukan plotting overlay koordinat bangunan eksisting dari ijin Tersus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor A.1503/AL.308/DJPL Tanggal 13 Desember 2019 ditemukan dugaan awal bahwa terdapat bangunan yang memanfaatkan ruang laut, berada di luar areal tersus dengan luas sekitar 0.15 ha; luas eksisting bangunan berupabrrestel dan jety dermaga kurang lebih 3 hektar</p> <p>Hingga saat ini PT Energi Unggul Persada belum submit PKKPRL, dan telah telah - menunjuk konsultan perencana untuk membuat dokumen pengajuan PKKPRL seluas 36.6 Ha</p>	
		30 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT Ivo Mas Tunggal	<p>- Dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024 di PT EUP yang beralamat di, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
20				<p>PT Ivo mas Tunggal bergerak didalam bidang Industri Hulu dan Hilir Kelapa Sawit dan telah memiliki NIB 8120214051791 yang di terbitkan 19 Oktober 2018 dengan Multi KBLI dan berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri. PT IMT Telah Memiliki Pemenuhan Izin Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) dalam bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit, PT Ivo Mas Tunggal berada di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan , Kota Dumai, Provinsi Riau dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Dengan dengan Nomor A.915/AL.308/DJPL/E pada tanggal 19 Desember 2022, dan masih berlaku hingga 19 Desember 2027 <p>Pada saat dilakukan overlay berdasarkan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan Nomor A.915/AL.308/DJPL/E pada tanggal 19 Desember 2022, seluruh bangunan fisik eksisting yang memanfaatkan ruang laut masih di dalam koordinat dokumen perizinan tarsusnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hingga saat ini PT Ivomas belum submit perijinan PKKPR 	
21		30 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT. Pelindo I Sei Pakning	<p>Dilaksanakan pada Tanggal 30 Juli 2024 di PT Pelindo I Sei Pakning yang beralamat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 29-31 Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikasi pemanfaatan ruang laut oleh PT. Pelindo I Sei pakning berupa dermaga dan di dapat hasil pengukuran seluas 336 m2 <p>Berdasarkan keterangan PT. Pelindo I Sei Pakning Dermaga sampai saat ini masih dikelola oleh PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cab Pekanbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak diserahkan ke subholding PT. Pelindo Sei Pakning Karena status kepemilikan dermaga dan terminal tersebut masih milik Pemda dan PT.Pelindo hanya sebagai pengelola 	
22		30 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT. MESKOM AGRI SARIMAS	<p>Dilaksanakan pada Tanggal 30 Juli 2024 di PT PT. MESKOM AGRI SARIMAS yang beralamat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 29-31 Juli 2024</p> <p>NIB nomor : 8120002952726 tanggal terbit 22 September 2018 dengan KBLI 32909 Industri Pengolahan Lainnya YTDL . Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor :18012410211403016 tanggal 17 Januari 2024 oleh a.n Bupati Bengkalis Kepala DPMPSTP Kabupaten Bengkalis. Keputusan pengelolaan TUKS di dalam DLKR dan DLKP PT Meskom AgroSarimas tanggal 15 Maret 2013 oleh Menteri Perhubungan.</p> <p>Berdasarkan hasil inspeksi lapangan PT. Meskom Agro Sarimas telah dilakukan plotting koordinat dengan titik terluar dari dermaga bahwa koordinat tersebut berada di dalam garis Pantai terluar sehingga PT. Meskom Agro Sarimas tidak ada indikasi pelanggaran</p> <p>Kesimpulan berdasarkan hasil inspeksi lapangan terhadap 3 pelaku usaha yaitu PT. Pelindo Sei Pakning, PT. Meskom Agro Sarimas dan CV. Bestari Jaya didapatkan bahwa pada PT Meskom Agro Sarimas dan CV. Bestari jaya tidak ada pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut yang dilakukan, sedangkan Pada PT.Pelindo Sei Pakning akan dilakukan koordinasi ke PT. Pelindo Regional I Cabang Pekan Baru untuk memastikan kepemilikan dan pengelolaan Dermaga di Pelindo Sei Pakning</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
23		30 Juli s.d 1 Agustus 2024	CV. BESTARI JAYA	<p>Dilaksanakan pada Tanggal 30 Juli 2024 di PT PT. Bestari Jaya yang beralamat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 29-31 Juli 2024</p> <p>CV. Bestari jaya memiliki izin yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NIB nomor : 9120009722259 tanggal terbit 25 Juli 2019 dengan KBLI 23595 Industri Barang dari semen, kapur, gips dan asebs lainnya, KBLI 46634 Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, KBLI 46638 Perdagangan besar berbagai macam material bangunan, KBLI 47523 Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubain dan sejenisnya dari tanah liat, kapur semen atau kaca, KBLI 47528 Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, KBLI 43909 Kontruksi Khusus Lainnya YTDL. b. Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin komersial/Operasional TUKS di DLKR-DLKP Nomor: A.136/AL.308/DJPL/E tanggal 15 November Oleh Ditjen Perhubungan laut KEMENHUB c. Izin lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: Kpts.17/DPMPPTSP/2021 tanggal 23 Maret 2021. d. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 71/SITU/2009 tanggal 04 Maret 2009 oleh a.n Bupati Bengkalis Camat Bengkalis. e. Izin lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: Kpts.17/DPMPPTSP/2021 tanggal 23 Maret 2021 <p>Berdasarkan hasil inspeksi CV. Bestari Jaya telah dilakukan plotting koordinat dengan titik terluar dari dermaga bahwa koordinat tersebut berada di dalam garis Pantai terluar sehingga CV. Bestari Jaya tidak ada indikasi pelanggaran. Kesimpulan berdasarkan hasil inspeksi lapangan terhadap CV Bestari jaya tidak ada pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut yang dilakukan.</p>	
		26 s.d 27 November 2024	PT. Swadaya Mitra Perkasa	<p>Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 November 2024 di PT. Swadaya Mitra Perkasa yang beralamat di Desa Ujong Blang Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun Prov. Aceh, (Koordinat 5°14'11.95"N 96°42'6.52"E)</p> <p>PT. Swadaya Mitra Perkasa memiliki izin dasar berupa: NIB Nomor 9120211261081 terbit tanggal 18 Desember 2019, Akta Notaris Perusahaan nomor 03 Tanggal 03 Agustus 2016, SK Kemenkumham nomor AHU0035063.AH.01.01 Tahun 2016, Dokumen UKL-UPL nomor: 660/254 tanggal 23 Desember 2021 Oleh DLHK Kab. Bireun</p> <p>PT Swadaya Mitra Perkasa merupakan Perusahaan Hatchery yang bergerak di bidang Pembenihan udang vaname yang menggunakan air laut sebagai air baku untuk kegiatan tersebut. Produk akhir PT. Swadaya Mitra Perkasa merupakan Benur udang Vaname yang didistribusikan ke wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
24				<p>PT. Swadaya Mitra Perkasa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum pernah melakukan uji kualitas air limbah dan hanya melakukan uji kualitas air baku laut dengan hasil aman tidak terdeteksi virus dan bakteri di GSI Lab pada tanggal 27 Mei 2024;</p> <p>Berdasarkan hasil inspeksi lapangan didapatkan PT Swadaya Mitra Perkasa memanfaatkan ruang laut berupa Pipa inlet pengambilan air dari laut sebagai air baku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR dan Izin ALSE. PT Swadaya Mitra Perkasa memiliki 5 unit modul produksi sehingga total pipa inlet sebanyak 5 Pipa Inlet dengan total luasan 400 m2. PT Swadaya Mitra Perkasa menggunakan air laut dengan total sebanyak 5000 m3/tahun</p> <p>Tindak Lanjut: telah dilakukan pengambilan bahan keterangan terhadap manager PT Swadaya Mitra Perkasa Hacthcery Kab. Bireun dan akan segera dibuatkan laporan untuk bahan supervisi/ekspose dalam pengenaan sanksi administrasi.</p>	
25		28 s.d 30 November 2024	PT. NTT	<p>Pengawasan dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 29 November 2024, pada PT NTT Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.</p> <p>PT NTT Indonesia memiliki NIB 8120100832237, dengan KBLI 61100-Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, dengan klasifikasi resiko tinggi dan merupakan Perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA);</p> <p>PT NTT Indonesia telah memiliki perizinan dasar berupa dokumen PKKPR Nomor B.406/MEN-KP/VIII/2021, dengan kegiatan pergelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Malaysia/Myanmar India Singapore Transit (MIST). Adapun proses pergelaran kabel tersebut dilakukan di wilayah perairan Indonesia, namun tidak memiliki titik landing point di Indonesia.</p> <p>Dengan tidak adanya titik landing point di Indonesia, maka pelaku usaha tidak dapat mengurus perizinan berusaha, karena perizinan berusaha berupa izin penggunaan jaringan tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Digital, hanya dapat diberikan apabila pergelaran SKKL ini memiliki landing point di Indonesia, yang artinya memiliki dampak usaha yang berkaitan langsung dengan Indonesia; Adapun landing point pada pergelaran SKKL MIST hanya terdapat pada Negara Singapura, Thailand, Myanmar, India dan Malaysia.</p> <p>Pada saat proses pergelaran SKKL di Tahun 2023, PT NTT Indonesia telah dikenakan Denda Administrasi sebesar Rp 10.924.213.440, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Keputusan Banding Administratif Atas Penetapan Denda Administratif PT NTT Indonesia. Sanksi administrasi ini dikarenakan karena terdapat perbedaan antara jalur yang telah ditetapkan dalam PKKPR, dengan jalur pergelaran yang dilakukan oleh PT NTT Indonesia. adapun besaran denda tersebut telah diselesaikan oleh Perusahaan tersebut.</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 ini, PT NTT Indonesia telah melakukan kewajiban dalam dokumen PKKPR, Adapun Laporan Tahun 2023 dilakukan secara manual dan Laporan Tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi e-sea. Sehingga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.</p> <p>PT NTT Indonesia selanjutnya juga Tengah membuat _ rencana study_ perihal project pergelaran kabel dengan nama "apricot" yang nantinya akan diproses perizinannya. Petugas mengingatkan bahwa proses perizinan dan pergelaran harus dilakukan sesuai ketentuan.</p>	

8.4. Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1	Stasiun PSDKP Belawan	26 April 2024	PT. Anugerah Nelayan Andalan	<p>Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 di</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Anugerah Nelayan Andalan yang berada pada Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, Provinsi Sumatera Utara - PT. Anugerah Nelayan Andalan mengalami pergantian Pengelola dari Koperasi Masyarakat Pantai Jono kepada PT Anugerah Nelayan Andalan sejak Tanggal 4 April 2024; - PT Anugerah Nelayan Andalan telah memiliki NIB 1508230055919 dengan kode KBLI 93224 (Wisata Pantai) dan telah memiliki izin Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata dengan Nomor 100.3.7/1913/2024: - Dari hasil pemeriksaan, PT Anugerah Nelayan Andalan masih menggunakan fasilitas wisata peninggalan Koperasi Masyarakat Pantai Jono yang saat ini banyak dalam kondisi rusak; - Dari hasil Pemeriksaan, PT Anugerah Nelayan Andalan tidak memanfaatkan Ruang Laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut sehingga belum wajib memiliki KKPRL - Pada saat pelaksanaan pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumberdaya perikanan dan lingkungannya. 	
2		28 Mei 2024	RM. Dangdang Na	<p>Kegiatan pengawasan wisata bahari ini dilaksanakan di R.M Pondok</p> <ul style="list-style-type: none"> - DangDangna milik Efendi Desa Lancok Pantai Lancok Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 28 Mei 2024. - Kegiatan ini merupakan usaha jasa kelautan yang bergerak di usaha wisata pantai dengan kegiatan pariwisata seperti menjual makanan dan minuman ringan,sewa pondok,dan sewa Ban Renang - Usaha milik Bapak Efendi merupakan Usaha Skala Mikro dengan Resiko Menengah Rendah, Memiliki dokumen perizinan berusaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB): 1705240088152 dengn KBLI 93224 (Wisata Pantai), keputusan dari Bupati Aceh Utara Nomor 17052401111080006 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Pondok Dangdangna di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, oleh Efendi. Serta memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). - Dari hasil Pemeriksaan, Wisata bahari Milik Bapak Efendi tidak memanfaatkan Ruang Laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut sehingga belum wajib memiliki KKPRL. - Tidak ditemukan dampak negatif terhadap lingkungan/perairan di sekitar Usaha milik Bapak Efendi di Pantai Lancok Bayu. 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
3		12 Juni 2024	PT. Musim Mas	<p>Kegiatan pengawasan ALSE ini dilaksanakan tanggal 12 Juni 2024 oleh Tim PSDKP Belawan dan di damping oleh Tim dari Direktorat PSDK di Kantor PT. Musim Mas, Jl. Kl. Yos Sudarso KM. 7,8 Desa/Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota. Medan</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB 8120304772353, UKL/UPL dan Izin Lingkungan - Debit volume penggunaan air laut pada PT Musim Mas 5000 m3/hari <p>Berdasarkan hasil pengawasan PT. Musim Mas didorong untuk melakukan pengurusan PKKPR dan ALSE, walaupun sudah memiliki surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena pada lampiran KKPR dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga menyebutkan klasifikasi KBLI untuk kegiatan Usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku (36002) dan Air yang digunakan merupakan air di daerah pasang surut</p>	
4		12 June 2024	PT. Intibenua Perkasatama	<p>Kegiatan pengawasan ALSE ini dilaksanakan tanggal 12 Juni 2024 oleh Tim PSDKP Belawan dan di damping oleh Tim dari Direktorat PSDK di Kantor PT. Intibenua Perkasatama, Jl. Kl. Yos Sudarso KM. 7,8 Desa/Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota. Medan</p> <p>Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian dokumen dan pemeriksaan kesesuaian di Lapangan pada pemanfaatan ALSE PT. Musim Mas di Jln. Sulawesi II, Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I),Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. Sedangkan pengawasan lapangan pada Pemanfaatan ALSE PT. Intibenua Perkasatama belum dilakukan karena berada di Jln. Raya Lubuk Gaung, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai Provinsi Riau yang pemanfaatannya air lautnya berada di Selat Malaka</p> <p>Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB, Izin Lingkungan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) - NIB 8120108803912 , Kelayakan Lingkungan Hidup dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut - Debit volume penggunaan air laut pada PT. Intibenua Perkasatama debit volume sebesar 83.040 m3/hari; <p>Selanjutnya diperlukan pengawasan kembali terhadap proses izin ALSE dan kesesuaian titik koordinat PKKPR di Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai Provinsi Riau</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Intibenua Perkasatama</p> <ul style="list-style-type: none"> - sudah memiliki dokumen PKKPR dan sudah submit dalam pengajuan izin pemanfaatan ALSE pada sistem OSS 	
5		10 Juli 2024	A.n Mansur	<p>Kegiatan pengawasan wisata bahari ini dilaksanakan di Pantai Pelangi milik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mansur Desa Matang Rayeuk , Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 10 Juli 2024 <p>(NIB): 0606240063037 dengan KBLI 93224 (Wisata Pantai), keputusan dari Bupati Aceh Timur Nomor 17052401111080006 tentang Persetujuan Pernyataan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha mikro di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, oleh Mansur. Serta memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) <p>Usaha Milik Pak Mansur sudah mulai usaha pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, dengan luas lahan usaha sekitar 600 m2, Usaha ini memiliki tenaga kerja sebanyak 3 orang, fasilitas permodalan usaha ini yaitu permodalan milik dalam negeri (PMDN), Modal usaha yang dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000</p> <p>Dari hasil Pemeriksaan, Wisata bahari Pantai Pelangi tidak memanfaatkan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut sehingga belum wajib memiliki KKPRL - Tidak ditemukan dampak negatif terhadap lingkungan/perairan di sekitar Usaha milik Bapak Mansur. 	
		16 s.d 19 November 2024	PT. Intibenua Perkasatama	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 18 November 2024 di PT. Intibenua Perkasatama (IBP) yang beralamat di Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau (Koordinat 1°44'50,586" N 101°22'4,092"); - PT. IBP memiliki dua Surat Tugas Kunjungan Lapangan (STKL) untuk dua lokasi ALSE yang berbeda Nomor kode proyek lokasi Pertama 202302-2116-2918-7781-877 dan lokasi ke dua 202201-0709-1402-0934-804; - PT IBP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan buah Kelapa Sawit dengan dengan NIB 8120208803912 terbit tanggal 31 Agustus 2018, perubahan ke 1 tanggal 1 Desember 2022, dengan Multi KBLI dengan status Penanaman Modal Asing (PMA). Namun KBLI yang diperiksa saat pada pengawasan ini adalah 36002-Penampungan dan Penyaluran Air Baku, dengan klasifikasi resiko tinggi 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
6				<ul style="list-style-type: none"> - Untuk lokasi ALSE pertama dengan STKL Nomor 2024-1400-00-032-0006, PT. IBP telah memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 19102310511400006 terbit tanggal 19 Oktober 2023, seluas 7,93 Ha dan PT IBP telah memiliki Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dengan Nomor 81202088039120003 terbit tanggal 30 September 2024. Adapun volume izin pemanfaatan ALSE sebanyak 30.309.600 m3 per tahun. Jumlah debit air sampai tanggal 17 November 2024 sebanyak 174.721 m3 - Berdasarkan hasil pengawasan lapangan meliputi, pemeriksaan keabsahan dokumen, kesesuaian lokasi perairan, kesesuaian usaha dan/atau kegiatan, kesesuaian kegiatan, kesesuaian produk. Petugas tidak menemukan adanya pelanggaran. Adapun laporan bulanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan telah dilakukan via situs e-mandat.id. Untuk Lokasi pertama ini, PT IBP memperoleh nilai kepatuhan teknis dan administrasi sebesar 65,40 dengan predikat Baik - Untuk Lokasi ALSE lokasi kedua dengan STKL Nomor 2024-1400-00-032-0007, PT. IBP telah memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 04102410511400001 terbit tanggal 4 Oktober 2024, seluas 0,01 Ha. Namun untuk perizinan ALSE, saat ini belum terbit dan masih dalam tahapan pembayaran PNPB. PT IBP berkomitmen segera menyelesaikan proses perizinan ALSE ini, sehingga untuk lokasi kedua, penilaian belum dapat dilakukan 	

8.5. Pengawasan Destructive Fishing

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
		29 sd 30 April 2024	Sungai Indragiri, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir	<p>Kegiatan Pengawasan Destructive Fishing, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1032/PSDKPSta.2/KP. 440/IV/2024, tanggal 26 April 2024 di sungai Indragiri, kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri hilir pada tanggal 29 s/d 30 April 2024</p> <p>Sebelum Pemeriksaan Kegiatan Pengawasan Destructive Fishing Tim PSDKP</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan Koordinasi dengan Bapak H. Sumaryono, S.Pd.I selaku Lurah di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. <p>Tim memeriksa 13 (tiga belas) perahu motor perikanan di beberapa lokasi yang berbeda, Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu yang melakukan penangkapan ikan di Sungai Indragiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Perahu Motor tanpa nama <ul style="list-style-type: none"> -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Bustalami -Nahkoda: Bustalami -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Rawai -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.541425C 102.85298666666668E - 2.Perahu Motor tanpa nama <ul style="list-style-type: none"> -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Mistar -Nahkoda: Mistar -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Belat, Pancing -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.54103935 102.8510855E 	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>3.Perahu Motor tanpa nama -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Aidi -Nahkoda: Aidi -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.54103935 102.8510855E</p> <p>4.Perahu Motor tanpa nama -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Nurdin -Nahkoda: Nurdin -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Belat -ABK : - -Muatan : 1 Kg ikan juare -Posisi Riksa : 0.542543333333333S 102.85203833333335E</p> <p>5.Perahu Motor tanpa nama -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Agung Saputra -Nahkoda: Agung Saputra -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, -ABK : - -Muatan : 2 Kg ikan Juare, Ikan Gulamah -Posisi Riksa : 0.541113333333333S 102.85117833333334E</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1				<p>6.Perahu Motor tanpa nama -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Hasni -Nahkoda: Hasni -No. SIUP : - - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Belat -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.5426827S 102.8523142E</p> <p>7.Perahu Motor tanpa nama -0.3 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Arbain -Nahkoda: Arbain -No. SIUP : - - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan :Rawai -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.541155 102.8511666666666E</p> <p>8.Perahu Motor tanpa nama -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Saini -Nahkoda: Saini -No. SIUP : - - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Belat -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.54113333333333S 102.85117833333334E</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>9.Perahu Motor tanpa nama -1 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Imran -Nahkoda: Imtan -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Belat, Pancing -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.54256963S 102.85199696E</p> <p>10.Perahu Motor tanpa nama -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas -Pemilik : Arhab -Nahkoda: Arhab -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Belat -ABK : - -Muatan : - -Posisi Riksa : 0.54255641S 102.8519561E</p> <p>11.Perahu Motor tanpa nama -0.3 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu -Pemilik : Junaidi -Nahkoda: Junaidi -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Belat -ABK : - -Muatan : 4 Kg campur udang kecil, Ikan Gulamah, ikan duri -Posisi Riksa : 0.342025 103.13016999999999E</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>12.Perahu Motor tanpa nama -0.4 GT (perahu motor) -Asal : Tembilahan Hulu Jaya, Kecamatan Tembilahan Hulu -Pemilik : Rahmat -Nahkoda: Rahmat -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Belat, Gill Net -ABK : - -Muatan : 6 Kg campur Ikan Bakut, Udang Galah -Posisi Riksa : 0.3420766666666664S 103.1301533333333E</p> <p>13.Perahu Motor tanpa nama -0.5 GT (perahu motor) -Asal : Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu -Pemilik : Abdul Gopar -Nahkoda: Abdul Gopar -No. SIUP : - -No. SIPI : - -Jenis Kapal : Kapal Penangkap Ikan -Alat Penangkap Ikan : Gill Net, Belat -ABK : - -Muatan : 6 Kg campur Udang Galah, Ikan Gulamah, Ikan Baung -Posisi Riksa : 0.341865 103.12969833333334E</p> <p>Kegiatan ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan - pemeriksaan pada Alat Tangkap yang digunakan serta objek Hasil dari Penangkapan/muatan dan wawancara dengan Pelaku Usaha/Nelayan.</p> <hr/> <p>Dari hasil Pemeriksaan dan Pengawasan objek hasil Muatan Kapal Perikanan tidak - terdapat Indikasi Penangkapan ikan menggunakan alat-alat penangkap ikan yang berbahaya seperti Alat dan Bahan penyetrum serta Alat dan Bahan Racun lainnya.</p>	
	Stasiun PSDKP Belawan	14 s.d 15 Mei 2024	Perairan Selat Air Hitam Desa Insit	<p>Pengawasan Penangkapan Ikan yang merusak (Destructive Fishing) pada tanggal 14 Mei dan 15 Mei 2024 lokasi pengawasan bertempat di sekitaran perairan Selat Air Hitam Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan sekitar Sungai Suir Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Tim berhasil memeriksa 4 (empat) kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di Sungai Barumun dengan data sebagai berikut:</p>	

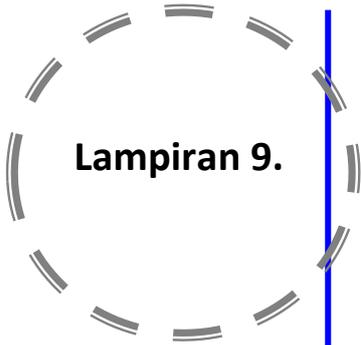
NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>1 Nama Penanggung Jawab : Amin Rahul</p> <p>2. Alamat Desa : Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat</p> <p>3. Nahkoda kapal : Amin Rahul</p> <p>4. Dokumen Perizinan : E-BKP</p> <p>- 5. Alat tangkap : Gumbang (bubu bersayap)</p> <p>6. Hasil tangkapan : Ikan lomek,udang, layur, biang, gonjeng</p> <p>7. Daerah penangkapan : ikan Selat Air Hitam</p> <p>8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada</p> <p>9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Abdullah Samad</p> <p>2. Alamat Desa : Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat</p> <p>3. Nahkoda kapal : Abdullah Samad</p> <p>4. Dokumen Perizinan : E-BKP</p> <p>- 5. Alat tangkap : Gumbang (bubu bersayap)</p> <p>6. Hasil tangkapan : Ikan lomek,udang, layur, biang, gonjeng</p> <p>7. Daerah penangkapan : ikan Selat Air Hitam</p> <p>8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada</p> <p>9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Benni</p> <p>2. Alamat : Jl. Pelabuhan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat</p> <p>3. Nahkoda kapal : Benni</p> <p>4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada</p> <p>- 5. Alat tangkap : Gumbang (Bubu Bersayap)</p> <p>6. Hasil tangkapan : Tidak Ada</p> <p>7. Daerah penangkapan ikan : Selat Air Hitam</p> <p>8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada</p> <p>9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Syafe'i</p> <p>2. Alamat : Jl. Pelabuhan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat</p> <p>3. Nahkoda kapal : Syafe'i</p> <p>4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada</p> <p>- 5. Alat tangkap : Gumbang (Bubu Bersayap)</p> <p>6. Hasil tangkapan Ikan : lomek,udang, layur, biang, gonjeng</p> <p>7. Daerah penangkapan ikan : Selat Air Hitam</p> <p>8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada</p> <p>9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
2				<p>1 Nama Penanggung Jawab : Azizul Fahmi 2. Alamat : Jl. Perjuangan Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat 3. Nahkoda kapal : Azizul Fahmi 4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada - 5. Alat tangkap : Gumbang (Bubu Bersayap) 6. Hasil tangkapan : Tidak ada 7. Daerah penangkapan ikan : Selat Air Hitam 8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada 9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Hasroni 2. Alamat : Jl. Nelayan Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat 3. Nahkoda kapal : Hasroni 4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada - 5. Alat tangkap : Gumbang (Bubu Bersayap) 6. Hasil tangkapan : Ikan lomek, udang, layur, biang, gonjeng 7. Daerah penangkapan ikan : Selat Air Hitam 8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada 9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Aluwi 2. Alamat : Jl. Pusara Dusun Mawar, Desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur 3. Nahkoda kapal : Aluwi 4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada 5. Alat tangkap : Empang, Belat - 6. Hasil tangkapan : Ikan kitang, kerapu, bungkul, sembilang, senumpit, mengkerong, elang, tirus, duri dan udang 7. Daerah penangkapan ikan : Sungai Suir 8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada 9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>1 Nama Penanggung Jawab : Baizar</p> <p>2. Alamat : Dusun Anggrek, Desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur</p> <p>3. Nahkoda kapal : Baizar</p> <p>4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada</p> <p>5. Alat tangkap : Empang, Belat</p> <p>- 6. Hasil tangkapan : Ikan tirus, kurau, belukang, senumpit, jumpul, sembilang, kitang, elang, belanak dan duri</p> <p>7. Daerah penangkapan ikan : Sungai Suir</p> <p>8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada</p> <p>9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Kamarudin</p> <p>2. Alamat : Dusun Mawar, Desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur</p> <p>3. Nahkoda kapal : Kamarudin</p> <p>4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada</p> <p>- 5. Alat tangkap : Empang, Belat</p> <p>6. Hasil tangkapan : Tidak ada</p> <p>7. Daerah penangkapan ikan : Sungai Suir</p> <p>8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada</p> <p>9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Kamarudin</p> <p>2. Alamat : Dusun Teratai, Desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur</p> <p>3. Nahkoda kapal : Kamarudin</p> <p>4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada</p> <p>- 5. Alat tangkap : Empang, Belat</p> <p>6. Hasil tangkapan : Tidak ada</p> <p>7. Daerah penangkapan ikan : Sungai Suir</p> <p>8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada</p> <p>9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>1 Nama Penanggung Jawab : Salamuddin 2. Alamat : Jl. Pusara Dusun Mawar, Desa lukun Kec. Tebing Tinggi Timur 3. Nahkoda kapal : Kamarudin 4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada - 5. Alat tangkap : Empang, Belat 6. Hasil tangkapan : Tidak ada 7. Daerah penangkapan ikan : Sungai Suir 8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Tidak ada 9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p> <p>1 Nama Penanggung Jawab : Mukhtar 2. Alamat : Dusun Kenanga, RT.1, RW.2, Desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur 3. Nahkoda kapal : Kamarudin 4. Dokumen Perizinan : Tidak Ada</p> <p>- Pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan alat atau bahan yang berbahaya di atas perahu milik nelayan.</p>	
3		1 s.d 6 Juli 2024	di Sungai Indragiri Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Prov. Riau	<p>Pengawasan Penangkapan Ikan yang merusak (Destructive Fishing) - dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Juli 2024 di Sungai Indragiri yang terletak di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau</p> <p>Tim berhasil mendekati dan memeriksa 1 (satu) unit Perahu Tanpa Nama pada koordinat 0°30'22.0"LS 102°56'06.4"BT dengan alat tangkap sondong yang diduga - melakukan penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan alat setrum/listrik, yang di nakhodai oleh 1 (satu) orang nelayan atas nama Karya Efendi.</p> <p>Adapun Data Kapal yang diperiksa Yaitu : 1. Nama Penanggung Jawab : Karya Efendi 2. Alamat : Kampung Baru- Desa Sungai Gantang, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau 3. Nahkoda kapal : Karya Efendi 4. Dokumen Perizinan : Tidak ada 5. Alat tangkap : Sondong 6. Hasil tangkapan : Tidak ada 7. Daerah penangkapan ikan : Sungai Indragiri, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau. 8. Alat atau Bahan yang berbahaya : Aki, genset, peralatan setrum 9. Ikan hasil tangkapan yang terindikasi : Tidak ada</p>	

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
				<p>Hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit perahu motor milik Karya Efendi yang memiliki alat tangkap sondong dan perangkat setrum yang merupakan alat tangkap yang dilarang dan berbahaya. Nelayan an. Karya Efendi beserta alat</p> <ul style="list-style-type: none"> - tangkap yang dilarang dibawa ke kantor UPT PSDKP Wilayah I DKP Provinsi Riau di Tembilahan untuk dimintai keterangan dan diberikan surat peringatan agar yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak serta mengajak berpartisipasi dalam upaya pencegahan destructive fishing. 	
4		5 s.d 7 Oktober 2024	Sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau	<p>Pada tanggal 5 Oktober dilaksanakan pengamatan lapangan disekitar Sungai Desa Kempas Jaya dan Teluk Kiambang. Tidak ditemukan adanya aktivitas nelayan yang melakukan Destructive Fishing . Pada kegiatan ini juga dilakukan pengumpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - informasi kepada Masyarakat di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Masyarakat menyampaikan sudah tidak ada lagi kegiatan DF setelah adanya dilakukan penangkapan pada bulan Juli 2024 lalu, kejadian itu sudah menimbulkan efek jera bagi masyarakat; <p>Pada tanggal 6 Oktober dilaksanakan patroli pada malam hari di Sungai Indragiri tepatnya pada perairan Sungai Desa Tempuling, Hasil pemantauan disekitar sungai ini tidak ditemukan adanya aktivitas nelayan yang melakukan Destructive</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fishing . Pada kegiatan ini juga dilakukan pengumpulan informasi kepada masyarakat Desa Tempuling, mereka menyampaikan sudah tidak ada lagi kegiatan DF setelah adanya dilakukan penangkapan pada bulan Juli 2024 lalu, kejadian itu sudah menimbulkan efek jera bagi masyarakat; <p>Pada tanggal 7 Oktober dilaksanakan pengamatan pada perairan sungai Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil pemantauan disekitar sungai ini tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditemukan adanya aktivitas nelayan yang melakukan Destructive Fishing . Pada kegiatan ini juga dilakukan pengumpulan informasi kepada masyarakat desa Pulau Palas, mereka menyampaikan tidak pernah melihat adanya aktivitas nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan dengan cara merusak / Destructive Fishing <p>Pengawas perikanan menyampaikan kepada masyarakat desa Pulau Palas tentang aturan larangan penangkapan ikan yang merusak sangat tidak baik bagi</p> <ul style="list-style-type: none"> - masyarakat itu sendiri maupun lingkungannya. Pengawas perikanan juga menyampaikan ancaman hukuman terhadap pelaku df sesuai undang-undang yang berlaku. 	



Rekap Kapal yang diperiksa Tahun 2024



**Lampiran 9. Rekapitulasi Jumlah kapal yang diperiksa oleh KP Hiu 01, Hiu 08,
Hiu 16, Napoleon 028 dan Dolphin 014 saat Patroli**

No	Kapal Pengawas / Speed Boat	Bulan	Periksa		Dokumen		Dokumen Lengkap
			API	Jumlah	Lengkap	Tidak Lengkap	
1	1	Maret	JHIB	7	38	5	
			Pancing Cumi	12			
			Pancing Ulur	4			
			Pukat Cincin	16			
			Bouke Ami	4			
		Mei	Trawl	1	24	1 KIA	
			JHIB	3			
			Pancing Cumi	7			
			Pancing Ulur	1			
			Pukat Cincin	3			
			Bouke Ami	6			
			Pukat Labuh	4			
		Juli	JHIB	2	13	0	
			Pukat Labuh	1			
			Pukat Cincin	1			
			Pukat Cincin Pelagis	1			
			Jaring Insang Hanyut	7			
			Gill Net	1			
		September	Jaring Insang Hanyut	12	19	0	
			Gill Net	3			
			Pengangkut Ikan	1			
			Jaring Insang Tetap	3			
		Desember	JHIB	3	34	2	
			Pukat Labuh	14			
			Pukat Cincin Pelagis	6			
			Pukat Cincin Teri	1			
Jaring Insang Hanyut	1						
Bouke Ami	4						
Pancing Cumi	3						
Pancing Cumi Mekanis	1						
Gill Net	3						
2	KP. Hiu 08	Maret	Driftnet	1	21	5	
			Gill Net	2			
			Squid Angling	1			
			JHIB	2			
			Pancing Cumi	2			
			Pancing Ulur	3			
			Jaring Insang Hanyut	1			
			Bouke Ami	1			
			Purse Seine	3			
			Pukat Labuh	10			
		Mei	Gill Net	5	27	3	
			JHIB	5			
			Pancing	1			
			Pancing Cumi	4			
			Pancing Ulur	1			
Bouke Ami	2						
Purse Seine	3						
Pukat Labuh	9						
Juli	JHIB	4	29	0			
	Pukat Cincin	6					
	Purse Seine	1					
	Pukat Labuh	12					
	Jaring Insang Hanyut	4					
	Pancing Cumi	1					
Oktober	Jaring Insang Tetap	1	18	0			
	Jaring Insang Hanyut	3					
	Jaring Insang Tetap	3					
	PSPK	7					
	Pukat Cincin	3					
	Pukat Labuh	1					
JHIB	1						

No	Kapal Pengawas / Speed Boat	Bulan	Periksa		Dokumen		Dokumen Lengkap
			API	Jumlah	Lengkap	Tidak Lengkap	
		Desember	PSPK	16	25	1 KIA	
			Gill Net	1			
			Pancing	1			
			Pancing Cumi	7			
			Pancing Ulur	1			
			Pukat Labuh	5			
			Jaring Insang Hanyut	2			
			JHIB	2			
Bouke Ami	1						
3	KP. Hiu 016	Januari	Jaring Insang Hanyut	2	5	0	
			Bouke Ami	3			
		Februari	Jala Jatuh Berkawal	10	14	0	
			Jaring Tarik Berkantong	1			
			Pancing Cumi	2			
		Maret	Jaring Insang Hanyut	1	18	3	
			Trawl	1			
			JHIB	5			
			Jaring Insang Hanyut	2			
			Jaring Insang Tetap	3			
			PSPK	5			
			Purse Seine	1			
		Pancing Cumi	3				
		Pukat Ikan	1				
		April	Gill Net	5	9	3	
			Purse Seine	2			
			Jaring Insang Hanyut	1			
			PSPK	4			
		Juni	Pancing Cumi	8	25	0	
			Pancing Ulur	1			
			Purse Seine	2			
			Gill Net	5			
			Jaring Insang Hanyut	7			
			JHIB	2			
		Juli	Pukat Cincin	5	19	3	
			JHIB	3			
			Bouke Ami	2			
			Pancing Cumi	11			
Purse Seine	1						
Agustus	Jaring Insang Hanyut	2	8	0			
	Gill Net	3					
	Pukat Labuh	3					
September	JHIB	3	8	0			
	PSPK	2					
	Gill Net	1					
	Purse Seine	1					
	Jaring Insang Hanyut	1					
Oktober	Bouke Ami	5	24	0			
	PSPK	1					
	Pancing Ulur	2					
	JHIB	10					
	Purse Seine	5					
	Pukat Cincin	1					
November	Purse Seine	2	15	3 KIA			
	JHIB	11					
	Pancing Ular	1					
	Trawl	4					
	Napoleon 028	Maret	JHIB	5	0	6	
			Trawl	1			
		Mei	JHIB	2	3	4	
			Pukat Teri	2			
			Pancing	2			
		Agustus	Gill Net	1	9	2	
			Purse Seine	5			
Kapak pengakut	2						
Pancing Ulur	2						
Pancing Cumi	1						
JHIB	1						

No	Kapal Pengawas / Speed Boat	Bulan	Periksa		Dokumen		Dokumen Lengkap
			API	Jumlah	Lengkap	Tidak Lengkap	
4		September	PSPK	5	15	0	
			Pancing Ulur	2			
			Pancing Cumi	1			
			Pukat Cincin Teri	1			
			JHIB	6			
		Oktober	Purse Seine	3	4	0	
			Pancing cumi	1			
		November	PSPK	1	6	0	
			JHIB	3			
			Pancing Cumi	2			
		Desember	PSPK	2	6	0	
			JHIB	1			
Pukat Cincin Teri	1						
Pancing Cumi	2						
5	Dolphin 14	Maret	Bouke Ami	1	6	0	
			Purse Seine	5			
		Mei	Purse Seine	7	13	0	
			Pancing	1			
			Pukat Labuh	4			
			Pancing Cumi	1			
		Agsutus	Purse Seine	3	5	0	
			JHIB	2			
		September	Purse Seine	7	7	0	
		Oktober	Bouke Ami	1	8	0	
			Pukat Cincin Pelagis Kecil	5			
			LBSN	2			
		November	Pukat Cincin Pelagis Kecil	5	7	0	
			Long Bag Set Net (LBSN)	2			
			Pukat Cincin Pelagis Kecil	4			
Desember	JHIB	2	9	0			
	Long Bag Set Net (LBSN)	3					